



AKUNTANSI SYARIAH

Teori, Konsep dan
Laporan Keuangan

Aji Dedi Mulawarman



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Motivasi Penelitian	19
1.3. Rumusan Masalah	21
1.4. Tujuan Penelitian	22
1.5. Manfaat Penelitian	22
1.6. Struktur Isi Buku	23
BAB II MENGGALI TEKNOLOGI AKUNTANSI SYARIAH MELALUI EKSTENSI HIPERSTRUKTURALISME ISLAM TERINTEGRASI	27
2.1. Pendahuluan	27
2.2. Tahap Pertama: Pengembangan Metodologi Penelitian	32
2.2.1. Proses Pertama: Menetapkan Elemen-elemen Strukturalisme	35
2.2.2. Proses Kedua: Menetapkan Elemen-elemen Poststrukturalisme	37
2.2.3. Proses Ketiga: Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi	38
2.2.4. Proses Keempat: Ekstensi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi	39
2.3. Tahap Kedua: Metode Penelitian	42
2.3.1. Konsep Pierre Bourdieu: <i>Constructivist Structuralist</i>	43
2.3.1.1. <i>Habitus</i> (Perilaku)	44
2.3.1.2. <i>Capital</i> (Modal)	45
2.3.1.3. <i>Field</i> (Lapangan)	47
2.3.1.4. <i>Practice</i> (Praktik)	47

2.3.1.5.	<i>Doxa</i> dan <i>Symbolic Violence</i> dalam <i>Practice</i> ..	48
2.3.2.	Ekstensi <i>Constructivist Structuralist</i>	49
2.3.3.	Koleksi Data Teoritis-Nonteoritis	58
2.3.4.	Koleksi Data Empiris “ <i>source</i> ” Laporan Keuangan	59
2.3.5.	Analisis Bagian-bagian dan Utuhan Laporan Keuangan Syari’ah	62
2.4.	Ringkasan	64
BAB III	BELAJAR DARI BERBAGAI KONSEP DASAR TEORITIS AKUNTANSI KONVENSIONAL	67
3.1.	Pendahuluan	67
3.2.	<i>Proprietary Theory</i>	69
3.3.	<i>Entity Theory</i>	74
3.4.	<i>Enterprise Theory</i>	78
3.4.1.	<i>Value Added</i>	79
3.4.2.	<i>Value Added Statement</i>	81
3.4.3.	Realitas <i>Enterprise Theory</i> dan <i>Value Added Statement</i>	85
3.5.	<i>Corporate Social Reporting</i>	89
3.5.1.	Alternatif Domain Baru CSR Menuju <i>Deep Ecology</i>	90
3.6.	Ringkasan	94
BAB IV	KONSEP DASAR TEORITIS AKUNTANSI SYARIAH BERBASIS <i>SHARIA’TE ENTERPRISE THEORY</i>	97
4.1.	Pendahuluan	97
4.2.	Sekularisasi Akuntansi	98
4.3.	Tujuan Akuntansi Syari’ah	101
4.3.1.	<i>Tazkiyah</i> Akuntansi	102
4.3.2.	<i>Taubid</i> sebagai Payung Segala Sesuatu	103
4.3.3.	Cinta Dalam Akuntansi Syari’ah	107
4.3.4.	Meretas Tujuan Akuntansi Syari’ah	111

4.4.	<i>Menuju Sharia'te Enterprise Theory</i>	114
4.4.1.	Akuntabilitas dalam Akuntansi Syari'ah	115
4.4.2.	Informasi dalam Akuntansi Syari'ah	117
4.5.	<i>Sharia'te Value Added Statement</i>	118
4.6.	Dari <i>Sharia'te Enterprise Theory</i> Menuju Kemungkinan <i>Sharia'te Financial Statement</i>	120
4.7.	Ringkasan	122
BAB V	MENEMUKAN HABITUS AMANAH TRAH-TRAH BISNIS SEBAGAI SUBSTANSI LAPORAN KEUANGAN	125
5.1.	Pendahuluan	125
5.2.	Konsep Amanah dalam <i>Syaria'te Enterprise Theory</i>	126
5.3.	Menggali <i>Perilaku</i> Bisnis Melalui Antropologi Sinkronis	134
5.3.1.	<i>Perilaku</i> Trah Sarekat Islam	134
5.3.2.	<i>Perilaku</i> Trah Nahdlatul Ulama	142
5.3.3.	<i>Perilaku</i> Trah Muhammadiyah	150
5.4.	Ringkasan: Amanah dalam Rangkaian Antropologis Sinkronis	155
BAB VI	SINKRONISASI ANTROPOLOGIS UNTUK MENGEMBANGKAN KONSEP TRILOGI LAPORAN KEUANGAN SYARIAH	159
6.1.	Pendahuluan	159
6.2.	Antropologi Diakronis: Substansi <i>Fitrah</i> dalam <i>Hijrah</i>	161
6.2.1.	Mengembangkan <i>Ma'isyah</i> Berbasis Konsep Kembali ke <i>Fitrah</i>	163
6.2.2.	Mengembangkan <i>Rizq</i> Berbasis Konsep Mengkreasikan <i>Fitrah</i>	166
6.2.3.	Mengembangkan <i>Maal</i> Berbasis Kreasi <i>Fitrah</i> Menuju Kesejahteraan	169

6.3.	Teoritisasi Antropologis: Interaksi Sinkronis-Diakronis	171
6.3.1.	<i>Ma'isyah</i> Berbasis Laporan Arus Kas Syari'ah	173
6.3.2.	<i>Rizq</i> Basis Laporan Nilai Tambah Syari'ah	178
6.3.3.	<i>Maak</i> Basis Neraca Syari'ah	182
6.3.4.	Tujuan Laporan Keuangan Syari'ah	185
6.4.	Pendekatan Artikulasi Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah	190
6.5.	Pengakuan Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah	193
6.6.	Pengukuran Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah	195
6.7.	Prinsip Berbasis Kas Sinergi Akrual Terbatas ..	198
6.8.	Ringkasan: Agenda Teknologis Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah	200

BAB VII LAPORAN ARUS KAS SYARI'AH:

	BERBASIS MA'ISYAH	203
7.1.	Pendahuluan	203
7.2.	Laporan Arus Kas Syari'ah: <i>State of The Art</i>	204
7.3.	Merangkai Konsep Arus Kas dari Trilogi Tradisi, Socio-Historis dan dan Empiris Kontekstual ...	207
7.3.1.	Arus Kas Syari'ah: Bernilai Finansial, Sosial, Lingkungan	208
7.3.2.	Arus Kas Syari'ah: Bernilai Keberkahan	213
7.3.3.	Arus Kas Syari'ah Bernilai Ketundukan	223
7.3.4.	Tiga Substansi Arus Kas Syari'ah	224
7.4.	Bentuk Alternatif Laporan Arus Kas Syari'ah .	226
7.4.1.	Elemen-elemen Laporan Kas Syari'ah	229
7.5.	Ringkasan	236

BAB VIII EKSISTENSI LAPORAN NILAI TAMBAH SYARI'AH:

	UJI EMPIRIS BERBASIS REZEKI	241
8.1.	Pendahuluan	241

8.2.	Laporan Nilai Tambah Syari'ah: <i>In The Beginning</i>	244
8.3.	Nilai Tambah Syari'ah dalam Realitas: Aksiologi Rezeki	253
8.3.1.	Makna Rezeki Trah-trah Bisnis	253
8.3.2.	Substansi Nilai Tambah Syari'ah Berbasis Rezeki	259
8.4.	Ekstensi Nilai Tambah Syari'ah Berbasis <i>Rizq Income</i>	261
8.5.	Ringkasan	270
BAB IX NERACA SYARI'AH BERBASIS MAAL		273
9.1.	Pendahuluan	273
9.2.	Merangkai Konsep Neraca dari Trilogi Tradisi, Sosio-Historis dan Empiris-Kontekstual	275
9.2.1.	Merangkai Kekayaan Altruistik Islami dalam Keseimbangan <i>Al Mubtth</i>	281
9.2.2.	Merangkai Kekayaan <i>Al Mubtth</i> Menjadi Kerangka Neraca Syari'ah	285
9.3.	Elemen-elemen Neraca Syari'ah	288
9.4.	Ringkasan	301
BAB X PEMBERHENTIAN SEMENTARA		307
10.1.	Pendahuluan	307
10.2.	Simpulan: Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah .	310
10.3.	Implikasi Penelitian	317
10.4.	Keterbatasan Penelitian	319
10.5.	Agenda ke Depan: Membuka Pintu-pintu Kesadaran	320
DAFTAR PUSTAKA		329
GLOSSARY		355
INDEKS		367
TENTANG PENULIS		374

Daftar Tabel

1. <i>Framework of Islamic Corporate Reports</i> (Baydoun dan Willett 1994)	4
2. Laporan Nilai Tambah Syari'ah Kuantitatif (Mula warman 2006)	6
3. Laporan Laba Rugi versi <i>Proprietary Theory</i>	73
4. Financial Statement versi <i>Entity Theory</i>	76
5. <i>Value Added Statement</i>	82
6. Neraca Lingkungan menurut Dorweiller dan Yakhou (2005)	94
7. Ringkasan Konsep <i>Ma'isyah</i> masing-masing Trah sebagai Dasar Konsep Arus Kas Syariah	177
8. Ringkasan Konsep <i>Rizq</i> Masing-masing Trah sebagai Dasar Konsep Nilai Tambah Syari'ah	180
9. Riangan Konsep <i>Maal</i> Masing-masing Trah sebagai Dasar Konsep Neraca Syari'ah	185
10. Perbedaan Pengungkapan Laporan Keuangan	202
11. Perbedaan Pengungkapan Arus Kas	229
12. Laporan Arus Kas Syari'ah Berbasis <i>Ma'isyah</i>	232
13. Laporan Nilai Tambah Syari'ah Kuantitatif dengan Keterangan	250
14. Pemaknaan Rezeki dalam Konteks Nilai Tambah Syari'ah .	256
15. Perbandingan Konsep Laba	266
16. Perbandingan Substansi Laporan Kinerja Keuangan	267
17. Penyesuaian Laporan Nilai Tambah Syari'ah Berbasis <i>Rizq</i>	268
18. Perbandingan Konsep Kekayaan	288
19. Neraca Syari'ah Berbasis <i>Maal</i>	295

Daftar Gambar

1. Penjenjangan Subsistem dari Teknosistem	41
2. Ekstensi Konsep Ruang Sosial Pierre Bourdieu	46
3. Ektensi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi	58
4. <i>Financial Measurement and Reporting Environments</i> ..	84
5. Implementasi Amanah dalam <i>Perilaku</i> Bisnis	157
6. Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah	186
7. Penerapan Nilai-nilai Spiritual dalam <i>Spiritual Company</i> ..	221
8. Penerapan Intuisi Spiritual dalam Laporan Arus Kas Syari'ah	222

CAHAYA CINTA (LUMINOSITY OF LOVE)

*"thank you from my deepest soul, to you who have willingly
taken the essence of luminosity process"*

*Love is the Dazzling Luminosity
Luminosity that is filled with Love
Luminosity that is empty of Love
Luminosity that dissolves in Love
Luminosity that flies towards Love
Luminosity that is beyond Love
Luminosity that is nourished with love
Since luminosity is the Essence of Love
Luminosity towards God
Luminosity the Utmost of Luminosity
Love the Utmost of Love*

*Cinta adalah Cahaya Keindahan
Cahaya penuh Cinta
Cahaya tanpa Cinta
Cahaya yang lebur dalam Cinta
Cahaya menuju Cinta
Cahaya yang melampaui Cinta
Cahaya yang ditumbuhi Cinta
Karena Cahaya adalah Hakikat Cinta
Cahaya menuju Tuhan
Cahaya Maha Cahaya
Cinta Maha Cinta*

*"terima kasihku yang tulus padamu yang berproses
mendapatkan hakikat cahaya"*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Saatnya akuntansi menjadi pendaran cahaya-cahaya

Sang Maha Cahaya

Itulah akuntansi yang penuh cinta pada Sang Maha Cinta

*Saatnya akuntansi merealisasi harmoni kekuatan akal dan
kelembutan hati*

Itulah keseimbangan jalal-jamal-nya akuntansi

Akuntansi yang mencapai kesempurnaan ilmu

Itulah kamal-nya akuntansi...

1 PENDAHULUAN

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, pemberi nikmat rezeki dan barakah utama, pemberi cahaya dan cinta terindah, penebar rahman dan rahim terindah, bak cahaya dan cinta yang selalu hadir di setiap diri, lingkungan dan alam semesta milik-Nya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan tersanjungkan kepada Engkau Sang *Abd-Allah*, Sang *Khalifatullah fil ardh*, Sang Nabi Besar, Sang Rasul Ujung Zaman, Sang Pemimpin Peradaban Islam, Sang Pembawa Mu'jizat Pamungkas - *Al Qur'anul Karim*, Sang Pembimbing Umat Manusia Menuju Pencerahan *Ilahiyyah*, Muhammad bin Abdullah *shallallahu alaihi wasallam*.

Akhirnya, terminal kedua telah penulis lalui, terminal kesadaran untuk ikut serta mewujudkan salah satu tugas Peradaban Yang Lebih Baik, Peradaban Yang Dicitakan Setiap

Insan Penerus Dakwah Muhammad, yaitu perwujudan akuntansi yang lebih Islami. Terminal kedua berupa terbitnya buku berjudul Akuntansi Syariah: Teori, Konsep dan Laporan Keuangan.

Buku yang ada di hadapan para pembaca ini sebenarnya merupakan hasil refleksi lanjutan penulis, setelah buku pertama berjudul Menyibak Akuntansi Syariah, selama beberapa tahun berkaitan dengan pertanyaan mendasar, apakah akuntansi Islam atau juga biasa disebut dengan akuntansi syariah memiliki “jiwa asali-nya” yang universal sekaligus lokal? Bahkan sering kita mencoba lepas dari Islam karena menganggap akuntansi sudah Islam sejak awalnya, sehingga pertanyaannya menjadi bagaimana bentuk akuntansi di Indonesia?

Untuk mendapatkan jawaban yang memuaskan (dan saya yakin jawaban penulis bukanlah jawaban satu-satunya dan memuaskan bagi yang tidak puas atas argumentasi yang ada dalam buku ini) atas pertanyaan-pertanyaan mendasar tersebut, penulis tuangkan dalam gagasan-gagasan baru mengenai akuntansi syariah. Gagasan koeksistensif teoritis-empiris sampai usulan implementasinya, berupa konsep dasar, tujuan laporan keuangan, prinsip, karakter serta bentuk laporan keuangan syariah. Seluruh gagasan dalam buku ini mempertemukan aspek normatif Islam, teori akuntansi konvensional dan teori akuntansi syariah, dengan aspek empiris aktivitas bisnis Muslim, khususnya di Indonesia. Temuan-temuan empiris diperlukan untuk membuktikan bahwa terdapat koneksitas tak terhindarkan akuntansi normatif-teoritis sebagai aspek universal, tidak dapat berdiri sendiri tanpa pengaruh budaya, religius, etis dan lokal. Seperti akan para pembaca temukan di buku ini, aspek-aspek tersebut sangat mempengaruhi bentuk

dan “*taste*” akuntansi yang memiliki nilai-nilai universalitas Islam sekaligus nilai-nilai lokal khas Indonesia. Akuntansi syariah ber-“jiwa” universalis sekaligus lokal tak dapat dipungkiri telah menjadi potret diferensiasi atas akuntansi Barat yang selama ini selalu dan “sengaja” dipaksakan sebagai bebas nilai dan dapat digunakan di manapun akuntansi diterapkan.

2. NEOLIBERALISME AKUNTANSI DI INDONESIA

Seperti kita ketahui hampir seluruh ‘peta’ akuntansi Indonesia merupakan *by product* Barat. Akuntansi konvensional (Barat di Indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis. Kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (*International Accounting Standards Committee*). Indonesia bahkan terang-terangan menyadur *Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements* IASC, dengan judul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Perkembangan terbaru, saat ini telah disosialisasikan sistem pendidikan akuntansi “baru” yang merujuk internasionalisasi dan harmonisasi standar akuntansi. Pertemuan-pertemuan, *workshop*, lokakarya, seminar mengenai perubahan kurikulum akuntansi sampai standar kelulusan akuntan juga mengikuti kebijakan IAI berkenaan Internasionalisasi Akuntansi Indonesia tahun 2010.

Dunia bisnis juga tak mau kalah, semua aktivitas dan

sistem akuntansi juga diarahkan untuk memakai acuan akuntansi Barat. Hasilnya akuntansi sekarang menjadi menara gading dan sulit sekali menyelesaikan masalah lokalitas. Akuntansi hanya mengakomodasi kepentingan "*market*" (pasar modal) dan tidak dapat menyelesaikan masalah akuntansi untuk usaha mikro, kecil dan menengah yang mendominasi perekonomian Indonesia lebih dari 90%¹. Hal ini sebenarnya telah menegaskan sifat dasar lokalitas masyarakat Indonesia.

Jelas sekali, akuntansi dan sistem pendidikan saat ini telah lepas dari realitas masyarakat Indonesia disebabkan sistem dan konsep pendidikan akuntansi dibawa langsung dari "dunia lain" (baca: Barat) yang memiliki nilai-nilai Indonesia sendiri tanpa kodifikasi dan penyesuaian yang signifikan. Akuntansi merupakan produk yang dibangun dan dikembangkan dari nilai-nilai yang berkembang di masyarakat di mana akuntansi dan sistem akuntansi dikembangkan. Akuntansi dan sistem pendidikan akuntansi memang membawa *values* (nilai-nilai) "sekularisasi" yang memiliki ciri utama *self-interest*, menekankan *bottom line* laba, hanya mengakui realitas kuantitatif, materialistis dan mekanistis (Mulawarman 2006b).

Konsekuensi nilai sekuler di atas kemudian, akuntansi didesain menjadi "perangkat hegemoni korporasi" (Mayper *et.al.* 2005) serta diarahkan untuk "mengisi" peserta didik dalam memahami kepentingan ekonomi (Amernic dan Craig 2004) dan mereduksi nilai di luar ekonomi. Kondisi yang berlangsung lama ini kemudian menjadi "dogma" akuntansi yang "universal" dan terstruktur dalam ekonomi positivistik (Truan dan Hughes 2003). Perangkat hegemoni korporasi lewat akuntansi

¹ Menurut data Indonesian *Capital Market Direktory* 2005, perusahaan yang terdaftar di bursa saham per Desember 2004 mencapai 331 perusahaan. Sebagai perbandingan, data dari Kantor Kementerian KUKM bahkan menunjukkan jumlah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mencapai 40 juta.

kemudian mengarah pada evolusi lebih lanjut sebagai “alat” neoliberalisme ekonomi, (lihat misalnya Kim 2004; Abeysekera 2005; Lehman 2005).

Harmonisasi akuntansi sebagai bagian dari neoliberalisme ditegaskan Merino *et al.* (2005 untuk kepentingan MNC's di Amerika Serikat, merupakan implementasi kekuasaan untuk melanggengkan kepentingan hegemoni korporasi melalui *manufactured consent*, atau dapat diterjemahkan bebas menjadi industrialisasi deregulasi. *Manufactured consent* adalah cara paling efektif mengarahkan kekuasaan dan justifikasi ideologis melalui deregulasi untuk mendistribusikan *wealth, security*, secara global, pada kondisi penguatan pasar yang bebas dari intervensi regulasi. Ujung-ujungnya adalah profit sebagai ideologi neoliberal paling utama yang harus masuk dalam deregulasi melalui pintu harmonisasi akuntansi. Teknisnya, MNC's mendesain deregulasi lewat harmonisasi akuntansi dengan menjadikan akuntan dan analis finansial sebagai “*professional gatekeeper*” untuk menginjeksikan kepentingan MNC's lewat lobi politik dan kelonggaran deregulasi audit demi profit.

Langkah berikutnya seperti ditegaskan Diaconu (2007), adalah keterlibatan Amerika Serikat terlihat dalam pengembangan standar akuntansi internasional lewat IASB (*International Accounting Standard Boards*). Secara *de facto*, negara-negara yang mengembangkan standar akuntansi Internasional sebenarnya memiliki ketergantungan perdagangan dengan Amerika Serikat. Konsekuensinya, negara-negara tersebut harus mempersiapkan sistem akuntansi mereka sesuai Pedoman Akuntansi Berterima Umum di Amerika Serikat (US GAAP). Ketergantungan ini kemudian berdampak

pula pada penerimaan US GAAP tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di negara-negara lain yang berhubungan dengannya. Amerika Serikat sebagai negara yang secara ekonomi memang kuat dan besar di dunia dan kemampuannya untuk mengendalikan sebagian besar *capital market* posisinya sangat kuat terhadap perubahan IASB. Dampaknya jelas, IAS (*International Accounting Standards*) tidak dapat diadopsi tanpa persetujuan dari FASB (*Financial Accounting Standard Boards*) dari Amerika Serikat. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat disebut oleh Merino et al. (2005) sebagai *Setting Agenda MNC's*) melalui harmonisasi untuk kepentingan MNC's.

Bagaimana kemudian intervensi akuntansi melalui harmonisasi dilakukan di Indonesia? Graham dan Neu (2003) mendeteksinya dengan apa yang disebut mereka aliran kebijakan (*flows of policies*). Aliran kebijakan di Indonesia dilakukan setelah mengalami krisis keuangan tahun 1997 melalui IMF (*International Monetary Fund*). IMF mengajukan beberapa syarat atas *lending conditionalities* dari *Memorandum of Economic and Financial Policies*² apabila menginginkan perubahan makro ekonomi Indonesia. Salah satu syaratnya adalah praktik akuntansi di Indonesia harus sesuai dan mengadopsi kebijakan keuangan Neo-Liberal yang dibuat oleh IASB. Tekanan ekonomi politik tersebut memperlihatkan bagaimana fungsi akuntansi sebagai teknologi dari kendali terikat (*surveillance*) atas informasi untuk kalkulasi terpusat dan prakondisi intervensi subordinasi terselubung. Bahkan kesimpulan penelusuran akuntansi dan globalisasi dari Graham dan Neu (2003) adalah bahwa organisasi dan teknologi akuntansi sebenarnya tidak hanya diarahkan untuk

² Nota kesepahaman ini ditandatangani antara IMF dan pemerintah Indonesia tahun 1997 sebelum Presiden Soeharto turun dari jabatannya akibat reformasi tahun 1998.

menciptakan dan menstabilkan asimetri dan ketidakseimbangan lintas batas internasional, tetapi lebih jauh lagi sebenarnya akuntansi tidak netral untuk melayani *salient liberalization* terutama bagi MNC's lewat institusi-institusi internasionalnya (seperti IMF, IASB, World Bank dan lainnya) atas aliran modal, produk, informasi, kebijakan maupun orang. Ujung-ujungnya adalah kepastian aliran kas baik secara abstrak berbentuk *bottom line* laba maupun riil berbentuk peningkatan ekuitas bagi para *owners* perusahaan-perusahaan multinasional.

3. AKUNTANSI DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL KEINDONESIAAN

Pertanyaannya kemudian apakah kita dapat lepas dari jerat akuntansi neoliberal yang telah sedemikian rupa menjadi jebakan sosiologis kita? Apakah memang kita tidak memiliki sistem akuntansi sesuai realitas kita? Apakah masyarakat Indonesia tidak dapat mengakomodasi akuntansi dengan tetap melakukan penyesuaian sesuai realitas masyarakat Indonesia, sesuai realitas Indonesia yang religius dan bahkan didominasi 85% masyarakat Muslim?

Apabila kita mempercayai bahwa sistem akuntansi dan perekonomian di Indonesia harus mandiri dan bebas dari jebakan sosiologis dan kebudayaan Barat, maka yang paling rasional dan mungkin adalah melakukan perubahan dengan *élan vital* kita sendiri. Perubahan lewat kemandirian sebenarnya telah diungkapkan Allah lewat ayat Qur'an berikut ini: "Sungguh Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka". Cuplikan Al Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11 tersebut merupakan kalimat yang tidak asing bagi kita. Hanya

masalahnya perubahan tersebut ditengarai Bisri (2008, 47) telah berubah maknanya bila dilihat dari perkembangan Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang sesuai kepentingan sesuai jaman di mana kita sedang berada.

Di awal kemerdekaan, lanjut Bisri (2008, 48), ayat tersebut dijadikan jargon Presiden Soekarno sebagai “ayat revolusi” melalui kontekstualisasi, aktualisasi atau populerisasi kata “apa” (*maa*), yang menurut Mustofa Bisri merupakan makna *mubham* (disamarkan), menjadi kata “nasib”. Sehingga kalimat tersebut, untuk kepentingan politis dan tujuan memberi semangat masyarakat Indonesia yang sedang berubah di era Presiden Soekarno menjadi “Sungguh Allah tidak akan mengubah nasib yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah nasib yang ada pada diri mereka”. Di era Presiden Soeharto, ketika peta politik telah kembali berubah, masyarakat diajak untuk tidak lagi berada pada situasi transisional, tetapi masuk pada situasi membangun, maka kata “apa” berubah dari “nasib” menjadi “keadaan”, menjadi “ayat pembangunan”. Ayat Allah-pun berubah maknanya menjadi “Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan yang ada pada suatu kaum sampai kaum itu sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka”.

Kritik Bisri terhadap upaya dalil mendalil dengan ayat-ayat dan sabda-sabda Rasulullah seperti dilakukan di atas adalah upaya mendorong “kepentingan” (2008, 47). Ketika ayat dijadikan alat kepentingan kontekstual, aktual dan populer, tanpa kearifan dan mendudukkan substansi Islam sebagai simbolisasi universalitas tak lekang jaman, maka yang terjadi adalah pengaburan makna ayat sesungguhnya. Bahkan beliau kemudian ingin mendudukkan universalitas ayat Qur’an

tersebut menjadi bermakna kontekstual tanpa harus terjebak kepentingan tertentu. Hasilnya adalah tafsir ayat bukan sebagai ayat revolusi atau pembangunan tetapi mendudukan ayat Makkiyah tersebut menjadi ayat krisis (2008, 50).

Mendudukan Surat Ar-Rad ayat 11 sebagai ayat krisis memang lebih tepat, karena menjamin kesakralan sebagai ayat universal sekaligus simbol kontekstual kondisi di mana ayat tersebut diungkapkan. Jelas sekali, sejak Orde Lama, Orde Reformasi, sampai Orde Reformasi, Indonesia tidak pernah lepas dari satu kata yang sama, yaitu Krisis. Makna krisis tersebut dijelaskan Bisri (2008, 50) sebagai berikut:

“Maka apabila tiba-tiba Tanah Air menjadi terasa gersang, alam menjadi garang, masyarakat menjadi sangar, saling curiga-mencurigai atau saling terkam; pendek kata krisis melanda semua aspek kehidupan kita di mana-mana, bukankah sebaiknya kita meneliti diri-diri kita sendiri? Apakah selama ini semua kita masih tetap manusia yang berbudaya ataukah ada - bahkan banyak - yang menjadi misalnya serigala yang culas; tikus yang rakus; gurita yang serakah; kera yang tidak tahu malu; setan yang takabur?”

Agar lepas dari krisis Bisri (2008, 50) memberi solusi tafsir *mubham* yang sangat indah. Solusi tafsir *mubham* tersebut harus menjadi élan setiap kita untuk kembali ke fitrah, seperti diungkapkan beliau sebagai berikut:

“Apabila memang demikian kondisi kita, dan kita ingin kembali dalam pelukan rahmat Tuhan dan limpahan karunia-Nya, kita pun mesti mengubah perilaku kita. Kembali ke kemanusiaan dan kehambaan kita semula.”

tuk, yaitu Penyucian Awal (realitas yang selalu disucikan)³, Penyucian melalui Koeksistensi (realitas berpasangan)⁴ dan Penyucian melalui Adaptasi Kontekstual (realitas yang menyesuaikan tanpa menghilangkan substansi idealitas)⁵. Penjelasan lebih lanjut dapat dibaca dalam Bab 2 buku ini.

Mudahnya, penyucian akuntansi yang asasi harus dapat menumbuhkan puncak Kesadaran Berketuhanan dengan cinta dan moral religius. Cinta dan moral religius adalah landasan utama dari akuntansi itu sendiri. Religiusitas berujung keimanan, dan inti iman adalah cinta. Keimanan adalah Cinta Ilahiah setiap manusia yang mendalam yang dalam bahasa Al Qur'an ditegaskan sebagai berikut:

“orang-orang yang beriman sangat dalam kecintaan mereka kepada Allah”

Bahkan Rasulullah Muhammad saw. mengungkapkan:

“orang-orang yang benar-benar beriman ketika aku dan Allah yang paling dicintai bagimu”

Sesungguhnya pula perkembangan spiritual seseorang adalah proses pencerahan yang terus menerus dengan selalu mengharapkan cinta Allah (*Mahabatullah*) untuk menuju puncak kesadaran dan kesempurnaan spiritual. Inilah yang disebut proses *tazkiyah*, proses penyucian kesadaran insaniah dari yang hewani menuju Ilahiah yang utama.

³ Konsep ini digunakan Mahzar (2004) dalam Islamisasi Teknologi; Al Attas (1981) dalam Islamisasi Bahasa; Mulawarman (2006a) dalam Islamisasi Laporan Nilai Tambah.

⁴ Konsep ini digunakan Kuntowidjojo (2004) atau Faruqi (1995) dalam Islamisasi Ilmu Sosial; Triuwono (2000a) dalam Islamisasi Ilmu Akuntansi.

⁵ Konsep ini digunakan oleh Fazlur Rahman (1965) dalam *Islamic Methodology in History*.

Cinta di sini bukan hanya bersifat materi tetapi cinta dalam makna materi, mental dan spiritual, *truly love* atau *hyperlove* (cinta yang melampaui). Cinta yang melampaui adalah sebagai bentuk pemahaman yang utuh tentang interaksi kemanusiaan yang asali didasari rasa saling percaya dan kejujuran serta menghilangkan kecurigaan dan penghianatan.

5. AKUNTANSI SYARIAH: ANTARA IDEALIS DAN PRAGMATIS

Aspek metodologis dalam memahami akuntansi syariah seperti dijelaskan di atas ternyata berdampak pada pengembangan akuntansi syariah. Akuntansi syariah melalui penyucian dapat dikatakan di sini sebagai bentuk pengembangan akuntansi syariah dari sisi idealis. Seperti diketahui akuntansi syariah apabila dilihat dari pendekatan teoritis-praktisnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu akuntansi syariah idealis dan pragmatis. Akuntansi syariah pragmatis mengutamakan adaptasi akuntansi syariah konvensional mulai konsep dasar teoritis sampai bentuk teknologinya, disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan akuntansi syariah idealis mencoba membangun teori sampai bentuk teknologinya berdasar nilai-nilai Islam.

Aliran akuntansi pragmatis menganggap beberapa konsep dan teori akuntansi konvensional dapat digunakan dengan beberapa modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk kepentingan pragmatis seperti penggunaan akuntansi dalam perusahaan Islami yang memerlukan legitimasi pelaporan berdasarkan nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah. Akomodasi akuntansi konvensional tersebut memang terpola dalam kebijakan akuntansi seperti *Accounting and Auditing*

Standards for Islamic Financial Institutions yang dikeluarkan AAOIFI secara internasional dan PSAK No. 59 atau yang terbaru PSAK 101-106 di Indonesia. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam tujuan akuntansi syari'ah aliran pragmatis yang masih berpedoman pada tujuan akuntansi konvensional dengan perubahan modifikasi dan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Tujuan akuntansi di sini lebih pada pendekatan kewajiban, berbasis *entity theory* dengan akuntabilitas terbatas.

Bila kita lihat lebih jauh, regulasi mengenai bentuk laporan keuangan yang dikeluarkan AAOIFI misalnya, disamping mengeluarkan bentuk laporan keuangan yang tidak berbeda dengan akuntansi konvensional (neraca, laporan laba rugi dan laporan aliran kas) juga menetapkan beberapa laporan lain seperti analisis laporan keuangan mengenai sumber dana untuk zakat dan penggunaannya; analisis laporan keuangan mengenai *earnings* atau *expenditures* yang dilarang berdasarkan syari'ah; laporan tanggung jawab sosial bank syari'ah; serta laporan pengembangan sumber daya manusia untuk bank syari'ah. Ketentuan AAOIFI lebih diutamakan untuk kepentingan ekonomi, sedangkan ketentuan syari'ah, sosial dan lingkungan merupakan ketentuan tambahan. Dampak dari ketentuan AAOIFI yang longgar tersebut, membuka peluang perbankan syari'ah mementingkan aspek ekonomi daripada aspek syari'ah, sosial maupun lingkungan. Sinyal ini terbukti dari beberapa penelitian empiris seperti dilakukan Sulaiman dan Latiff (2003), Hameed dan Yaya (2003b), Syafei, et al. (2004).

Aliran Akuntansi Syari'ah Idealis di sisi lain melihat akomodasi yang terlalu "terbuka dan longgar" jelas-jelas tidak dapat diterima. Beberapa alasan yang diajukan misalnya,

landasan filosofis akuntansi konvensional merupakan representasi pandangan dunia Barat yang kapitalistik, sekuler dan liberal serta didominasi kepentingan laba (lihat misalnya Gambling dan Karim 1997; Baydoun dan Willett 1994 dan 2000; Triyuwono 2006; Sulaiman 2001; Mulawarman 2006a).

Konsep dasar teoritis akuntansi yang sesuai dengan nilai dan tujuan syariah menurut aliran idealis adalah *Shari'ate Enterprise Theory*. Menurut konsep ini *stakeholders* adalah pihak yang berhak menerima pendistribusian nilai tambah dan diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu *direct participants* dan *indirect participants*. *Direct stakeholders* adalah pihak yang terkait langsung dengan bisnis perusahaan, yang terdiri dari: pemegang saham, manajemen, karyawan, kreditur, pemasok, pemerintah, dan lain-lainnya. *Indirect stakeholders* adalah pihak yang tidak terkait langsung dengan bisnis perusahaan, terdiri dari: masyarakat *mustahiq* (penerima *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*), dan lingkungan alam (misalnya untuk pelestarian alam). Penjelasan lebih lanjut mengenai aliran idealis dan pragmatis dalam akuntansi syariah dapat dilihat dalam Bab 1.

6. AKUNTANSI SYARIAH IDEALIS: DARI TEORI MENUJU TEKNOLOGI

Sebagaimana telah kita lihat di atas, pengembangan teori akuntansi syariah yang dilakukan aliran idealis sebagai konsekuensi pendekatan metodologis melalui penyucian ilmu lebih memberikan kekuatan substansial dan bebas dari *mudharat-mudharat* yang masih diidap oleh akuntansi pragmatis. Dengan tidak mengesampingkan peran, prestasi dan kemampuan adaptif yang telah dilakukan oleh akuntansi syariah pragmatis, buku ini mencoba memberikan keyakinan

lebih jauh bahwa sudah saatnya akuntansi syariah harus mempertegas *strategic positioning*-nya sebagai *school of thought* yang memang memiliki “kekuatan” ontologis, epistemologis, aksiologis-etis sekaligus kontekstual yang utuh.

Akuntansi syariah idealis, sebagaimana akan kita lihat nanti dalam buku ini telah dapat menyelesaikan beberapa agenda teoritisnya, mulai dari tujuan dan konsep dasar teoritis (Bab 4), tujuan laporan keuangan, prinsip, karakter (Bab 6) bahkan sampai bentuk tawaran alternatif teknologi yaitu laporan keuangan (Bab 7, 8 dan 9) yang memiliki keterkaitan dogmatik terhadap Islam sebagai landasan normatifnya sekaligus empiris-kontekstual di dalam realitas kemasyarakatan, terutama masyarakat Muslim (Bab 5).

Untuk memudahkan penjelasan mengenai proses *Tazkiyah* Akuntansi secara konkrit, di sini akan disampaikan hasil “*tazkiyah*” akuntansi dalam bentuk struktur teori akuntansi berdasarkan nilai utama Islam, yaitu *Tawhid*. Struktur Teori Akuntansi Syari’ah (Mulawarman 2007), sebagaimana akan diulas panjang lebar dalam buku ini, dapat digambarkan dalam bentuk diagram struktural di bawah ini:

Struktur Teori Akuntansi Syari'ah



Tujuan akuntansi syari'ah realisasi kecintaan utama kepada Allah SWT, dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah.

Konsekuensi tujuan akuntansi syari'ah seperti itu akan membentuk konsep dasar teoritis akuntansi syariah yang berbeda, yaitu *Shariate Enterprise Theory* (SET). Akuntansi konvensional berdasarkan konsep *proprietary theory* dan berevolusi menjadi *entity theory*. Penjelasan mengenai perbandingan konsep dasar teoritis akuntansi dapat dilihat dalam Bab 3. SET dikembangkan berdasarkan karakter keseimbangan yang mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jama'ah, ketundukan-kreativitas. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan, pertama, SET memiliki kepedulian pada *stakeholders* yang luas,

yaitu Allah⁶, manusia⁷ dan alam⁸. Kepedulian *stakeholders* merupakan sisi keseimbangan kreativitas yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (*Khalifatullah fil ardh*). Konsekuensi nilai keseimbangan kedua adalah SET memiliki pertanggungjawaban dari sisi ketundukan dan kepatuhan menjalankan syariat Islam yang merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai abdi Allah (*Abd' Allah*). Ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya tujuan syari'ah bahwa setiap penciptaan, hasil dan distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria *halal, thoyib* dan bebas riba. Penjelasan mengenai SET dapat dilihat di Bab 4.

Dampak dari konsep dasar teoritis akuntansi syariah adalah tujuan laporan keuangan syari'ah yang didefinisikan sebagai realisasi akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syari'ah yang terekam dalam bentuk laporan keuangan syariah dan memiliki prinsip-prinsip maupun karakter khas.

Prinsip akuntansi syariah terdiri dari, pertama, *articulated approach* laporan keuangan khas. *Articulated approach* laporan keuangan syari'ah tidak menggunakan *revenue-expense approach* maupun *asset-liability approach*, tetapi menggunakan *shariate value added approach*. Kedua, implikasi pendekatan artikulasi nilai tambah syari'ah memiliki

⁶ Allah sebagai *stakeholders* tertinggi agar akuntansi syari'ah tetap bertujuan "membangkitkan kesadaran Ketuhanan" para penggunanya.

⁷ Manusia dibedakan menjadi *direct stakeholders* (pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan dan lainnya) dan *indirect stakeholders* (masyarakat umum khususnya mustahiq dan lingkungan dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam).

⁸ Alam adalah pihak yang memberikan kontribusi bagi hidup dan matinya perusahaan sebagaimana pihak Allah dan manusia. Namun alam tidak menghendaki distribusi kesejahteraan dari perusahaan dalam bentuk uang sebagaimana yang diinginkan manusia. Wujud distribusi kesejahteraan berupa kepedulian terhadap kelestarian alam, pencegahan pencemaran dan lainnya.

pengakuan syari'ah yang khas. Pengakuan syari'ah dijalankan dalam bentuk akuntabilitas ketundukan dan kreativitas. Ketiga, implikasi pendekatan artikulasi nilai tambah syairah berkenaan dengan pengukuran syari'ah yang mengacu pada *current value* (material/finansial dan pengukuran bersifat batin dan spiritual. Keempat, artikulasi nilai tambah syariah berimplikasi pada digunakannya prinsip berbasis kas sinergis dengan basis akrual. Hal ini dilakukan untuk menghindari prinsip akrual terutama potensi masa depan yang memiliki sifat *gharar* dan *maysir* yang dilarang dalam Islam.

Karakter laporan keuangan syariah memiliki sifat material-spiritual, egoistis-altruistis, kuantitatif-kualitatif dan ketundukan-kreativitas. Prinsip dan Karakter laporan keuangan inilah yang menjadi dasar terbentuknya teknologi akuntansi syariah dan sekaligus terbentuk dari realitas bisnis masyarakat Muslim (dalam buku ini dilakukan oleh masyarakat Muslim Indonesia). Teknologi tersebut dinamakan Trilogi Laporan Keuangan Syariah.

Trilogi Laporan Keuangan Syari'ah merupakan kesatuan alur *ma'isyah* (bekerja untuk mencari rezeki (*rizq*) penuh *barokah* sehingga berdampak pada *maal* (kekayaan. Kesatuan alur memiliki tujuan laporan keuangan untuk merealisasikan akuntabilitas dan penyampaian informasi sesuai tujuan akuntansi syari'ah yang terekam dalam bentuk laporan arus kas syari'ah berbasis *ma'isyah* (Bab 7), laporan nilai tambah syari'ah berbasis *rizq* (Bab 8), dan neraca syariah berbasis *maal* (Bab 9).

7. CATATAN AKHIR

Melakukan perubahan di tengah carut marutnya realitas kekinian kita memang tidaklah mudah. Kesabaran dan keikhlasan melalui *tazkiyah* harus terus dikedepankan mulai

dari diri, sosial, lingkungan, kebudayaan, dan berujung pada Peradaban Yang Lebih Baik. Buku yang merupakan disertasi doctoral penulis ini merupakan salah satu upaya lanjutan dari penulis untuk mendorong perubahan menuju Peradaban Yang Lebih Baik tersebut. Konsisten dengan apa yang pernah penulis ungkapkan dalam buku pertama berjudul “Menyibak Akuntansi Syariah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syariah dari Wacana ke Aksi” (Mulawarman 2006a):

Membangun sains dan teknologi yang Islami, yaitu melakukan Islamisasi Pengetahuan, merupakan proyek pengembangan sains dan teknologi yang memiliki nilai-nilai akhlak/moral dan spiritual yang transenden, inheren di dalamnya, bukan parsial atau terpecah-pecah. Islamisasi Pengetahuan sendiri sebenarnya adalah salah satu tugas peradaban, bukan hanya tugas *self* atau menyatunya seseorang dengan Tuhannya. Tetapi tugas peradaban yang menyangkut *self*, keluarga, masyarakat dan keumatan yang seutuhnya. Tugas tersebut dilaksanakan dalam bentuk struktural dan sekaligus integral. Tidak bisa menggagas Peradaban Islam dalam realitasnya dilakukan secara parsial dan terkotak-kotak. Karena ketika membangun peradaban Islam dipahami sebagai *egoism* beragama, hal tersebut menyebabkan individu-individu yang telah terbentuk keagamaannya dalam membentuk peradaban, akan menjadi bagian yang tak utuh lagi, menjadi “Peradaban Muslim-muslim”, bukan menjadi Peradaban Islam.

Semoga pula apa yang ditesiskan Kuntowijoyo (1999, 95) bahwa kesadaran balik atas terjadinya alienasi atau *anomie* ekonomi dan keterpurukan ekonomi global di tengah masyarakat kita yang “sakit” akan benar-benar memberikan usaha konkrit melakukan mobilitas sosial membentuk kesadaran budaya.

Kesadaran balik bukanlah bentuk kontradiksi antara “jargon” dan “kenyataan sejarah”. Jargon masyarakat Indonesia

sering mengecam tradisi liberal karena tradisi tersebut adalah ideologi yang merusak cita-cita Indonesia. Tetapi di sisi lain, kenyataan sejarah memperlihatkan misalnya di sektor ekonomi Indonesia masih merupakan *state regulated capitalism*. Pandangan *state regulated capitalism* mendudukan hubungan timbal balik terbatas antara kekuasaan negara dan dunia bisnis dengan cara membagi-bagikan privilese oleh negara kepada dunia bisnis. Hubungan “khusus” ini jelas akan “membunuh” sistem kelas terbuka, karena yang terjadi adalah *recruitment* berencana ke dalam lingkungan elit di antara negara dan dunia bisnis secara terbatas. Struktur kelas menjadi tertutup, sedangkan di kalangan elit tersebut terjadilah pengabdian diri secara berencana dunia bisnis dan negara yang tidak jelas ujung pangkal siapa pengabdian dan siapa tuan (Kuntowijoto 1999, 76).

Artinya, seperti ditegaskan beliau, saatnya sekarang diperlukan langkah-langkah konkrit. Pertama, pembaharuan sistem sosial rasionalisme harus disertai dengan etika. Kedua, pembaharuan ekonomi (termasuk akuntansi di dalamnya) harus melakukan perubahan pendekatan positivisme dan mekanis menjadi pendekatan humanistik. Ketiga, pembaharuan budaya dengan mendorong semaksimal mungkin nilai-nilai agama di seluruh tatanan sosial dengan cara menghilangkan keterasingan secara kolektif maupun individual. Secara utuh, ketiga pembaharuan tersebut diperlukan penekanan lebih besar pada nilai-nilai non-kontraktual dalam masyarakat modern yang terlalu menekankan “logika” kontraktual, akan membangkitkan kembali keutuhan sistem sosial kita. Agama sebagai substansi religiusitas, baik sebagai kepercayaan kolektif maupun individual, akan memberi makna dan substansi hidup, yang pada akhirnya akan menghilangkan keterasingan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga terutama kepada Ayahanda, Abah, atas “sangu” Islam dan kemandirian yang tak terhingga hingga detik ini. Mama, atas siraman cinta, dan kesejukan senyuman kesabarannya. Mas Danang, kakakku yang selalu menemani dan tempat berkeluh kesah mengarungi dunia nyata. Mas Didit (alm) dan Dodi (alm) semoga kalian selalu mendapatkan hikmah dan ketenangan “di sana”. Istriku tersayang, Inti, sang “kernel” penyeimbang langkah. Anak-anakku, Afif, Cica, Dimas (alm), Alam dan Aliya, tempatku menumpahkan kasih sayang dan kerinduan.

Penulis mengucapkan terima kasih “lewat cahaya” kepada “guru spiritual-melampaui materi”, Sang Raja Tanpa Mahkota, Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. Hormatku yang tak terhingga dan tak ternilai atas inspirasi dan pencerahannya sampai detik ini.

Penulis ucapkan terima kasih yang sangat dalam juga kepada guru-guru kami di Universitas Brawijaya, Prof. Iwan Triyuwono, Gugus Irianto, PhD, Dr. Unti Ludigdo, Prof Made Sudarma, Prof Bambang Subroto, Prof Sutrisno, serta Prof Tjiptohadi Sawarjuwono (Universitas Airlangga) atas bimbingan dan kesabaran “meladeni kenakalan intelektual” penulis selama ini. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada Prof Sugeng Mardiyanto (alm) mantan Rektor Univeritas Negeri Yogyakarta, Sardiman SPd, MPd., Dekan FISE, Universitas Negeri Yogyakarta atas diskusi dan wahana diskursus ilmiahnya; Dr. Dwi Martani, Departemen Akuntansi FE-UI atas bantuannya selama ini. *Assoc. Professor* Dr. M. Akhyar Adnan, dari IIUM, Prof. Sofyan Syafri Harahap dari Universitas Trisakti, serta Dr. Suwardjono dari Universitas Gadjah Mada atas kritik-kritik membangunnya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada rekan-rekan seperjuangan, tempat penulis berdiskusi dan mengasah konsistensi membangun peradaban masa depan yang lebih baik. Bang Zulkifli Halim (Anggota DPR-RI dan Rektor Universitas Cokroaminoto Yogyakarta), Mas Awalil Rizky (Managing Director dari Bright Indonesia) dan Mbak Etik, Mas Nasyith Majidi (Chairman dari Bright Indonesia), sahabatku Farouk A. Alwyni (Direktur Al-Ijarah Shariah Finance Indonesia dan Chairman dari Central of Study of Islamic Economics), Mas Saat Suharto (Direktur Utama PT Permodalan Madani dan Pengurus BMT Center), Pak Dr. Haji Masyhudi Muqorrobin (Ketua Departemen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Mbak Zuhriyah, Pak Muslihin di Jogjakarta), Mas Suharsono (Pegiat Hidayatullah Jakarta), Mas Fattah Hidayat (Dosen Universitas Negeri Malang), Mas Farid Cahyono (Aliansi Jurnalis Indonesia) dan Mbak Nunik, Lukman Hakim Hassan (Dosen Universitas Sebelas Maret Surakarta), Sunarto (Dosen Universitas Islam Indonesia), Abdul Haris Noor (pengusaha mebel Jepara), Saifullah Aziz (pengusaha di Jepara), Imam Sujangi (politikus), Ismet di Jakarta, Ribhan di Lamongan, Ashad Kusuma Jaya (Kreasi Wacana Yogyakarta), Efdil Heriansyah di Banjar Baru, Aswandi Asgap Serampoe di Muara Enim, Syaukani Bowo dan Isnaini di Yogyakarta, Pak Kandidat Doktor Yusuf Hidayat (UIN Syarif Hidayatullah), Mas Damai dan teman-teman di ex-Komunitas Maguwo, Imam Hassibu, Sahrul E. Dasopang (Ketua PB-HMI MPO, teman-teman aktivitas muda seperti Azwar, Alex, Roni, Warijan, Nilo, Ayib, Bowo, aktivis Cabang Jogja, serta adik-adik Cabang Malang (tetap semangat ya...)).

Tak lupa teman-teman S2, terutama Agus Sumanto dan Satia Maharani (Universitas Negeri Malang) serta Amalia

Yulianti (Universitas Merdeka Malang), dan juga teman-teman S3, terutama Pak Achsin, Bu Wiwik dan Bu Endang (Universitas Brawijaya), Pak Hero (Universitas Pembangunan Nasional Surabaya), Pak Ridwan (STIESIA Surabaya), Pak Sarifudin, Bu Ratna, Pak Darwis dan Pak Alimuddin (Universitas Hassanudin Makassar), Bu Masiyah Kholmi (Universitas Muhammadiyah Malang), Bu Thoyyib (Universitas Negeri Malang), Bu Meutia Inten (Universitas Sriwijaya Palembang), Pak Agus Samekto (STIE Perbanas Surabaya), Pak Setyo (STIE “ABM” Malangkececwara Malang), Pak Arisyahidin (Universitas Islam Kediri), Pak Ali Fikri (Universitas Negeri Mataram), Zaenal Fanani (Universitas Airlangga), Pak Budi (Universitas Merdeka Malang), “*thanks berat*” atas diskusi dan candanya selama penulis berinteraksi di kampus biru, Universitas Brawijaya.

Salut juga atas kinerja dan semangat guru-guru dan karyawan di Masjidil ‘Ilm Bani Hasyim, Sekolah Bertaraf Internasional Singosari, Malang di bawah “komando” Pak Ari, Bu Zahroh, dan Pak Zuhri. Serta karyawan di lingkungan Petebe Group di bawah “komando” Pak Notariawan dan Mbak Tri Sulawati.

Teman-teman “aktivis” pemakalah yang sering bertemu dan bercengkerama terutama di forum Simposium Nasional Akuntansi (SNA IAI), seperti Mas Ja’far Shodiq dan Mas Kiryanto (Universitas Islam Sultan Agung Semarang), Mas Ardi Hamzah (Universitas Trunojoyo, Bangkalan), Mas Rizal Yaya (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), Mas Doddy Setyawan (Universitas Sebelas Maret Surakarta), Dr. Tatang Ari Gumanti (Universitas Jember), Mas Priyo Hari Adi dan Mbak Intiyas Utama (Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga), Dr. Haryo Kuncoro (Universitas Negeri Jakarta).

Terima kasih juga kami sampaikan kepada KH. Mahmud Ali Zain, pembina BMT Sidogiri, Pasuruan, beserta para ustad yang sangat bersemangat mengembangkan ekonomi syariah untuk masyarakat; Pak Ishar (almarhum dan keluarga di Sawojajar, Malang; Ibu A, atas bantuan buku-buku mengenai HOS Tjokroaminoto yang tak ternilai harganya. Demikian pula rekan-rekan di Universitas Cokroaminoto Jogjakarta, civitas akademika Program Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi dan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, yang tak bisa disebutkan satu persatu di sini. Serta sahabat-sahabat penggiat ekonomi Islam seperti Mas Anharil Huda, General Manager BMT PSU di Malang dan Mas Riyanto di Bank Bukopin Syariah (ex Bank Persyarikatan Indonesia, rekan-rekan Tamziz Wonosobo, penggiat BMT Center, serta BMT Madani Jogja beserta krunya).

Akhirnya, terima kasihku yang tak terhingga kepada para Pencari Cahaya Maha Cahaya, pencari Cinta Maha Cinta. Maaf untuk semuanya, *billabittaufiq wal hidayah*.

Singosari, Penghujung Tahun 1429 H
Wassalam

Aji Dedi Mula warman

BAB I

PENDAHULUAN

An enhancement of the current double-entry bookkeeping perhaps has to do something with the concept of the time value of money and the opportunity cost of capital, accounting for cash or certainty equivalents to assess risk, dealing with the economics of utility

(Yong-Ha Hyon and Sae-Woon Park)

1.1. LATAR BELAKANG

S segala puji hanya bagi Allah. Sesungguhnya kesucian dan kebenaran hanyalah bersumber dari dan diniatkan/ditujukan kepada Allah. Kesucian dan kebenaran untuk mendapatkan cinta dan cahaya terindah, cinta dan cahaya Allah. Amin.

Teknologi akuntansi syari'ah merupakan bentuk laporan keuangan yang komprehensif dan utuh, yaitu substansi normatif sekaligus praktik/teknik dari akuntansi. Teknologi akuntansi syari'ah saat ini masih menjadi diskursus serius di kalangan akademisi akuntansi, yaitu antara aliran pragmatis dan idealis. Diskursus terutama berkenaan dengan konsep dasar teoritis laporan keuangan sampai pada implikasinya berbentuk teknologi (laporan keuangan).

Konsep dasar teoritis akuntansi syari'ah aliran pragmatis tetap menyetujui konsep dasar teoritis akuntansi konvensional, yaitu *entity theory*, dengan penyesuaian berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Seperti diketahui orientasi *entity theory* adalah progresifitas

income dan ekuitas unit bisnis yang berujung kepentingan *stockholders*. Konsekuensinya, akuntansi syaria'ah juga menggunakan laporan keuangan konvensional dengan beberapa modifikasi (lihat Syahatah 2001; Harahap 2001; Kusumawati 2005). Modifikasi dilakukan untuk mengakomodasi atau melegitimasi prinsip-prinsip syaria'ah dalam pelaporan keuangan. Bentuk akomodatif terpola misalnya pada kebijakan akuntansi AASIFI (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*) tahun 1998 untuk lembaga keuangan yang dikeluarkan AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Bentuk akomodatif di Indonesia juga terlihat pada PSAK¹ No. 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syaria'ah² dan PSAK No. 101-106 untuk perusahaan-perusahaan syaria'ah yang dikeluarkan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)³.

Aliran idealis di sisi lain menggunakan konsep dasar teoritis akuntansi syaria'ah dengan mengutamakan keseimbangan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* (Hameed 2000a; 2000b; Hameed dan Yaya 2003a; Baydoun dan Willett 1994) yang oleh Slamet (2001) dan Triyuwono (2006) disebut sebagai *sharia'te enterprise theory*.

¹ Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

² Penyajian laporan keuangan bank syaria'ah menurut PSAK No. 59 terdiri dari komponen Neraca; Laporan laba rugi; Laporan arus kas; Laporan perubahan ekuitas; Laporan perubahan dana investasi terikat; Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah; Laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; serta Catatan atas laporan keuangan. Bentuk laporan keuangan syaria'ah akomodatif dari aliran akuntansi syaria'ah pragmatis tersebut di atas menurut beberapa akademisi akuntansi memang didukung oleh teori akuntansi modern yang telah "d disesuaikan" secara konseptual dan akademis serta memenuhi aturan-aturan *syara'* (lihat misalnya Zaid 2004; Adnan 2005; Syahatah 2001). Operasionalisasi penyesuaian nampak dalam penentuan asumsi dasar dari konsep akuntansi bank syaria'ah dalam PSAK No. 59. Asumsi dasar mengacu pada konsep akuntansi keuangan konvensional yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual (*accrual basis*). Khusus penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas (*cash basis*) (IAI 2002, 4).

³ PSAK No. 101 yang mendasari PSAK No. 102 sampai 106, secara substansial sebenarnya tidak berbeda dengan PSAK No. 1. Perbedaannya hanya pada akomodasi beberapa istilah dan kesepakatan-kesepakatan akomodatif *entity theory* dan prinsip-prinsip yang mengikutinya disesuaikan dengan kepentingan syaria'ah. Bila dilihat secara umum, PSAK No. 101 tidak memiliki perbedaan dengan PSAK No. 59.

Gagasan awal mengenai bentuk laporan keuangan aliran idealis dilakukan Gambling dan Karim (1991, 130-135). Mereka lebih cenderung menggunakan laporan keuangan berbasis *current cost accounting* versi *Chamber's Continuously Contemporary Accounting* (CoCoA)⁴ daripada menggunakan *historical cost accounting*. Akuntansi syaria'ah idealis melihat *historical cost* merupakan rasionalisasi konsep *objectivity*, *matching* dan *realization* sehingga tidak dapat digunakan (Adnan 1997; Gambling dan Karim 1991) karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria'ah Islam. Gambling dan Karim (1991,92) menyitir Sterling (1967) bahwa *historical cost* merupakan derivasi langsung konsep konservatisme. Konsep konservatisme akan mengakibatkan kekayaan dinilai terlalu rendah, sehingga besarnya keharusan pembayaran zakat juga terlalu rendah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Adnan (1997) bahwa *historical cost* mengakibatkan biasanya informasi seperti nilai kejujuran dan keadilan yang melanggar ketentuan syaria'ah dalam hal penilaian atau pengakuan. Penggunaan *current cost accounting* dan terutama nilai realisasi bersih (*net realizable value*) adalah untuk penilaian *net current asset* dalam perhitungan *zakat* (Gambling dan Karim 1991, 99). Dijelaskan pula oleh Triyuwono dan As'udi (2000) bahwa *current cost accounting* dapat menyajikan penilaian lebih adil di mana pemilik aktiva dapat membayarkan jumlah kewajiban zakatnya. Perhitungannya disesuaikan kondisi harta yang dimiliki maupun inflasi ekonomi serta naiknya harga.

Baydoun dan Willett (1994) memberi usulan lebih konkrit mengenai laporan keuangan yaitu *Islamic Corporate Reports* (ICRs). ICRs terdiri dari Neraca Berbasis Nilai Sekarang, Laporan Nilai

⁴ Gagasan dan konsep CoCoA dari Chambers dapat dilihat misalnya dalam Larson dan Schatke (1966); Chambers (1967) dan (1976); Whittington dan Zeff (2001).

Tambah dan Laporan Arus Kas. Berikut *Islamic Corporate Reports* versi Baydoun dan Willett (1994):

Tabel 1. Framework of Islamic Corporate Reports

19X1 values			19X2 values	
Original	Current		Original	Current
		Cash Balances		
		Debtors		
		Stocks		
		Less Creditors		
		Tangible Assets		
		Intangible Assets		
x	x	Share Capital	x	x
		Reinvested Funds:		
		Retained Profits		
		Revaluations		
N/A			N/A	
x	x		x	x

Value added Statement	
Sources:	\$
Revenues	x
Bought in items	x
Revaluations	x
	x
Distributions:	
Beneficiaries (eg. zakat, khums)	x
Government (eg. taxes)	x
Employees (eg. wages)	x
Owners (eg. dividends)	x
Charities, moques (eg. gifts)	x
Reinvested funds	
Profit retained (Note)	x
Revaluations	x
	x

Cashflow Statement		\$
Value added		x
Adjustment:		
Revaluations		x
Profit/Loss on disposal of fixed assets		x
Other sources:		
- sale of fixed assets		x
- issues of shares		x
		x
Other sources:		
Taxes		x
Wages		x
Dividends		x
Charitable donations		x
Changes in working capital		x

Note: details of the traditional form of profit and loss account would be relegated to the notes of the Accounts

Neraca menurut mereka seharusnya berbentuk *Current Value Balance Sheet*⁵. Salah satu argumen mereka menurut Sulaiman (2001) adalah berkaitan pembayaran *zakat* yang berbasis nilai sekarang (*current values*). Berkenaan Laporan Laba Rugi, mereka mengusulkan diganti menjadi Laporan Nilai Tambah (*Value Added Statement*). Penggantian ini diperlukan karena Laporan Nilai Tambah lebih memiliki akuntabilitas sosial dan lingkungan. Sedangkan Laporan Arus Kas tidak terjadi perubahan berarti, kecuali untuk penyesuaian dari perubahan bentuk Neraca dan Laporan Nilai Tambah.

Islamic Corporate Reports usulan Baydoun dan Willett (1994; 2000) bila diteliti lebih jauh ternyata masih terdapat beberapa masalah. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing masalah dari laporan-laporan yang terdapat pada *Islamic Corporate Reports*.

Pertama, mengenai laporan nilai tambah. Laporan nilai tambah menurut Mulawarman (2006a) belum cukup memadai sebagai informasi akuntansi Islami karena tidak memberi ruang pertimbangan *halal*. Laporan nilai tambah hanya mementingkan aspek distribusi dari sumber daya ekonomi (Hameed dan Yaya 2003). Akuntabilitas Laporan nilai tambah juga belum berdasar *shari'ate enterprise theory* (Triyuwono 2002b). Di samping ke dua hal di atas, Mulawarman (2006a) juga melihat pencatatan sumber daya (*sources*) untuk penentuan dan pendistribusian nilai tambah belum memberikan kepastian reduksi riba (*interest*).

Berdasarkan masalah di atas, Mulawarman (2006a) kemudian mengusulkan laporan nilai tambah syari'ah (*shari'ate value added statement*) sebagai perluasan laporan nilai tambah dari Baydoun dan Willett (1994; 2000). Laporan nilai tambah syari'ah terdiri dari dua

⁵ Penjelasan detail mengenai pentingnya current value awalnya dibahas oleh Gambling dan Karim (1991, 52-54).

bentuk laporan, yaitu laporan kuantitatif dan kualitatif yang saling terikat satu sama lain. Laporan kuantitatif mencatat aktivitas finansial-sosial-lingkungan (akun kreativitas) dan bersifat *halal-thoyib*-bebas *riba* (akun ketundukan). Laporan kualitatif berupa catatan laporan yang tidak dapat dimasukkan dalam laporan kuantitatif serta berkenaan dengan bentuk transaksi batin-spiritual. Berikut bentuk Laporan Nilai Tambah Syari'ah Kuantitatif:

Tabel 2. Laporan Nilai Tambah Syari'ah Kuantitatif

Penciptaan VA		Finansial	Sosial- Lingkungan	Combined
Output	Ketundukan Primer	Xa	-	Xa
	Ketundukan Primer	Xb	-	Xb
	Kreativitas Primer	-	Ya	Ya
	Kreativitas Sekunder	-	Yb	Yb
	Jumlah Output	Xc	Yc	Za
Input	Ketundukan Sekunder	Xd	-	Xd
Revaluation	Kreativitas Primer	Xe	-	Xe
	VA Kotor	Xf	Yd	Zb
TAZKIYAH (Zc)				
Pembayaran Zakat kepada 8 Aanaf (Zd)				
VA HALAL DAN THOYIB (Za)				
Distribusi VA		Finansial	Sosial & Lingkungan	Combined
Internal				
Karyawan	Ketundukan Sekunder	Xg	-	Xg
	Ketundukan Primer	Xh		Xh
Owners	Kreativitas Primer	Xi	-	Xi
Reinvestment Funds	Kreativitas Sekunder	Xj	-	Xj
Eksternal				
Pemerintah	Ketundukan Primer		Ye	Ye
	Kreativitas Sekunder		Yf	Yf
Residents	Ketundukan Sekunder	-	Yg	Yg
Masyarakat	Kreativitas Sekunder	-	Yh	Yh

Laporan nilai tambah syari'ah memberikan keluasan pengungkapan sesuai *sbhari'ate enterprise theory*. Berbasis definisi nilai tambah syari'ah (*sbhari'ate value added*) Mulawarman (2006a) telah dapat menurunkan bentuk laporan nilai tambah syari'ah secara konkrit. Triyuwono (2007) kemudian memberi penjelasan lebih mudah mengenai konsep nilai tambah syari'ah, bahwa nilai tambah syari'ah merupakan nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual yang diperoleh, diproses dan didistribusikan dengan cara yang *halal*.

Pemaknaan nilai tambah syari'ah dari Triyuwono (2007) dapat dijadikan *source* tambahan penjelasan bentuk laporan nilai tambah syari'ah dari Mulawarman (2006a). Meskipun penjelasan Triyuwono (2007) baru melihat pembentukan, proses dan distribusi nilai tambah (baik ekonomi, mental maupun spiritual) harus memenuhi prinsip *halal*. Mulawarman (2006a) sendiri sebenarnya telah menjelaskan bahwa pembentukan, proses dan distribusi nilai tambah tidak hanya berkenaan dengan masalah *halal*, tetapi juga harus bersifat *tboyib* dan bebas *riba*⁶. Dengan demikian pembentukan, proses dan distribusi nilai tambah syari'ah (baik ekonomi, mental dan spiritual) harus memenuhi prinsip *halal*, *tboyib* dan bebas *riba*.

Konsep nilai tambah syariaah Triyuwono (2007) bila dilihat lebih jauh juga masih melihat *sbhari'ate enterprise theory* sebagai basis akuntansi syariaah idealis yang memiliki asumsi dasar manusia sebagai *kbalifatullah 'fil ardb* (wakil Allah di bumi). Dijelaskan Mulawarman (2006a) bahwa *sbhari'ate enterprise theory* bila memang memiliki substansi akuntansi berpasangan, maka harus melihat asumsi dasar manusia dalam substansi akuntansi berpasangan pula. Asumsi dasar manusia dalam Islam di samping sebagai *kbalifatullah*

⁶ Penjelasan komprehensif mengenai Riba dilihat dari sisi normative dan dihadapkan pada sisi kontekstual ilmiah dapat dilihat dari Saeed (2004)

fil ardh juga memiliki asumsi dasar pasangannya, yaitu manusia sebagai *abd' Allah* (konsep kepatuhan dan ketundukan manusia kepada Allah). Prinsip berpasangan *abd' Allah* dan *khalifatullah fil ardh* telah memberikan solusi implementasi konsep teknologi akuntansi syariah yang memiliki dua akun utama, yaitu akun ketundukan (representasi *abd' Allah*) dan akun kreativitas (representasi *khalifatullah fil ardh*).

Laporan nilai tambah syari'ah sesuai penjelasan Mulawarman (2006a) berbentuk kuantitatif dan kualitatif. Kedua bentuk laporan tersebut bersifat *mandatory* (wajib). Dua bentuk laporan tersebut secara substantif tidak terpisah tetapi merupakan kesatuan. Hanya masalahnya, terpisahnya laporan tersebut apabila diterapkan di lapangan dapat memberi peluang perusahaan lebih mementingkan penyampaian akuntabilitas dan informasi laporan kuantitatif. Laporan kualitatif meskipun bersifat *mandatory*, akhirnya kembali menjadi laporan yang tidak penting, menjadi *pseudo-mandatory*. *Pseudo-mandatory* di sini dapat diartikan bahwa laporan kualitatif secara substansial memang bersifat *mandatory*, tetapi praktiknya di lapangan menjadi "mandul", bahkan akan tergeser kembali menjadi laporan *voluntary*. Dengan demikian, perlu penyesuaian bentuk laporan nilai tambah syari'ah. Terpisahnya laporan nilai tambah syari'ah kuantitatif dan kualitatif perlu diupayakan secara teknologis menjadi satu kesatuan tak terpisah secara konkrit.

Laporan nilai tambah syari'ah usulan Mulawarman (2006a) juga perlu diuji secara empiris. Desain laporan nilai tambah syari'ah sebenarnya masih menyisakan masalah berkaitan realitas akuntansi, terutama realitas masyarakat Muslim Indonesia. Artinya, nilai tambah syari'ah sebagai basis konseptual laporan perlu dilihat secara kontekstual berakar dari nilai-nilai masyarakat Muslim Indonesia.

Apakah masyarakat Muslim Indonesia memang menjalankan bisnis dengan nilai-nilai Islam yang secara substantif bersesuaian dengan konsep nilai tambah syari'ah? Apakah nilai-nilai kontekstual bisnis (sebagai turunan nilai normatif Islam) masyarakat Muslim Indonesia sesuai dengan konsep nilai tambah syari'ah?

Masalah kedua dari *Islamic Corporate Reports* dari Baydoun dan Willett (1994; 2000) adalah mengenai perubahan neraca menjadi berbasis nilai sekarang. Perubahan basis neraca menjadi nilai sekarang usulan Baydoun dan Willett (1994; 2000) didasarkan pada dua hal, yaitu pengukuran (*measurement*) dan pengungkapan (*disclosure*). Kriteria pengukuran dalam domain akuntansi syari'ah memang berbeda dengan akuntansi konvensional. Masalahnya, pengungkapan dari Baydoun dan Willett (1994; 2000) sebenarnya hanyalah konsekuensi logis perubahan bentuk pengukuran berbasis historis menjadi berbasis sekarang.

Menyadari kekurangan Baydoun dan Willett (1994; 2000), Sulaiman dan Willett (2003) memberikan usulan perluasan ICR's dalam aspek sosial dan lingkungan berbasis syari'ah. Menurut mereka keadilan sosial lingkungan tidak hanya untuk kepentingan minoritas, karyawan, lingkungan dan sebagainya. Tetapi juga memberi penekanan kewajiban *zakat* bagi *shareholder* Muslim sebagai alat redistribusi *income*.

Sulaiman dan Willett (2003) menjelaskan lebih jauh bahwa akuntansi konvensional biasanya melihat tujuan tanggung jawab sosial akuntansi (*social responsibility accounting*) terutama adalah untuk melihat bagaimana aktivitas perusahaan berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (*quality of life of society*) dan menekankan pentingnya akuntabilitas. Tujuan utama tanggung jawab sosial akuntansi seperti itu mirip dengan akuntansi syaria'ah tetapi memiliki fokus yang lebih luas. Penekanan keadilan sosial menurut

Islam tidak hanya muncul dalam pengungkapan (*disclosure*) seperti laporan lingkungan, karyawan minoritas dan lainnya. Laporan keuangan dalam perspektif Islam harus dapat menunjukkan keterkaitan antara *shareholders* Muslim dengan kewajibannya terhadap zakat, yaitu alat untuk redistribusi laba (*income*). Di samping itu, bila dilihat dari perspektif Barat (*Western perspective*) juga berkenaan dengan masalah bunga (*interest*) dan ketidakadilan praktik dagang, tidak secara eksplisit menjadi aspek sosial yang penting. Sedangkan Islam jelas menggarisbawahi pentingnya masalah tersebut dalam koridor syari'ah, karena hal tersebut akan berdampak pada kebaikan komunitas (*well-being of the community*). Berdasarkan alasan tersebut, maka masalah-masalah tersebut jelas harus menjadi bagian dari praktik pengungkapan perusahaan yang melakukan operasi dan aktivitas Islami. Responsibilitas sosial akuntansi yang diperlukan dalam pelaporan keuangan versi Islam jelas lebih luas daripada bentuk pelaporan keuangan versi Barat yang sekuler (*Western Secular Financial Reporting*).

Berbicara lebih jauh mengenai pengungkapan, menarik bila kita melihat perkembangan dari domain akuntansi sosial dan lingkungan. Aliran akuntansi sosial dan lingkungan menekankan perubahan pengungkapan bukan hanya berkaitan kemauan dan kepatuhan perusahaan. Lebih penting lagi, sifat dan bentuk pengungkapan sosial dan lingkungan tidak hanya bersifat *voluntary*, tetapi bersifat *mandatory*. Dampak pandangan aliran akuntansi sosial seperti itu telah memberikan kreativitas bentuk pengungkapan-pengungkapan laporan keuangan baru. Seperti misalnya Mook *et al.* (2003) mengajukan usulan pengganti neraca, yang disebut *socioeconomic resource statement*; atau Ribeiro dan Santos (2002) mengajukan *social balance sheet* atau neraca sosial. Neraca sosial menurut mereka mencatat informasi ekonomi dan sosial untuk

kepentingan masyarakat. Artinya, pengungkapan aktivitas berdasarkan keluasan entitas perusahaan, yaitu privat sekaligus publik, serta berorientasi profit sekaligus non-profit. Kontribusi neraca sosial pada seluruh entitas bukan hanya *voluntary* tetapi lebih bersifat *mandatory*. Aksi dan kontribusi utama harus berhubungan dengan relasi sosial maupun lingkungan. Aksi relasi sosial adalah setiap manfaat yang diberikan pada pekerja atau karyawan maupun komunitas dan pembayaran pajak. Aksi relasi lingkungan adalah melakukan realisasi biaya untuk kepentingan *preservation*, proteksi atau *recuperation* ekologis.

Aliran sosial dan lingkungan terbaru seperti Dorweiler dan Yakhou (2005) bahkan mempertanyakan pendekatan *entity theory* sebagai basis diutamakannya laporan laba rugi daripada neraca. Menurut Dorweiler dan Yakhou (2005), akuntansi konvensional dengan dasar *entity theory* lebih mengutamakan laporan laba rugi dan pengukuran kekayaan direpresentasikan dalam bentuk *income*. Sementara akuntansi lingkungan berbasis *enterprise theory*, mengutamakan neraca dan pengukuran kekayaan direpresentasikan dalam bentuk lingkungan.

Tujuan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam akuntansi syariah sendiri berbeda dengan akuntansi konvensional maupun akuntansi sosial dan lingkungan seperti Mook *et al.* (2003; 2005) atau Dorweiler dan Yakhou (2005). Kepentingan neraca dalam akuntansi syariah melihat kekayaan sebagai konsep kepemilikan yang relatif terbuka.

Aset disamping untuk kepentingan peningkatan kekayaan bersifat internal (*owners*), juga berhubungan dengan kepentingan *agent*, karyawan; tindakan sosial berkenaan perubahan aset itu sendiri, pada masyarakat, pemerintah dan lingkungan alam; serta berkenaan kriteria pengukuran dan pengakuan berbasis syariah.

Pertanyaannya kemudian apakah pengembangan neraca dalam domain akuntansi syari'ah hanya sampai di situ? Jika pengembangan neraca dikerangkakan dari *shari'ate enterprise theory*, maka bentuk pengganti neraca atau bentuk lain yang muncul mungkin lebih dari pemikiran-pemikiran di atas. Penetapan definisi, pengakuan, pengukuran, sampai penyajian neraca secara umum sebenarnya berhubungan dengan konsep dan perubahan kekayaan entitas.

Kekayaan (*wealth*) menurut pandangan masyarakat Barat dijelaskan Armour (1999) awalnya didefinisikan sebagai kekayaan umum (masyarakat, nasional). Kekayaan saat ini ternyata telah berubah dari *wealth*⁷ menjadi *riches*⁸, yaitu kekayaan adalah milik dan untuk kepentingan pribadi⁹. Kritik mirip Armour (1999) disampaikan Anielsky (2003) mengenai reduksi makna kekayaan. Kekayaan sekarang selalu diasosiasikan dengan uang, tabungan, investasi rumah, atau bentuk-bentuk modal finansial lain. Berdasarkan hal tersebut Anielsky (2003) kemudian mengembangkan *genuine wealth* atau kekayaan¹⁰ asli, yaitu sesuatu yang dapat membuat hidup berguna (*worthwhile*) dan lebih baik (*wellbeing*)¹¹. Gagasan Anielsky (2003) mirip penjelasan Zohar dan Marshall (2005) bahwa kekayaan harus mewujud dalam bentuk "menjadi lebih berkualitas".

⁷ *Wealth* dalam konteks peradaban menurut Armour (1999) adalah penguasaan komunitas atas barang, jasa dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang layak sehingga keberadaban dan kesantunan masyarakat dapat dipertahankan keseimbangannya.

⁸ *Riches* di sisi lain merupakan penguatan individual, kelompok dan perusahaan serta sebagai sumber kompetisi antar mereka untuk tujuan kekuasaan.

⁹ Konsep kekayaan menurut Armour (1999) memunculkan deviasi dalam 3 basis peradaban. Peradaban Islam masih berorientasi sesuai *wealth*, kekayaan untuk semua; peradaban Cina untuk kepentingan keluarga/kelompok; sedangkan peradaban Barat untuk kepentingan pribadi (*riches*).

¹⁰ *Wealth*, menurutnya berasal dari dua kata bahasa Inggris lama, "weal" (*well-being*) dan "th" (*condition*), ketika dua kata tersebut disebut bersama-sama berarti "the condition of well being".

¹¹ Kekayaan asli dikembangkan untuk meluruskan nilai dan prinsip aktual lebih baik secara personal-profesional-spiritual-lingkungan-finansial. Alat dan proses untuk mengukur/memprediksi kondisi fisik dan kualitatif, segala sesuatu yang membuat hidup lebih berguna.

Artinya, kekayaan tidak hanya berhubungan dengan materi, di dalamnya juga terdapat makna batin dan spiritual.

Konsep kekayaan dari Armor (1999), Anielsky (2003) dan Zohar dan Marshall (2005) bersesuaian dengan konsep spiritualitas ekologis-kebumian-postpatriarkal dari Capra (1999). Capra (1999) melihat perlunya integrasi organis materi-batin-spiritual dalam konsep ekonomi. Tetapi ternyata, spiritualitas menurutnya adalah dinamika swa-organisasi keseluruhan kosmos atau postpatriarkal kebumian, bukan Tuhan Transendental.

Kekayaan menurut Islam disebut *maal*. Seluruh bentuk *maal* di alam semesta menurut Islam adalah milik Allah SWT. Konsep *maal* dijelaskan dalam Al Qur'an sebagai berikut:

Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (QS. Al-Hadiid ayat 7)

Ayat di atas menegaskan bahwa harta hakikatnya adalah milik Allah. Manusia diberi sebagian dari harta milik Allah (spiritualitas substantif) dan dengan tanggungjawab itu manusia diwajibkan menafkahkan hartanya sesuai ketentuan Allah (materialitas-syari'ah) agar mendapat ketenangan dan pahala (batin). Allah akan memberi amanah hak penguasaan atas kekayaan kepada manusia, setelah manusia memanifestasikan keimanan dalam bentuk ketundukan kepada-Nya dan kreativitas keterwakilan di alam semesta.

Menempatkan kekayaan dalam konteks tujuan syari'ah, yaitu *mashlahah*, dengan demikian bermakna hak kepemilikan setiap manusia hanya berbentuk titipan atau amanah Allah. Kepemilikan privat murni di dunia tidak diperbolehkan. Tujuan manusia berusaha

adalah mencari nafkah untuk mendapat rezeki bernilai tambah bagi dirinya, sosial dan lingkungan. Dampak mencari rezeki yaitu kekayaan penuh berkah. Perlu ditekankan di sini bahwa kekayaan bukanlah tujuan utama. Tujuan utama tetap ada pada tujuan syari'ah, yaitu nilai tambah untuk *masbalaḥ*, sedangkan (hasil) kekayaan hanyalah dampak ikutan¹².

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan tidak mutlaknya hak dan konsentrasi terbatas atas *maal*, Islam mengingatkan perlunya *wasathan* (keseimbangan). Menurut Al Qur'an kata *wasathan* (QS. 2: 143) bersanding dengan *ummah*, yaitu *ummatan wasathan*. Ciri *ummatan wasathan*, dijelaskan Taher (2005) adalah, pertama, hak kebebasan harus selalu diimbangi kewajiban kedua, keseimbangan antara kehidupan dunia dan *ukhrawi*; ketiga, keseimbangan akal dan moral.

Konsep mirip *wasathan* menurut Nasr (1994) disebut *Al Mubith* (QS. 4:126). *Al-Mubith* sebagai sifat keseimbangan alam semesta dalam bingkai sifat Allah. Artinya, keseimbangan kekayaan haruslah selalu berdimensi material-batin-spiritual dan mengarah pada kepemilikan proporsional diri-sosial dan lingkungan dalam lingkup kekuasaan Allah. *Al Mubith* adalah realitas segala sesuatu untuk menuju kesatuan ketundukan (*abd' Allah*) dan kreativitas (*Khalifatullah fil ardh*) tak terpisahkan.

Masalah ketiga dari *Islamic Corporate Reports* dari Baydoun dan Willett (1994; 2000) terletak pada laporan arus kas. Bentuk laporan arus kas tidak terdapat perubahan berarti dan sama dengan konsep akuntansi konvensional. Sebagaimana diketahui laporan arus kas konvensional merupakan pengembangan dari konsep *cash flow accounting*. *Cash flow accounting* menurut Ashton (1976) berkem-

¹² Bahkan menurut Hamka kekayaan hanyalah alat dan bukan tujuan itu sendiri, karena tujuan utama adalah mengingat Allah, ridha Allah serta menegakkan jalan Allah (1984, 242).

bang sejak awal tahun 70'an ketika terjadi kegerahan dan ketidakpuasan dari akademisi dan praktisi terhadap *historical cost accounting*. *Cash flow accounting*¹³ muncul terutama berkenaan masalah penilaian aset dan pengukuran *income* yang sangat menyulitkan. Berdasarkan kesulitan tersebut Ashton (1976) mengajukan sistem alternatif akuntansi untuk memecahkan masalah dalam memberi petunjuk investor melihat kinerja perusahaan di masa lalu, kini dan masa depan¹⁴.

Seperti telah dijelaskan di muka, laporan keuangan syariah seharusnya tidak hanya mengkomodasi informasi dan pencatatan transaksi yang hanya bersifat materi saja. Pertanyaannya kemudian, apabila laporan arus kas syariah dikembangkan dari konsep yang sama, yaitu *cash flow accounting*, maka dapatkah aliran kas perusahaan memotret kepentingan dalam tataran sosial dan lingkungan, serta bersifat spiritual dan mental?

Konsep *cash flow accounting* ternyata masih dibayangi salah satu karakter atau sifat dasar laporan keuangan konvensional, yaitu *going concern*¹⁵. Ditegaskan Egginton (1984) dan Lee (1981) bahwa *cash flow accounting* menekankan pentingnya *going concern* sebagai bagian dari pengambilan keputusan dan penilaian *time value*

¹³ Akademisi yang mengawali penelitian dan mengungkapkan *Cash Flow Accounting* secara konseptual di antaranya Lawson (1971), Lee (1979; 1982; 1987), Ashton (1976), Rutherford (1982), Egginton (1984; 1985). Setelah itu banyak berkembang penelitian-penelitian secara empiris mengenai manfaat laporan arus kas seperti Bowen et al. (1986), Bowen (1987), Wilson (1986, 1987), Rayburn (1986), Livnat dan Zarowin (1990) dan lain-lain sampai sekarang. Tahun 1987 FASB baru mewajibkan arus kas sebagai pengganti laporan perubahan posisi keuangan melalui SFAS No 95.

¹⁴ Titik tekan pentingnya Laporan Arus Kas diungkapkan Lee (1974) dapat memberikan kebutuhan informasi terhadap investor dan bukannya laba akuntansi karena laba sangat rentan terhadap praktik manipulasi dan perubahan metoda akuntansi. Bowen (1987) menunjukkan bahwa informasi arus kas merupakan prediktor yang lebih baik dari laba akrual dalam memprediksi arus kas masa depan.

¹⁵ *Going concern* dalam APB Statement No. 4 menyiratkan bahwa dalam menyusun laporan keuangan harus dianggap bahwa perusahaan atau entitas yang dilaporkan akan terus beroperasi di masa-masa yang akan datang, tidak terdapat asumsi perusahaan akan bangkrut atau dilikuidasi.

of money. Going concern jelas sangat mekanistik dan berseberangan dengan konsep hidup. Dalam konsep hidup setiap manusia dan seluruh alam semesta tidak akan abadi, tetapi mengalami siklus hidup yang mengarah kematian, yang kekal hanya Allah.

Masalah lain dari laporan arus kas konvensional adalah berkenaan model prediksi. Prediksi laporan arus kas menurut Lawson dalam Ashton (1976) didasarkan *time value of money*. Ditegaskan Lee (1979) bahwa *cash flow accounting* sangat dipengaruhi pemikiran Irving Fisher berhubungan dengan konsepsi *interest*¹⁶. Penggunaan *time value of money* dalam *cash flow accounting* berhubungan dengan adanya *allocation problem* pada kondisi ketidakpastian (*uncertainty condition*) aliran kas (Lee 1982; Rutherford 1982).

Perkembangan terbaru setelah munculnya teknologi informasi menunjukkan *cash flow accounting* telah menggeser laporan arus kas menjadi bentuk "laporan arus kas baru". "Laporan arus kas baru" menjadi alat mencatat laporan aktivitas perdagangan saham "maya". Realitas "maya" dari "arus kas baru" telah menjadi "mainan baru" bagi pemilik modal. Baik laporan arus kas "lama" maupun "baru", semuanya memiliki tujuan sama, yaitu memastikan segala sesuatu atas ketidakpastian segala sesuatu.

Menurut pandangan akuntansi syari'ah, penghitungan *uncertainty condition* menggunakan *time value of money* dekat dengan perilaku *riba* yang disebabkan *gharar*. *Gharar* adalah sifat memastikan adanya ketidakpastian. *Gharar* dapat dikatakan "penyakit" *riba* paling akut dalam ekonomi, keuangan dan akuntansi syari'ah (Karim 2004a; Achsien 2000; Suwailem 2002; Muhammad 2004; Antonio 2000).

¹⁶ Weil (1990) menjelaskan pula bahwa sebenarnya teknik pengukuran dalam akuntansi selalu menggunakan *time value of money*. Hal ini menegaskan bahwa penentuan waktu (*timing*) dari aliran kas (*cash flow*) mempengaruhi nilai uang.

Atas keberatan-keberatan hadirnya *riba* dan *gharar*, ekonomi dan keuangan Islam biasanya mengajukan konsep *profit-loss sharing/PLS System (musharakah system)* dan *bai'* (sistem jual beli) sebagai alternatifnya. PLS *system* seperti dijelaskan Vogel dan Hayes (1998, 211) memiliki mekanisme yang unik berkenaan dengan biaya modal (*cost of capital*), yaitu menganut perhitungan *cost of capital* pada titik nol.

Dengan demikian diperlukan bentuk *cash flow* atau penggantinya yang mungkin dapat mengakomodasi tidak hanya substansi sistem PLS maupun *bai'* seperti dikembangkan perbankan syari'ah. Konstruksi laporan nilai tambah perlu pendalaman dari khasanah Islam sendiri. Sehingga terjadi kongruensi antara kepentingan akuntansi dan kepentingan akuntan melakukan sinergi nilai ibadah dan *muamalah*.

Baydoun dan Willett (2000) sebenarnya menjelaskan pula mengenai *statement of retained earnings* (SRE). Tetapi SRE menurut mereka bukan merupakan laporan yang penting seperti tradisi akuntansi konvensional. SRE dalam tradisi Indonesia sendiri biasanya dianggap sebagai bagian penting laporan keuangan. SRE merupakan informasi progres laba antar dua laporan tahunan yang akan didistribusikan pada pemegang saham (*preferred* dan *common stock*) dan laba yang masih dimiliki perusahaan. Menurut Suwardjono (2003, 80) SRE merupakan salah satu bentuk laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dapat berbentuk laporan perubahan ekuitas pemilik untuk perusahaan berbentuk perseorangan, laporan perubahan ekuitas persekutuan untuk perusahaan berbentuk persekutuan, laporan laba ditahan untuk perusahaan berbentuk perseroan terbatas, dan laporan perubahan sisa hasil usaha untuk koperasi. Tetapi dengan kemungkinan penerapan nilai-nilai Islam yang memiliki prinsip keseimbangan

(*wasathan*) dan dipakainya pengukuran berbasis *current value*, maka menjadi sangat mungkin dipertanyakan kembali relevansinya.

Bila dilihat kembali konsep *wasathan*, berkaitan sistem keseimbangan kehidupan manusia relasinya dengan sosial dan lingkungan. Bentuk keseimbangan dalam konteks SRE dapat merujuk pada metafora konsep Penyangga atau *Buffer*, dari tradisi keilmuan geo-politik dan kimia. Tradisi geo-politik misalnya, untuk menjaga keseimbangan antar negara terdapat konsep negara penyangga atau *buffer zone/state*. *Buffer state* adalah negara yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan politik dominan. *Buffer state* menjadi titik temu kepentingan informasi spionase dan negosiasi politik antara dua atau lebih negara dominan¹⁷.

Konsep *buffer* atau penyangga juga terdapat pada ilmu kimia, yaitu larutan penyangga atau larutan *buffer*¹⁸. Larutan *buffer* terdapat dalam darah dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sifat koloid (kekentalan) darah. Pada tingkat tertentu lemak atau minyak diperlukan oleh tubuh (Winarno 1989, 115; Grolier 2005, 287). Tetapi bila kita mengkonsumsi makanan berlemak terlalu banyak akan terjadi ketidakseimbangan peredaran darah. Larutan *buffer* sebagai penjaga stabilitas darah tidak mampu lagi menahan sifat koloid darah. Ketidakseimbangan menyebabkan pengendapan kolesterol dan zat-zat berlemak dalam dinding sebelah dalam arteri, sehingga mengganggu peredaran darah dan menyebabkan penyakit aterosklerosis¹⁹ (Fessenden dan Fessenden 1989, 425).

¹⁷ Di era kolonialisme, Thailand dapat disebut *buffer zone* Asia, yaitu menjadi titik temu kolonialisme Inggris dan kolonialisme Perancis. Perjanjian Inggris dan Perancis tahun 1896 menetapkan Thailand sebagai *buffer state*. *Buffer state* juga dilakukan dalam Congress of Vienna tahun 1814-1815, yang salah satunya menetapkan Alsace-Lorraine sebagai *border-area* untuk memisahkan Perancis dan Jerman. Setelah Perang Dunia I diadakan *Treaty of Versailles* Tahun 1919 dengan salah satu keputusan Rhineland sebagai *buffer-area* bebas intervensi militer (Wikipedia 2006).

¹⁸ Larutan *buffer* adalah larutan yang memiliki konsentrasi ion H⁺ tertentu dan tidak mudah berubah. Larutan ini jika ditambah sedikit asam, atau sedikit basa maupun diencerkan, pH-nya relatif tetap. Oleh karena itu jika kita menginginkan suatu larutan yang memiliki pH tertentu dan tidak mudah berubah dapat menggunakan larutan penyangga.

Metafora larutan *buffer* ataupun *buffer zone* menjadi penting digunakan sebagai salah satu bentuk penyangga laporan keuangan. Sistem penyangga laporan keuangan sebenarnya terletak pada laporan nilai tambah syari'ah. Mengapa laporan nilai tambah syari'ah? Karena laporan nilai tambah syari'ah memiliki satu akun khas, yaitu *zakat*. *Zakat* berfungsi sebagai penyangga keseimbangan peredaran pembentukan dan distribusi nilai tambah kepada setiap *stakeholders*. Laporan nilai tambah syari'ah juga menjadi laporan penyangga antara laporan arus kas dan neraca. Keseimbangan laporan keuangan akan terganggu pada saat SRE ditampilkan menjadi salah satu laporan keuangan utama. Karena SRE lebih mementingkan informasi dan akuntabilitas *earnings* kepada pemilik dan bukan kepada *stakeholders*.

1.2. MOTIVASI PENELITIAN

Penjelasan panjang lebar mengenai latar belakang di atas memberikan motivasi peneliti untuk melakukan perumusan laporan keuangan yang berpusat pada *Tazkiyah*. Menurut Lathif (1998) *tazkiyah* secara bahasa berarti suci, berkembang dan bertambah. Secara umum, lanjutnya, *tazkiyah* adalah proses memperbaiki dan penyucian jiwa melalui ilmu yang bermanfaat dan amal shalih, mengerjakan segala yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang.

Tazkiyah dideskripsikan dalam konteks ekonomi oleh Ahmad dalam Gambling dan Karim (1991, 33) sebagai proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus. *Tazkiyah* mempunyai sifat menyeluruh dan mencakup aspek moral, rohani dan material yang terikat satu

¹⁹ Aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah, dimana kolesterol dan lipid-lipid lain melapisi dinding dalam pembuluh darah (arteri)

sama lainnya. Semuanya berorientasi pada optimasi cita-cita dan nilai kesejahteraan manusia dalam semua dimensi, baik dunia maupun akherat. *Tazkiyah* juga mencakup seluruh perubahan dan keseimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

Nilai-nilai yang terdapat dalam konsep *tazkiyah* di atas dapat diturunkan lebih jauh untuk mengembangkan konsep teknologi akuntansi syari'ah, yaitu laporan keuangan syariah. Laporan nilai tambah syari'ah misalnya, merupakan hasil rekonstruksi salah satu bentuk laporan keuangan syari'ah berbasis *tazkiyah* melalui konsep inti dari teknologi, yaitu teknosistem²⁰. Laporan nilai tambah syari'ah berbasis *tazkiyah* memiliki nilai-nilai utama yaitu berorientasi kesejahteraan manusia (perluasan akuntabilitas yang mementingkan distribusi kepada *stakeholders*) dengan tetap menekankan pada keseimbangan ketundukan (*abd' Allah*) dan kreativitas (*khalifatullah fil ardh*).

Rekonstruksi laporan keuangan berbasis *tazkiyah* dilakukan dengan asumsi, ketika laporan keuangan dianggap sebagai bentuk teknologi dari sains akuntansi syari'ah, maka perumusan bentuk laporan keuangan harus didekati dengan kerangka konsep teknologi pula. Inti dari teknologi adalah teknosistem, dan inti teknosistem adalah *tazkiyah* (Mulawarman 2006a; 294-295). Berdasarkan pentingnya *tazkiyah* tersebut, perumusan teknologinya juga harus dilakukan dalam kerangka teknosistem yang berpusat pada *tazkiyah*²¹.

Tazkiyah seharusnya dapat dipakai melakukan rekonstruksi laporan keuangan lain yang dibutuhkan untuk pengembangan

²⁰ Penjelasan mengenai teknosistem lihat Bab 2

²¹ *Tazkiyah* secara harfiah adalah penyucian. Pembahasan mengenai *Tazkiyah* akan dilakukan lebih detail pada Bab 4. Penjelasan lebih detail juga dapat dibaca dalam Mulawarman (2006a) Bab 4, 6,7,8,9,10.

laporan keuangan syari'ah secara utuh. Pengembangan laporan keuangan syari'ah secara utuh dilakukan sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah.

1.3. RUMUSAN MASALAH

Kesimpulan mengenai perkembangan mutakhir gagasan-gagasan perumusan laporan keuangan akuntansi syari'ah ternyata hampir semua bentuk laporannya belum sesuai dengan konsep dasar *Shari'ate Enterprise Theory*. **Satu-satunya kemungkinan jalan keluar dari kebuntuan perumusan bentuk laporan keuangan sesuai dengan nilai dan tujuan syari'ah adalah dekonstruksi terhadap semua bentuk laporan keuangan akuntansi konvensional.** Perumusannya secara umum menggunakan metodologi dari Mulawarman (2006a) ketika membangun laporan nilai tambah syari'ah, yaitu Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi (HIT). Metodologi ini melakukan dekonstruksi (laporan keuangan konvensional), dilanjutkan rekonstruksi (laporan keuangan syariah), sekaligus proses melampaui (*hyper*) keduanya. Perlu ditegaskan di sini, metodologi HIT digunakan Mulawarman (2006a) untuk perumusan satu laporan keuangan (laporan nilai tambah syari'ah). Sedangkan penelitian di sini akan melakukan perumusan lebih dari satu laporan. Berdasarkan hal itulah dibutuhkan ekstensi metodologi HIT. Dengan adanya ekstensi metodologi penelitian ini akan dapat memberi konklusi yang lebih tepat.

Perumusan bentuk laporan keuangan syari'ah akan dilakukan dengan menggali nilai-nilai secara empiris-kontekstual dan teoritis-tekstual dalam realitas masyarakat muslim di Indonesia. Seperti telah dijelaskan panjang lebar di atas *Shari'ate Enterprise Theory* telah memberikan solusi perumusan Laporan Nilai Tambah yang disyari'atkan. Untuk neraca dan laporan arus kas akan

dilakukan proses rekonstruksi dengan cara penyucian (*tazkiyah*) sesuai *sbari'ate enterprise theory*. *Tazkiyah* dilakukan secara sinergis melalui pendekatan normatif maupun empiris. Khusus laporan nilai tambah syari'ah perlu dipertajam secara empiris. Apakah dengan *tazkiyah* akan memunculkan laporan keuangan berbeda dengan bentuk tiga laporan keuangan konvensional? Atau apakah bahkan memunculkan bentuk laporan-laporan yang benar-benar baru dan sesuai dengan nilai dan tujuan syari'ah itu sendiri?

Dari perumusan masalah di atas dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut. **Bagaimana bentuk laporan keuangan akuntansi syari'ah yang berbasis *tazkiyah*?**

1.4. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian secara umum adalah merumuskan bentuk Laporan Keuangan Syari'ah secara utuh. Secara khusus penelitian ini memiliki tiga tujuan, yaitu tujuan teoritis, kontekstual dan regulatif. Tujuan teoritis perumusan adalah untuk mengimplementasikan gagasan konseptual akuntansi syari'ah lebih konkret dalam kerangka teknologinya. Tujuan kontekstual perumusan adalah untuk memberi bukti empiris bahwa rancang bangun teknologi akuntansi syari'ah dapat dibangun dari basis di mana aktivitas ekonomi Islami oleh masyarakat muslim dijalankan secara riil di lapangan. Tujuan regulatif perumusan untuk memberi masukan lebih konkrit pengembangan standar akuntansi syari'ah, yang dibangun dari landasan normatif Islam dan realitas empiris di Indonesia.

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Dengan terumuskannya Laporan Keuangan Syari'ah diharapkan:

1. Akuntansi Syari'ah yang sampai saat ini masih berada pada tataran filosofis-teoritis dapat diimplementasikan di lapangan.
2. Dapat memberikan kontribusi praktis kepada akuntan untuk melakukan praktik akuntansi sesuai dengan nilai-nilai Islam (*Islamic values*) dan tujuan syari'ah (*maqasid ash syari'ab*).
3. Dapat memberikan bukti empiris bahwa masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Muslim, sebenarnya masih melakukan aktivitas akuntansi yang sesuai dengan nilai-nilai syari'ah, yang dapat dijadikan sebagai sumber pengembangan laporan keuangan syari'ah.
4. Dapat memberikan kontribusi konstruktif penyusunan standar akuntansi keuangan untuk perusahaan-perusahaan di luar perbankan syari'ah.

1.6. STRUKTUR ISI BUKU

Struktur isi buku terdiri dari tiga bagian utama yang terdistribusi menjadi 10 Bab. Bagian pertama (Bab satu sampai Bab empat) adalah penyusunan kerangka penelitian untuk mendesain laporan keuangan syari'ah. Kerangka penelitian terdiri dari perumusan masalah, pengembangan teori, serta penentuan metodologi untuk kontekstualisasi teori yang digunakan dalam penelitian. Bagian kedua (Bab lima dan Bab enam) merupakan proses turun lapangan untuk sinkronisasi teoritis pengembangan laporan keuangan syari'ah. Bagian ketiga (Bab tujuh sampai Bab sembilan) adalah proses penerjemahan sinkronisasi teoritis menjadi teknologi laporan keuangan syari'ah secara utuh. Bab sepuluh merupakan penutup. Berikut penjelasan umum masing-masing Bab.

Bab pertama (bab ini) menjelaskan latar belakang dan tujuan perlunya pengembangan laporan keuangan syari'ah sesuai konsep dasar teoritis akuntansi syari'ah aliran idealis, yaitu *sbari'ate*

enterprise theory. Bab pertama juga menjelaskan perkembangan desain laporan keuangan (baik konvensional maupun syari'ah oleh beberapa akademisi beserta asumsi-asumsi yang mendasarinya), dan kritik-kritik terhadap bentuk laporan keuangan baik konvensional maupun syari'ah.

Bab dua menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian. Metodologi dibangun dari ekstensi dan penyesuaian metodologi yang dikembangkan Mulawarman (2006a), yaitu Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi menjadi Ekstensi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi. Sedangkan turunan metodenya menggunakan ekstensi metode atas *Constructivist Structuralism* dari Pierre Bourdieu.

Bab tiga menjelaskan berbagai konsep dasar teoritis akuntansi konvensional, terutama *proprietary theory*, *entity theory* dan *enterprise theory*. Penjelasan tersebut diperlukan untuk melihat asumsi dasar dan *values* (nilai-nilai) di balik masing-masing konsep dasar teoritis beserta implikasinya terhadap bentuk laporan keuangan.

Bab empat menjelaskan posisi dan peran penting *shari'ate enterprise theory* sebagai konsep dasar teoritis akuntansi syari'ah idealis. Bab ini juga melakukan perumusan tujuan akuntansi syari'ah untuk penyesuaian *shari'ate enterprise theory*. Rumusan tujuan akuntansi syari'ah di sini berdasar nilai *Taubid* yang memiliki asumsi koeksistensi manusia sebagai *abd' Allah* sekaligus *khalifatullah fil ardh*.

Bab lima merupakan proses empiris penelitian berdasar desain penelitian. Proses empiris untuk menggali langsung aktivitas bisnis masyarakat Muslim, aplikasi akuntansinya, serta pemikiran maupun kreasi konkrit para penggiat bisnis Muslim mengenai bentuk laporan keuangan (yang menurut mereka) sesuai nilai-nilai Islam.

Bab enam menelusur kembali proses empiris-historis aktivitas bisnis Rasulullah, Muhammad saw. dan pengembangan model bisnis masa awal Islam. Model bisnis tersebut digunakan untuk “menarik benang hijau” bahwa model bisnis tersebut masih menjadi rujukan masyarakat Muslim di Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Bab ini juga melakukan sinkronisasi teoritis guna membangun konsep umum teknologi laporan keuangan syari’ah, yaitu Trilogi Laporan Keuangan Syari’ah. Konsep umum Trilogi Laporan Keuangan Syari’ah berimplikasi pada tujuan laporan keuangan syari’ah, pendekatan artikulasi, pengakuan, pengukuran dan prinsip berbasis Kas yang menjadi prinsip-prinsip akuntansi syari’ah.

Bab tujuh sampai sembilan menjelaskan secara khusus proses konstruksi masing-masing Trilogi Laporan Keuangan Syari’ah. Bab tujuh melakukan konstruksi Laporan Arus Kas Syari’ah. Bab delapan konstruksi Laporan Nilai Tambah Syari’ah. Sedangkan bab sembilan konstruksi Neraca Syari’ah.

Bab sepuluh adalah bab terakhir. Bab ini berisi ringkasan seluruh hasil penelitian, catatan akhir, beberapa usulan mengenai penelitian ke depan, serta pentingnya perubahan regulasi berkenaan standar akuntansi syari’ah. ■

BAB 2

MENGGALI TEKNOLOGI AKUNTANSI SYARI'AH MELALUI EKSTENSI HIPERSTURALISME ISLAM TERINTEGRASI

The Islamic vision of reality and truth, which is a metaphysical survey of the visible as well as the invisible worlds including the perspective of life as a whole, is not a worldview that is formed merely by the gathering together of various cultural objects, values and phenomena into artificial coherence.

(Prolegomena; Syed Muhammad Naquib Al-Attas)

2.1. PENDAHULUAN

Pengembangan ilmu dan teknologi merupakan salah satu bentuk konkrit manusia untuk memuaskan sifat ingin tahu dirinya dan harapan hidup lebih baik. Pengembangan ilmu berkenaan dengan pemuasan sifat ingin tahu manusia, sedangkan pengembangan teknologi berkenaan dengan implementasi ilmu untuk memberikan harapan hidup lebih baik dari sebelumnya. Rasa ingin tahu dan hidup lebih baik inilah yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Sensibilitas ingin tahu dan lebih baik ini pula yang kemudian merasuki ranah pemikiran dan membentuk apa yang dapat disebut sebagai progresifitas sifat dasar kemanusiaan (*nature of progressivity of human being*) dalam ranah ilmu dan teknologi.

Progresifitas dapat berbentuk meneruskan perkembangan ilmu dan teknologi yang telah ada. Progresifitas juga dapat berbentuk

menemukan ilmu dan berdampak pada bentuk teknologi yang baru. Progresifitas untuk meneruskan perkembangan ilmu dan teknologi biasanya berhubungan dengan pembuktian-pembuktian teoritis maupun empiris serta pengembangan teknologi dari hasil-hasil keilmuan yang lebih maju. Bentuk seperti ini mensyaratkan adanya kesamaan *values* (nilai-nilai) yang mendasari ilmu maupun teknologi, baik *values* dari ilmu itu sendiri, *values* yang melingkupi alam pikiran ilmuwan maupun lingkungan/masyarakatnya. Tidak salah bila Soedjatmoko (1986, 37) menekankan bawah aplikasi ilmu dan riset tidak dapat lepas dari *basic values system* masyarakatnya, bahkan untuk bekerja dengan hasil yang baik itupun harus dianggap dan diterima sebagai suatu *value* tersendiri. Progresifitas atau dikatakan Soedjatmoko sebagai "imajinasi kreatif" jelas merupakan hasil proses sosial, dan sebagai proses sosial ia berakar pada dasar kebudayaan sosial manusia (disebut Soedjatmoko sebagai bangsa).

Di titik imajinasi kreatif atau progresifitas inilah kemudian terjadi perbedaan antara menjalankan tradisi keilmuan dan teknologi atau melakukan perubahan, intervensi maupun revolusi gagasan dasar atas *values* keilmuan dan teknologi itu sendiri. Artinya mengembangkan tradisi keilmuan dan kreasi teknologi dapat dilakukan dengan cara melakukan penemuan baru maupun perekayasaan teknologi sesuai keilmuan yang baru tersebut. Pengembangan tradisi baru jelas sekali menggunakan dan menyesuaikan *values* di mana tradisi keilmuan dan teknologi tersebut dikembangkan.

Imajinasi kreatif atau progresifitas bagi dunia Barat dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan sosial masyarakatnya, perkembangan kebudayaannya. Berdasarkan hal tersebut kemudian berkembang di dunia Barat apa yang dinamakan Paradigma

Keilmuan atau *Worldview* Keilmuan²². Wilayah penelitian ilmu pengetahuan di tiap paradigma keilmuan dipandang sebagai wilayah yang diarahkan oleh seperangkat asumsi yang dominan dan bukan divergen (Chua, 1986), memuat sejumlah nilai tertentu, seperangkat asumsi filosofis tertentu dan sejumlah pandangan tertentu yang dominan dalam menangkap dan merefleksikan realitas dan kondisi sosial masyarakat di mana ilmu dan teknologi dikembangkan. Burrell dan Morgan (1979) melihatnya sebagai perbedaan pemahaman atas esensi pengetahuan sosial (*nature of social science*) dan esensi kemasyarakatan (*nature of society*). Esensi pengetahuan sosial yang dipisahkan dalam asumsi ontologi realitas sosial (*realism vs nominalism*), epistemologi (positivisme vs antipositivisme), *human nature* (determinisme vs voluntarisme) dan metodologi (nomotetik vs ideografik). Esensi kemasyarakatan yang berpusat pada oposisi antara *order-conflict* dan *regulation-radical change*. Dari dua pandangan utama itulah, Burrell dan Morgan (1979) kemudian menyusun empat paradigma utama yang berkembang dalam ilmu pengetahuan, yaitu fungsionalisme, interpretif, radikal humanis dan radikal struktural. Sedangkan dalam akuntansi misalnya membagi paradigma positif, interpretif dan kritis (Chua, 1986; untuk pembagian berbeda lihat Belkaoui 2000). Muhadjir (2000) melakukan pembagian yang berbeda, yaitu positivis, postpositivis (di dalamnya termasuk interpretif dan kritis) dan postmodernisme. Sedangkan turunan metodologinya, biasanya paradigma positivis biasanya

²² Paradigma dalam filsafat ilmu merupakan bagian yang penting, terutama dalam memberikan pemahaman tentang pengelompokan struktur dasar teori-teori. Paradigma dalam konsep filsafat ilmu dipakai untuk memisahkan karakter dari satu gagasan atau kelompok ilmu. Masing-masing paradigma berbeda dalam konsepnya. Biasanya masing-masing paradigma atau pandangan dunia dari suatu gagasan ilmu dibatasi oleh konsep ontologi, epistemologi dan aksiologinya (beberapa pemikir dengan tambahan *human nature, self*, retorika, metodologi, dan lain-lain).

menggunakan metodologi kuantitatif, sedangkan di luar itu biasanya menggunakan metodologi kualitatif atau lainnya.

Berbeda dengan pembagian paradigmatik Barat, dalam tradisi Islam kontemporer setidaknya terdapat beberapa definisi paradigma atau *worldview* yang menonjol. Zarkasyi (2005) mencatat setidaknya ada empat definisi paradigma atau *worldview* dalam khasanah Islam kontemporer, yaitu definisi dari Maulana Al-Maududi, Syaikh Atif al-Zain, Sayyid Qutb, dan Seyyed Naquib Al-Attas²³. Poin penting yang dapat ditangkap dari definisi keempat tokoh Muslim di atas adalah bahwa paradigma berkenaan dengan pandangan hidup Muslim tentang realitas dan kebenaran serta hakikat wujud yang berakumulasi dalam alam pikiran dan memancar dalam seluruh aktivitas kehidupan umat Islam.

Bila kita lihat penjelasan-penjelasan mengenai makna paradigma di atas, dapat kita lihat terdapat perbedaan pemahaman mengenai paradigma. Dalam tradisi Barat, paradigma lebih dilihat dalam konteks filsafat dan pandangan hidup yang memiliki tiga penekanan, yaitu motor bagi perubahan sosial, dasar bagi pemahaman realitas, dan dasar bagi aktivitas ilmiah. Namun dalam Islam makna paradigma menjangkau makna pandangan Islam terhadap hakikat dan kebenaran tentang alam semesta dan selalu

²³ Pertama, definisi dari Maulana Al-Maududi. Beliau mengistilahkan paradigma Islam sebagai Islami Nazariyat (*Islamic Vision*), yang berarti pandangan hidup yang dimulai dari konsep keesaan Tuhan (*shabadab*) yang berimplikasi keseluruhan kegiatan kehidupan manusia di dunia. Sebab *shabadab* adalah pernyataan moral yang mendorong manusia untuk melaksanakannya dalam kehidupannya secara menyeluruh. Kedua, definisi dari Syaikh Atif al-Zain. Paradigma dalam istilah Syaikh Atif al-Zain disebut al-Mabda' al-Islami (*Islamic Principle*) yang cenderung merupakan kesatuan iman dan akal dan karena itu ai mengartikan mabda' sebagai *aqidah fikriyyah* yaitu kepercayaan berdasarkan pada akal. Sebab baginya iman didahului dengan akal. Ketiga, paradigma menurut Sayyid Qutb. Menurutnya paradigma disebut sebagai *al-tasawwur al-Islami (Islamic Vision)*, yang berarti akumulasi keyakinan asasi yang terbentuk dalam pikiran dan hati setiap Muslim, yang memberi gambaran khusus tentang wujud dan apa-apa yang terdapat di balik itu. Keempat, definisi paradigma menurut Seyyed Naquib Al-Attas. Al-Attas mengartikan paradigma sebagai *Ru'yatul Islam lil Wujud (Islamic Worldview)*, yaitu pandangan Islam tentang realitas dan kebenaran yang nampak oleh mata hati kita dan yang menjelaskan tentang hakikat wujud.

berujung pada Kebenaran Mutlak (*Al-Haqq*) yaitu Allah. Ditegaskan Al-Attas (Zarkasyi 2005), ia tidak terbatas pandangan akal manusia terhadap dunia fisik atau keterlibatan manusia di dalamnya dari segi historis, sosial, politik dan kultural, tetapi mencakup aspek dunia dan hari akhir, dimana aspek dunia harus terikat dan mendalam dengan aspek akhirat, sedangkan aspek akhirat harus diletakkan sebagai aspek final. Mudahnya, paradigma dalam bahasa Al-Faruqi (1995) disebut dengan *Tawhid*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, penelitian ini dapat dikatakan berada dalam paradigma *Tawhid*. Secara khusus pengembangan metodologi penelitian di sini *Tawhid* dijadikan dasar untuk melakukan pengembangan dan membangun teknologi laporan keuangan syariah. Rekonstruksi laporan keuangan syariah adalah implementasi *Tawhid* yang secara metodologis melakukan *tazkiyah* (penyucian) laporan keuangan menggunakan ekstensi (perluasan) metodologi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi (HIT) dari Mulawarman (2006a). Metodologi HIT sebenarnya digunakan untuk pengembangan satu bentuk laporan keuangan saja. Tetapi dalam bab ini akan dikembangkan metodologi HIT untuk kepentingan beberapa bentuk laporan keuangan.

Pengembangan metodologi HIT melalui dua tahapan utama, yaitu, pengembangan metodologi penelitian dan penerapan metodologi dalam metode penelitian. Suriasumantri (1985, 328) menjelaskan bahwa metodologi penelitian adalah “pengetahuan tentang metode” yang dipergunakan dalam penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas pengembangan metodologi penelitian di Bab ini merupakan proses pendefinisian, penjelasan, dan pembuatan kerangka umum dari metode yang akan digunakan.

Salah satu hal yang harus ditentukan pada metodologi penelitian adalah metode dan tujuan dari penelitian (Suriasumantri

1985, 328). Setelah dilakukan pengembangan metodologi penelitian, maka tahapan kedua adalah menerjemahkan kerangka umum metode dalam prosedur penelitian secara eksplisit dan sistematis. Metode sendiri menurut Senn seperti diungkapkan kembali oleh Suriasumantri (1985, 119) merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dengan demikian yang dilakukan adalah penyusunan prosedur atas metodologi yang telah dikembangkan pada tahap pertama.

2.2. TAHAP PERTAMA: PENGEMBANGAN METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi HIT merupakan integrasi strukturalisme dan postrukturalisme sekaligus melampaui (*hyper*) keduanya²⁴. HIT melakukan proses penyucian (*tazkiyah*) laporan keuangan syaria'h dari nilai-nilai normatif dan empiris. Nilai-nilai normatif terdiri dari nilai-nilai normatif Islam maupun akuntansi konvensional setelah disesuaikan dengan nilai normatif Islam²⁵. Nilai-nilai empiris terdiri

²⁴ Hiperialitas postrukturalisme dan strukturalisme adalah bentuk pelampauan atas konsepsi ambigu dalam kedua pandangan dunia tersebut, dengan tidak menegasikan konsep yang memiliki aspek manfaat bagi kreativitas keilmuan dan riset akuntansi. Dengan cara meletakkan keduanya pada proporsinya dan melampauinya ketika telah sampai pada tingkatan filosofis-teoritis. Singkatnya, seluruh tahapan ontologi-epistemologi-*human nature* sampai metodologi, aspek Realitas Absolut (Allah) sebagai pintu utama masuknya teori dan pengetahuan (akuntansi) menjadi kaidah utama. Sedangkan prinsip-prinsip Poststrukturalisme dan Strukturalisme dalam kaidah tertentu dipakai sebagai *tools* semata, bukan sebagai pandangan dunia itu sendiri. Karena pandangan dunia (Islam) yang dipakai adalah yang melampaui keduanya.

²⁵ Penggalian nilai-nilai normatif Islam adalah penggalian ajaran-ajaran Islam berkaitan dengan hubungan sosial-ekonomi (muamalah), bersumber Al-Qur'an, Hadits, fiqh muamalah maupun ajaran-ajaran lainnya. Nilai-nilai normatif akuntansi konvensional seperti konsep dan teori dapat digunakan sepanjang konsep dan teori tersebut memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai normatif Islam; konsep dan teori tersebut harus (dan telah) dilakukan perbaikan dari sudut pandang Islam.

²⁶ Penggalian nilai-nilai empiris masyarakat Muslim adalah penggalian aktivitas sosial-ekonomi (muamalah) kontekstual masyarakat Muslim yang mengimplementasikan ajaran-ajaran normatif Islam. Nilai-nilai empiris aktivitas sosial-ekonomi dari masyarakat Non-Muslim dapat digunakan ketika nilai-nilai yang muncul di lapangan memang memiliki nilai-nilai aksiologis dalam konteks kebaikan dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai normatif Islam.

dari nilai-nilai kontekstual masyarakat Muslim yang memiliki kesesuaian dengan nilai normatif Islam²⁶.

Bentuk penyucian (*tazkiyah*) seperti ini dapat disebut sebagai Islamisasi atau Pengilmuan Islam²⁷ yang memenuhi tiga syarat utama, yaitu Koeksistensi, Penyucian dan Adaptasi Kontekstual²⁸. Pertama, Islamisasi yang bersifat koeksistensi²⁹ berusaha menemukan pasangan tersembunyi atau yang disembunyikan. Koeksistensi memungkinkan adanya bentuk laporan keuangan unik sesuai nilai-nilai lokal dan budaya setempat sekaligus memiliki nilai universalitas yang berakar pada nilai-nilai peradaban tertentu, Misalnya Peradaban Islam³⁰. Kedua, Islamisasi melalui proses penyucian³¹, tetap menyepakati adanya penghilangan atas nilai-nilai kontradiktif. Islamisasi melalui proses penyucian misalnya menyepakati dihilangkannya keserakahan yang merupakan antitesis dari kesederhanaan, dihilangkannya persaingan sebagai antitesis dari kerjasama, dihilangkannya penipuan sebagai antitesis kejujuran, dan lain-lain. Ketika nilai-nilai tersebut merupakan nilai-nilai keburukan, kejahatan, kesesatan, destruktif, bernilai negatif, dan tidak dapat

²⁷ Islamisasi Ilmu atau Pengilmuan Islam sebenarnya telah dilakukan sejak lama, bahkan sejak awal Islam mulai berkembang. Untuk melihat sejarah perkembangan ilmu-ilmu Islam dan proses Islamisasi ilmu-ilmu dan Pengilmuan Islam dapat dilihat misalnya tulisan-tulisan dari Esposito (2001; El Kalamawy dan Al Kakky 1986; Le Bon 1974; Hasjmy 1995; Hashim 2005; Madkoer 1986; Makdisi 2004; Mulawarman 2006d; Qadir 2002; Wan Daud 2003; dll)

²⁸ Hakekatnya pasti terdapat realitas yang tidak melulu koeksistensi, ada juga yang bernilai antitesis dan bahkan chaos. Hal itu terjadi sebagai Sunatullah yang tidak mungkin segala sesuatu selalu bersifat tunggal, tetapi pasti terjadi keragaman atas realitas. Sunatullah di alam semesta memang berbeda dengan realitas "Alam Tuhan" mengarah pada realitas Tunggal, yaitu Allah itu sendiri (bentuknya kitapun tidak mengetahuinya selain Tuhan itu sendiri). Sedangkan realitas alam semesta pasti beragam, bukan hanya bersifat tunggal, tetapi dapat berbentuk kembar, triple, bahkan banyak, sekaligus teratur dan tidak teratur (sebenarnya merupakan keteraturan mekanisme dalam "logika" Tuhan yang kita pahami, belum atau bahkan tak akan pernah kita pahami).

²⁹ Konsep ini digunakan Kuntowidjojo (2004) atau Faruqi (1995) dalam Islamisasi Ilmu Sosial; Triyuwono (2000a) dalam Islamisasi Ilmu Akuntansi.

³⁰ Hal ini akan berdampak pada pengembangan nilai koeksistensi dengan cara membangun akuntansi yang Indonesianis dan Islami, yang memiliki ciri lokalitas sekaligus universalitas serta membumi sekaligus melangit.

³¹ Konsep ini digunakan Mahzar (2004) dalam Islamisasi Teknologi; Al Attas (1981) dalam Islamisasi Bahasa; Mulawarman (2006a) dalam Islamisasi Laporan Nilai Tambah

disandingkan, maka yang diperlukan adalah penyucian atau bahkan reduksi³². Ketiga, Islamisasi Adaptasi Kontekstual³³, melakukan penyesuaian realitas pada kemungkinan nilai kebaikan sosiologis-historis “baru” yang tidak tercakup dalam realitas sosiologis-historis Islami “lama”. Islamisasi adaptasi kontekstual memungkinkan mengangkat nilai kebaikan baru yang berkembang di dalam realitas sosial karena memang secara substansial memiliki nilai-nilai syari’ah. Hal ini disebut Fazlur Rahman³⁴ dengan Neo-modernisme Islam (nilai Islam bernilai substansi dalam realitas kesejarahan dimana masyarakat Islam tumbuh)³⁵.

Proses pengembangan metodologi HIT dijalankan melalui empat proses; pertama, menetapkan elemen-elemen strukturalisme³⁶; kedua, menetapkan elemen-elemen postrukturalisme³⁷; ketiga, integrasi strukturalisme dan postrukturalisme yang disebut hiperstrukturalisme; keempat, melakukan ekstensi hiperstrukturalisme. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing tahapan pengembangan metodologi HIT.

³² Misal *riba-bai'*, halal-haram, penumpukan keuntungan dan pemerataan distribusi, dan lain-lain.

³³ Konsep ini digunakan oleh Fazlur Rahman (1965) dalam *Islamic Methodology in History*.

³⁴ Untuk jelasnya lihat karya dari Fazlur Rahman seperti *Islamic Methodology in History* (1965); *Islam Modern: Tantangan Pembaruan dalam Islam* (1987); *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual* (2000); *Islam* (2003).

³⁵ Meskipun menurut Fazlur Rahman konsep Neo-Modernisme Islam bukanlah bentuk Islamisasi Ilmu, tetapi proses adaptasi substansial nilai-nilai Islam pada realitas sosiologis-historis masa kini, yang disebut Ijtihad Modern. Tetapi sebenarnya yang dilakukan Fazlur Rahman adalah bentuk Islamisasi yang lebih Sosiologis-Historis saja.

³⁶ Strukturalisme menurut Ritzer (2003, 51-54) merupakan usaha menemukan struktur umum yang terdapat dalam aktivitas manusia. Dari sudut pandang ini, suatu struktur dapat didefinisikan sebagai “sebuah unit yang tersusun dari beberapa elemen dan selalu ditemukan pada hubungan yang sama dalam suatu ‘aktivitas’ yang tergambar. Unit tidak bisa dipecah dalam elemen-elemen tunggal, bagi kesatuan struktur tidak terlalu dipahami oleh sifat elemen yang substantif sebagaimana ia tidak terlalu dipahami oleh hubungannya” (Spivak 1974; dalam Ritzer 2003, 51).

³⁷ Postrukturalisme dapat dikatakan merupakan antitesis dari strukturalisme, dengan tokohnya, Jacques Derrida. Ide-ide dasar Derrida mengenai postrukturalisme, mulai dari *writing* (tulisan), *trace* (jejak), *differance* (perbedaan) *arche-writing* (pergerakan *differance*). Derrida menjelaskan bahwa selalu ada suatu realitas yang bersembunyi di belakang tanda; selalu ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang hadir. Ia adalah realitas dan hubungan dalam realitas, dan dua hal itulah yang merupakan titik sentral kajian Derrida (Ritzer 2003, 204).

2.2.1. Proses Pertama: Menetapkan Elemen-elemen Strukturalisme

Strukturalisme menurut Kuntowijoyo (2004, 35) mengarahkan perhatiannya pada keseluruhan, pada totalitas. Totalitas dan saling hubung strukturalisme tersebut dibangun dari empat ciri utama.

Ciri pertama, unsur hanya bisa dimengerti melalui keterkaitan antar unsur. Asumsinya adalah bahwa memahami laporan keuangan tidak dapat dilihat dari satu unsur tertentu tetapi keseluruhan unsur serta keterkaitan antar seluruh unsur. Secara umum bentuk laporan keuangan syari'ah merupakan susunan dari berbagai unsur yang saling terikat satu sama lain. Memahami laporan keuangan tidak hanya dilihat dari penggalan-penggalan kepentingan individu (akuntan) Muslim melakukan pencatatan setiap transaksi. Transaksi atas keuntungan atau nilai tambah yang didapat perusahaan pasti berhubungan dengan aliran kas masuk dan keluar. Demikian pula nilai tambah dan aliran kas pasti berhubungan dengan pembentukan kekayaan perusahaan. Artinya setiap unsur laporan keuangan pasti memiliki keterikatan antar unsurnya.

Ciri kedua, strukturalisme tidak mencari struktur di permukaan, pada tingkat pengamatan, tetapi di bawah atau di balik realitas empiris. Apa yang ada di permukaan adalah cerminan struktur yang ada di bawah (*deep structure*), lebih ke bawah lagi ada kekuatan pembentuk struktur (*innate structuring capacity*). Asumsinya makna setiap simbol dari unsur dan seluruh struktur yang terbentuk dalam laporan keuangan pasti memiliki makna khas. Penamaan akun seperti zakat, nilai tambah, kas, aset, kewajiban dan lainnya pasti memiliki makna unik dan khas, makna syari'ah, sesuai makna Islam itu sendiri.

Ciri ketiga, berkaitan realitas empiris. Realitas empiris selalu memiliki keterkaitan antar unsur bersifat berpasangan dan oposisi biner (*binary opposition*)³⁸. Asumsi strukturalisme laporan keuangan mengenai unsur dan utuhan laporan keuangan syaria'ah pasti mencerminkan ketidaksepadanan dan sekaligus realitas padanan sinergisnya. Artinya, setiap elemen atau akun dan bentukannya yaitu laporan keuangan, bukan merupakan unsur terpisah dan tidak memiliki makna empiris. Setiap elemen atau akun dan bentukannya pasti memiliki makna empiris sekaligus memiliki mekanisme oposisi binernya.

Sedangkan ciri keempat, strukturalisme memperhatikan unsur-unsur yang sinkronis, bukan yang diakronis, yaitu unsur-unsur dalam satu waktu yang sama, bukan perkembangan antar waktu atau historis. Pencarian makna unsur dan keterkaitannya sampai membentuk laporan keuangan secara utuh dapat dilihat dari berbagai aktivitas bisnis individu dan atau masyarakat muslim di mana berada. Menurut Marzali (2005, 40-41) salah satu bentuk studi komparasi antropologi dapat dilakukan dengan cara sinkronis. Pencarian makna sinkronis disini memberikan asumsi perlunya komparasi antropologis aktivitas bisnis berbagai trah atau tradisi bisnis individu dan atau masyarakat masa kini. Penelitian ini melakukan komparasi tiga tradisi, yaitu trah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Sarekat Islam.

³⁸ Bagi Strauss, oposisi biner adalah '*the essence of sense making*': struktur yang mengatur sistem pemaknaan kita terhadap budaya dan dunia tempat kita hidup. Oposisi biner adalah sebuah sistem yang membagi dunia dalam dua kategori yang berhubungan. Dalam struktur oposisi biner yang sempurna, segala sesuatu dimasukkan dalam kategori A maupun kategori B, dan dengan memakai pengkategorian itulah, kita mengatur pemahaman dunia di luar kita. Suatu kategori A tidak dapat eksis dengan sendirinya tanpa berhubungan secara struktural dengan kategori B. Kategori A masuk akal hanya karena ia bukan kategori B. Tanpa kategori B, tidak akan ada ikatan dengan kategori A, dan tidak ada kategori A. Dalam sistem biner, hanya ada dua tanda atau kata yang hanya punya arti jika masing-masing beroposisi dengan yang lain. Keberadaan mereka ditentukan oleh ketidakberadaan yang lain.

2.2.2. Proses Kedua: Menetapkan Elemen-elemen Postrukturalisme

Postrukturalisme melihat bahwa selalu ada suatu realitas yang bersembunyi di belakang tanda, selalu ada sesuatu yang tersembunyi di balik apa yang hadir, mulai dari tulisan, jejak, *differance* (perbedaan sekaligus menunda) *arche-writing* (pergerakan *differance*) (Ritzer 2003, 204). Asumsinya adalah pemaknaan unsur, keterkaitan antar unsur, serta pembentukan laporan keuangan tidak hanya dapat dilihat dalam konteks strukturalisme seperti dijelaskan pada proses pertama. Proses sebelum dilakukan penetapan akun, pencatatan transaksi sampai terbentuknya akun dan laporan keuangan, pasti terdapat jejak maupun perbedaan signifikan antara tradisi Islam kontekstual dengan tradisi akuntansi konvensional (modern). Perbedaan tersebut menyebabkan perlunya penundaan pembuatan bentuk laporan keuangan dan keinginan membentuk laporan keuangan sesuai jiwa, tradisi, budaya dan nilai masyarakat Muslim. Berdasarkan hal tersebut dimungkinkan terjadinya perbedaan pencatatan transaksi sampai pembentukan laporannya.

Berbeda dengan strukturalisme mengenai studi komparatif antropologis sinkronis, postrukturalisme dimungkinkan melakukan studi komparasi antropologis interaktif diakronis-sinkronis (Saifuddin 2005, 25-28). Menurut Marzali (2005, 40-41) proses studi komparasi antropologis diakronis adalah melakukan perbandingan tradisi, budaya dan nilai masa kini dengan masa lalu. Artinya, dimungkinkan melakukan *matching* realitas bisnis Rasulullah (representasi masa lalu) dengan realitas bisnis Muslim trah SI, Muhammadiyah dan NU (representasi masa kini). Berkenaan studi antropologis interaktif, menurut Saifuddin (2005, 25-26), prosesnya dengan melakukan titik temu antara proses antropologis (ethnografik) sinkronis dan diakronis untuk menemukan sinkronisasi

temuan lapangan. Proses sinkronisasi disebut Marzali (2005, 41) sebagai ethnologis teoritis. Dengan demikian dimungkinkan melakukan proses sinergi atas realitas masa lalu (budaya dan sejarah Rasulullah) yang jejaknya masih ada dalam realitas masa kini (budaya dan tradisi masyarakat Muslim Indonesia). Sinergi di sini melakukan pemaknaan simbol-simbol yang substansial, mirip, sama, sebangun dan sekaligus unik untuk dapat dijadikan bahan pembentukan akun-akun, elemen, dan laporan keuangan.

2.2.3. Proses Ketiga: Hiperstrukturalisme Islam Terintegasi

Proses ketiga dilakukan dengan cara integrasi nilai-nilai strukturalisme dan poststrukturalisme sekaligus melampaui keduanya (*Hyper*). Proses *hyper* menuju pusat teknologi, yaitu tekno-sistem adalah untuk penyucian (*tazkiyah*) sesuai Ruh Islam. Proses "*hyper*" dilakukan untuk meletakkan kerangka filosofis teoritis akuntansi syari'ah sebagai pusat perekayasaan dengan penambahan aspek teknologi (laporan keuangan syari'ah) dalam Teknosistem.

Penyatuan tekno-sistem tidak seperti melakukan penyatuan setiap unsur, elemen, akun atau laporan keuangan yang muncul secara mekanis. Penyatuan menggunakan proses *tazkiyah*, dilakukan secara terstruktur, sistemik, dan berlangsung dalam bingkai *Taubid*. Bingkai *Taubid* mensyaratkan perekayasaan harus selalu melalui bingkai nilai-nilai syari'ah, akhlak dan nilai-nilai spiritualitas. *Taubid* sebagai puncak perekayasaan akuntansi syari'ah harus selalu sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ab*).

Penyucian atau *tazkiyah* di sini memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh Mulawarman (2006a). Mulawarman (2006a) menggunakan HIT untuk melakukan perumusan *Shari'ate Value Added Statement*. Penelitian ini melakukan perumusan lebih dari

satu bentuk laporan keuangan dan integrasi laporan-laporan menjadi kesatuan. Perumusan pada penelitian ini jelas lebih luas sehingga perlu dilakukan perluasan (ekstensi) metodologi HIT.

2.2.4. Proses keempat: Ekstensi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi

Proses keempat adalah implementasi *shari'ate enterprise theory* (SET) dalam kerangka teknologi. Implementasi teknologis pada konsep dasar teoritis dijalankan melalui persyaratan-persyaratan teknologis atau *technological*³⁹ agar dapat diimplementasikan menjadi bentuk laporan keuangan. Sebagaimana diketahui SET melakukan rekonstruksi tujuan dasar laporan keuangan. **Pertama**, berkenaan dengan akuntabilitas. Akuntansi syari'ah memiliki instrumen akuntabilitas vertikal (digunakan oleh manajemen untuk akuntabilitas kepada kepada Tuhan), dan akuntabilitas vertikal (*stakeholders* dan alam). **Kedua**, berkenaan dengan informasi. Pemberian informasi dalam akuntansi syari'ah merupakan konsekuensi logis dari adanya akuntabilitas yang bernilai materi (dalam bentuk akuntansi dan informasi akuntansi) (Triyuwono 2006, 341). Informasi yang disajikan harus memenuhi akuntabilitas pada pihak pertama, *direct stakeholders*, yaitu pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan dan lainnya (Triyuwono, 2006). **Kedua**, *indirect stakeholders*, yaitu masyarakat secara umum (khususnya *mustahiq*) dan lingkungan alam (dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam) (Triyuwono, 2006). Konsekuensi lain dari tujuan laporan keuangan adalah bahwa tujuan laporan keuangan memiliki karakter laporan keuangan yang

³⁹ Istilah *technological* biasa digunakan dalam Jurnal-jurnal teknologi seperti *Techne*, jurnal dengan tema-tema filsafat dan konsep teknologi. Misal: 1. Gorokhov, Vitali. 1998. *A New Interpretation of Technological Progress*, 2. Quintanilla, Miguel A. 1998. *Technical systems and technical progress: a conceptual framework*

bersifat Egoistis-Altruistis, Materialistis-Spiritualistis, dan Kuantitatif-Kualitatif (Triyuwono 2004)⁴⁰.

Bila dipahami lebih jauh, makna akuntabilitas di atas merupakan representasi dari akuntabilitas manusia sebagai *Khalifatullah fil ardh* (Triyuwono 2006; 2007). Sesuai kerangka epistemologi berbasis *Tauhid*, akuntabilitas manusia di samping sebagai *Khalifatullah fil ardh* juga secara langsung dan koeksistensif sebagai *abd 'Allah* (Mulawarman 2006a)⁴¹. Perluasan akuntabilitas *Khalifatullah fil ardh* dan *Abd' Allah* dalam implementasinya telah dapat memecahkan masalah pembentukan salah satu dari laporan keuangan syari'ah, yaitu *Shari'ate Value Added Statement*.

Ketika aspek filosofis-teoritis berkaitan dengan bentuk organisasi dan nilai-nilai yang terkandung dalam akuntansi syari'ah misalnya telah terbentuk, maka yang diperlukan adalah *extended* metodologi dalam menterjemahkan aspek pelaporan akuntansi syari'ah, yang mengarah pada aspek teknologinya. Konsep Strukturalisme dari Mahzar (2004) yaitu integralisasi ilmu pengetahuan Islam berbasis Sains-Teknologi dapat dijadikan sebagai *tools* dalam penyusunan bentuk laporan keuangan yang disyari'atkan⁴².

Konsep teknologi di sini memiliki beberapa subsistem (penjenjangan) sebagai utuhan atau sifat-sifat dari teknosistem. Utuhan atau sifat dari teknosistem tersebut harus muncul pada setiap laporan keuangan syari'ah. Teknosistem menurut Mahzar (2004, 163) meliputi subsistem-subsistem yang bersifat struktural⁴³, dinamis⁴⁴,

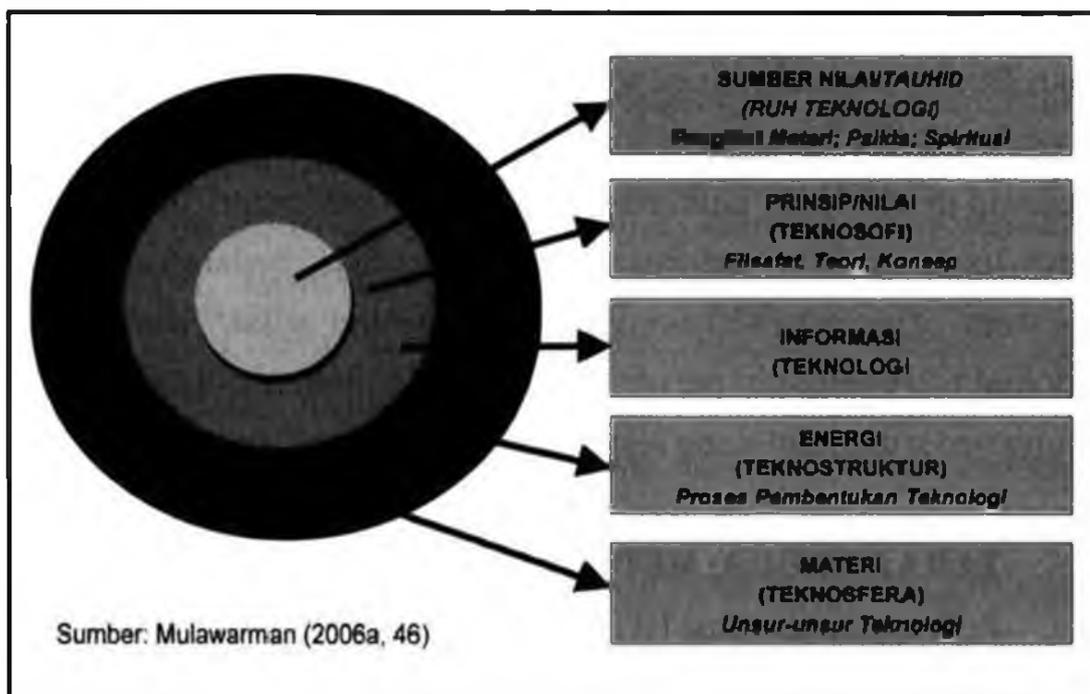
⁴⁰ Penjelasan lebih lengkap filosofis-teoritis akuntansi syari'ah sampai tujuan dan karakter laporan keuangan dapat dilihat dalam buku dari Triyuwono (2006) yang berjudul "Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syari'ah"

⁴¹ Akuntabilitas *abd' Allah* adalah pertanggungjawaban dari sisi ketundukan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi. Sehingga sebenarnya akuntabilitas pasti bersifat koeksistensi antara kreativitas di satu sisi dan ketundukan di sisi lain.

⁴² Strukturalisme versi Mahzar (2004) dijadikan sebagai *tools* teknologi untuk menyusun bentuk laporan keuangan yang disyari'atkan berdasarkan konsep filosofis teoritis akuntansi syari'ah dan karakter laporan keuangan akuntansi syari'ah.

fungsional⁴⁵ dan normatif⁴⁶. Keempat subsistem dapat dikatakan sebagai lapisan-lapisan eksistensial realitas teknologi dan bersumber dari realitas esensial yaitu Ruh Teknologi⁴⁷. Ruh teknologi tersebut adalah nilai *Taubid* yang merupakan manifestasi instrumentalitas. Berdasarkan konsep teknosistem tersebut Mulawarman (2006a) merangkai penjenjangan subsistem teknologi sebagai berikut:

Gambar 1. Penjenjangan Subsistem dari Teknosistem



⁴³ Subsistem dasar teknosistem adalah teknosfera yang struktural, yaitu unsur-unsur teknologi material.

⁴⁴ Subsistem kedua, teknostruktur yang bersifat dinamikal/sosial energetik, yaitu subsistem transistemik dari unsur-unsur, proses yang melibatkan dan menghasilkan materi.

⁴⁵ Subsistem ketiga, teknologi informatik yaitu program dan data yang mengarahkan eksistensi proses energetik, bentuk dari hasil subsistem pertama dan kedua yang mewujudkan dalam bentuk informasi.

⁴⁶ Subsistem keempat, teknosofi yang bersifat fundamental dan normatif, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasari keberadaan informasi, yang memiliki tiga nilai utama yaitu konsistensi (asas kebenaran), simetri (asas keindahan) dan optimasi (asas kebaikan) (Mahzar 1983, 103-106).

⁴⁷ Ruh Teknologi adalah subsistem puncak yang merupakan Sumber Nilai, yaitu sumber nilai-nilai teknosofi yang dirumuskan dalam teknologi, dilaksanakan oleh teknostruktur sosial dan berujung pada peralatan teknosfer yang material (Mahzar 2004, 163).

Aspek teknologi yang digunakan Mulawarman (2006a) untuk melakukan rekonstruksi hanya salah satu dari laporan keuangan syariah, yaitu laporan nilai tambah syariah. Penelitian ini melakukan rekonstruksi teknologi lebih utuh, yaitu laporan keuangan syariah yang terdiri dari laporan nilai tambah syariah, pengganti neraca, dan pengganti laporan arus kas, dan atau bentuk lain. Artinya di sini diperlukan lebih dari satu tekno sistem dengan satu bentuk kerangka filosofis teoritis akuntansi syariah. Untuk keperluan integrasi beberapa tekno sistem diperlukan alat rekayasa tambahan dari konsep teknologi, sehingga tiga bagian tekno sistem menjadi utuh sebagai bagian dari sistem itu sendiri. Pengembangan yang dimaksud di sini lebih pada perluasan subsistem materi/tekno sfera, energi/tekno struktur, informatif/teknologi saja. Sedangkan pada subsistem prinsip/nilai/tekno sofi dan sumber nilai/*Taubid*/ruh teknologi tidak terdapat perubahan. Dua subsistem tersebut menjadi payung tiga subsistem yang sesuai dengan karakter masing-masing.

2.3. TAHAP KEDUA: METODE PENELITIAN

Penerapan ekstensi HIT berbentuk metode penelitian dapat merujuk kepada khasanah teori strukturalisme generatif (Harker *et.al.* 2005) atau *constructivist structuralism* (Wainwright 2000) dari sosiolog, antropolog, filosof dan sekaligus peneliti Perancis, Pierre Bourdieu. Bourdieu berusaha memberi jawaban atas masalah paradigmatik teori-teori sosiologi yang belum terselesaikan, seperti dualisme realitas antara positivisme dan rasionalisme; dualisme riset sosial antara strukturalisme obyektif (dari Levi Strauss) dengan eksistensialisme subyektif (dari Sartre), maupun fenomenologi (dari Husserl); serta perseteruan antara Kapitalisme dan Marxisme. Penyatuan yang dilakukan Bourdieu merupakan kontribusi ilmu

sosial untuk membangun teori umum mengenai praktik (*general theory of practice*).

2.3.1. Konsep Pierre Bourdieu: *Constructivist Structuralism*

Berlawanan dengan positivis, Bourdieu menyetujui bahwa penjelasan dan analisis ilmiah juga dapat dilakukan dalam entitas yang tidak dapat diobservasi (*unobserved entities*). Di sisi lain berlawanan dengan non-positivis, Bourdieu menyetujui bahwa *unobserved entities*, *intransitive relations*, serta obyek bukannya sesuatu yang tak diketahui (*unknowable*), tetapi *unobserved entities* bergantung pada hasil dan pengujian hipotesis, karena *unobserved entities* selalu memiliki kemungkinan kesalahan (Fowler 1997 dalam Wainwright 2000)⁴⁸.

Salah satu kontribusi besar Bourdieu adalah upaya mengkonstruksi sebuah metode yang memperhitungkan struktur maupun agensi, yang disebut *habitus*. *Habitus* merupakan proses penghubung agensi (*practice*) dengan struktur (melalui *capital* dan *field*). Pendekatan ini dirumuskan oleh Bourdieu (1989, 101) sebagai berikut:

$$[(\textit{Habitus}) (\textit{Capital})] + \textit{Field} = \textit{Practice}$$

Berikut akan dijelaskan masing-masing komponen (*habitus*, *capital*, *field*, dan *practice*) pembentuk rumusan metode Bourdieu tersebut.

⁴⁸ Dualitas pandangan Bourdieu digunakan sebagai basis dasar riset-riset sosialnya. Riset sosial Bourdieu berhasil melakukan terobosan baru, yaitu transendensi dualisme agensi-struktur, antinomi obyektif-subyektif, dan distingsi ideografi-nometetik. Transendensi dualisme agensi-struktur dalam bentuk dialektis dijelaskan oleh Mahar et al. (2005) sebagai hasil pertemuan antara oposisi perspektif obyektivisme dan subyektivisme. Perbedaan agensi-struktur berpusat pada peran berbagai pengaruh institusional dan struktural dalam membentuk masyarakat dan seberapa besar peran tindakan individu (dan kelompok) dalam proses yang sama.

2.3.1.1. *Habitus* (Perilaku)

Habitus didefinisikan sebagai suatu sistem atau aturan (disposisi) yang berlangsung lama dan berubah-ubah (*durable, transposable disposition*), berfungsi sebagai basis generatif bagi praktik-praktik yang terstruktur dan terpadu secara obyektif. Takwin (2005, xviii) menjelaskan bahwa:

Habitus adalah struktur kognitif yang memperantarai individu dan realitas sosial. Individu menggunakan *habitus* dalam berurusan dengan realitas sosial. *Habitus* merupakan struktur subyektif yang terbentuk dari pengalaman pribadi dan pribadi lainnya dalam jaringan struktur obyektif yang ada dalam ruang sosial.

Habitus diindikasikan oleh skema-skema yang merupakan perwakilan konseptual dari benda-benda dalam realitas sosial. Dalam perjalanan hidupnya manusia memiliki sekumpulan skema yang terinternalisasi dan melalui skema-skema itu mereka mempersepsi, memahami, menghargai serta mengevaluasi realitas sosial. Berbagai macam skema tercakup dalam *habitus*, seperti konsep ruang-waktu, baik-buruk, benar-salah, untung-rugi, aliran masuk - aliran keluar, jual-beli, pendapatan-biaya, subyek-obyek, tunai-kredit, kiri-kanan, ada-kosong, hitam-putih, berputar-lurus, dan lain-lain.

Habitus dapat dikatakan sebagai ketidaksadaran kultural (Takwin 2005, xviii) atau "*blinking perception of reality*" (Fowler 1997 dalam Wainwright 2000, 10). Artinya, lanjut Takwin (2005, xviii-xix), *habitus* bukanlah bentuk pengetahuan bawaan, bukan kategori seperti dalam pengertian Kant, bukan pula ide-ide bawaan dari dunia ide seperti yang dimaksud Plato dan Kaum Rasionalis. *Habitus* bukan kodrat, bukan bawaan ilmiah biologis maupun psikologis. *Habitus* merupakan hasil pembelajaran lewat pengalaman, aktivitas bermain dan pendidikan masyarakat dalam arti luas. Pembelajaran terjadi

secara halus, tidak disadari dan tampil sebagai hal wajar, sehingga seolah-olah sesuatu yang alamiah, seakan-akan terberi oleh alam⁴⁹.

2.3.1.2. *Capital (Modal)*

Faktor-faktor apa yang kemudian memperbaiki, memperbaharui dan mungkin mentransformasi *habitus* seseorang? Di sini Bourdieu (1983) menggambarkan bentuk modal (*capital*) yang melampaui konsepsi aliran Marxis berkaitan dengan modal ekonomi (*economic capital*). Bourdieu menambahkan modal simbolik (*symbolic capital*) seperti prestise, pengakuan modal ekonomi itu sendiri dan modal kultural (*cultural capital*)⁵⁰. Dijelaskan Mahar *et al.* (2005) bahwa konsepsi modal Bourdieu, meskipun dikembangkan dalam berbagai bentuknya seperti disebutkan di atas, sebenarnya tidak pernah keluar dari domain utama modal yang digagas oleh Marx, yaitu sangat berkaitan dengan konsep ekonomi. Bourdieu (1983) sendiri menjelaskan bahwa teori ekonomi yang menekankan pendefinisian ekonomi dalam praktiknya dimana secara historis merupakan gagasan kapitalisme. Kapitalisme adalah reduksi universalitas pertukaran menjadi pertukaran perdagangan (*mercantile exchange*), yang secara obyektif dan subyektif berorientasi pada maksimasi profit, seperti kepentingan ekonomi pribadi (*economically self interest*).

⁴⁹ Dari konsep *habitus* inilah Bourdieu berhasil memadukan pertimbangan obyektif dalam struktur sekaligus mempertimbangkan kemungkinan adanya subyektifitas dalam agen. Artinya secara teoritis, penerapan metodologi tentang praktik di lapangan sebenarnya tidak hanya dilihat dari struktur yang bersifat obyektif saja, suatu mekanisme yang dapat diukur dan diakui secara kuantitatif. Dalam praktik sebenarnya juga terdapat realitas subyektif yang dipengaruhi oleh karakter individual. Titik temu keduanya ada pada *habitus* itu sendiri, sehingga metodologi yang diinginkan Bourdieu adalah melakukan titik temu strukturalisme (realitas obyektif) sekaligus fenomenologi (kekuatan subyektif dalam pembentukan realitas).

⁵⁰ Modal kultural berdasarkan pada legitimasi pengetahuan, modal sosial berhubungan dengan sang lain yang signifikan (*significant others*), dan modal fisik yang biasanya sebagai sub dari modal pengetahuan. Ditambahkan oleh Williams (1998) dalam Wainwright (2000) tentang dimungkinkan adanya modal emosional (*emotional capital*) yang berkembang pada riset di sosiologi medis.

Bentuk kapitalisme seperti itu menurut Bourdieu bila merujuk kembali pada koeksistensi *habitus*, berdampak secara implisit pada definisi bentuk lain dari pertukaran non-ekonomi (*exchange of noneconomic*)⁵¹, yang beorientasi pada hilangnya kepentingan (*disinterested*)⁵². Gambaran mudahnya Bourdieu (1983, 1) memberi contoh berikut ini:

The class of practices whose explicit purpose is to maximize monetary profit cannot be defined as such without producing the purposeless finality cultural or artistic practices and their products; the world of bourgeois man, with his double-entry accounting, cannot be invented without producing the pure, perfect universe of the artist and the intellectual and the gratuitous activities of art- for-art's sake and pure theory.⁵³

Bourdieu juga telah berhasil melakukan pendekatan obyektifikasi modal sekaligus subyektifikasi. Artinya modal yang dapat mempengaruhi keberadaan *habitus* seseorang bukan hanya bentukan modal ekonomis saja, tetapi terdapat modal sosial, budaya bahkan simbol yang berperan mempengaruhi *habitus* seseorang. Meskipun disadari Bourdieu dan Wacquant (1992, 101) bahwa beragam modal tersebut tidak akan pernah eksis dan berfungsi kecuali berhubungan dengan *field*.

⁵¹ Pertukaran non-ekonomi didefinisikan sebagai hilangnya kepentingan bentuk pertukaran yang menekankan transubstansi (*transubstantiation*) di mana tipe-tipe modal yang material (yang secara ekonomis memiliki keterbatasan) dapat dipresentasikan oleh dirinya sendiri dalam bentuk immaterial dari modal kultural atau modal sosial dan lainnya.

⁵² Kepentingan, dalam batasannya tersebut telah ada dengan sendirinya (*given*) dalam teori ekonomi, tidak dapat diproduksi tanpa memproduksi lawan negatifnya, tanpa kepentingan (*disinterestedness*).

⁵³ Kelas-kelas praktis yang secara eksplisit bertujuan untuk maksimasi keuntungan moneter tidak dapat terdefinisikan ketika mereka tidak melakukan produksi kebudayaan dan artistik final tanpa tujuan atas produk-produk yang dibuatnya. Di kalangan borjuis, dengan produk akuntansi berpasangannya misalnya, tidak dapat melakukan proses akuntansinya tanpa memproduksi secara tegas, ruang yang utuh bagi pelaku (*artist*) dan intelektual serta aktivitasnya yang sesuai dengan praktik (*arts*) dan teorinya.

2.3.1.3. *Field* (Lapangan)

Field secara esensial menurut Bourdieu dan Wacquant (1992, 94-95) merupakan sistem yang terstruktur dan otonom dari posisi sosial. *Field* berhubungan dengan “*field* kekuatan” di mana di dalamnya berlangsung perjuangan posisi-posisi. Perjuangan ini untuk melakukan transformasi dan mempertahankan *field* kekuatan. Ketika posisi dicapai, mereka dapat berinteraksi dengan *habitus* untuk menghasilkan bukan ikatan intersubyektif antar individu, namun semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur posisi individual dan kelompok dalam tatanan masyarakat yang terbentuk secara spontan. *Habitus* memungkinkan manusia hidup dalam keseharian secara spontan dan melakukan hubungan dengan pihak-pihak di luar dirinya. Dalam proses interaksi dengan pihak luar itu, terbentuklah *field*, jaringan relasi posisi-posisi obyektif. *Field* merupakan metafora yang digunakan Bourdieu untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terstruktur dan dinamis dengan daya-daya yang dikandungnya.

2.3.1.4. *Practice* (Praktik)

Field lanjut Bourdieu dan Wacquant (1992, 96) mengisi praktik (*practice*). Istilah praktik mengacu pada keseluruhan konsepsi tentang dunia sosial. Konsep ini menganalogikan realitas sosial sebagai sebuah ruang dan pemahamannya menggunakan pendekatan topologi. Dalam hal ini praktik dapat dikonsepsi sebagai terdiri dari beragam *field* yang memiliki sejumlah hubungan terhadap satu sama lainnya, serta sejumlah titik kontak. Ruang sosial individu dikaitkan melalui waktu (trajektori kehidupan) dengan serangkaian *field* tempat orang berebut berbagai bentuk modal.

Dalam ruang sosial individu melakukan praktik dengan *habitus*-nya berhubungan dengan individu lain dan berbagai realitas sosial yang menghasilkan tindakan sesuai *field* dan modal yang dimilikinya.

2.3.1.5. Doxa dan Symbolic Violence dalam Practice

Kesimpulannya, sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu (1977, 159-170), bahwa keterhubungan *habitus* dan modal yang berinteraksi saling timbal balik dalam *field* telah menemukan praktik yang berada pada disposisi yang memiliki kekuatan sosialnya sendiri. Sebuah *field* akuntansi misalnya merupakan hasil keterhubungan yang kompleks dari realitas obyektif peran sosial yang terstruktur yang sekaligus subyektifitas *habitus* yang dominan. Kemudian membentuk *field* akuntansi yang mapan dan menguasai ruang sosial secara keras (kekuasaan politik) lewat hubungan sosial yang terjadi dengan sendirinya yang disebut *doxa*⁵⁴ yang tak terhindarkan oleh setiap individu yang terjebak dalam ruang sosial tersebut. Dan sekaligus *doxa* menggiring terjadinya *symbolic violence*⁵⁵ sang penguasa untuk mengintervensi kekuasaannya (lewat pendidikan dalam arti luas) dalam ruang sosial dalam rangka mempertahankan sistem budaya yang mapan. Kemungkinan terjadinya perubahan memang dapat dilakukan, seperti dijelaskan Bourdieu bahwa ternyata *habitus* seseorang tidaklah bersifat tetap dalam pilihannya atas realitas yang mapan.

⁵⁴ Doxa adalah sejenis tatanan sosial dalam diri individu yang tanpa disadari telah mengkerangkakan dirinya (*habitus*) dalam realitas sosial (*field*) yang menjadi tradisi atau budaya.

⁵⁵ *Symbolic violence* adalah kekerasan dalam bentuk yang sangat halus (intervensi penguasa dalam pikiran lewat mekanisme tersembunyi dari kesadaran) dalam bentuk simbol-simbol seperti sistem-sistem yang menjadi aturan (termasuk teori, sistem, teknologi akuntansi termasuk laporan keuangan) yang tidak menimbulkan resistensi pada individu untuk pada akhirnya menjalankannya secara apa adanya.

Habitus juga masih memberi kelenturan untuk setiap individu melakukan pilihan-pilihan atas realitas yang ada tanpa terpengaruh dengan tekanan *doxa* maupun *symbolic violence*. Meskipun demikian dalam keseluruhannya, Bourdieu tidak pernah menyentuh “realitas tak nampak” di luar ruang sosial, yang dalam bahasa Islam, biasa disebut dengan kekuatan spiritual. Kekuatan sesuatu yang berada di luar lingkungan manusia dan alam semesta ini sendiri.

2.3.2. Ekstensi *Constructivist Structuralism*

Practice dan *field* merupakan produk sejarah. Pada saat bersamaan *habitus* dan *field* merupakan produk dari medan daya-daya yang ada di masyarakat. Meskipun demikian menurut peneliti, dalam pendekatan atau perspektif yang lebih luas, pengertian atau konsepsi ini masih terdapat sesuatu yang hilang dalam dominasi *habitus* Bourdieu. Sesuatu yang hilang itu adalah konsep deterministik dan *effort* atas perubahan deterministik individu, berhubungan dengan gagasan transendensi dualisme *realism* dari Bourdieu sendiri. Apabila *habitus* memang dikembangkan dalam *realism* pengetahuan, maka “*blinking*” pasti memiliki padanannya (koeksistensinya) sendiri.

Di sini kemudian peneliti menjadi bingung bagaimana proses ekstensi yang realistis sekaligus idealistis, yang kontekstual sekaligus tekstual, yang materialistis sekaligus menjulang ke dalam batin dan menjulang ke atas spiritualitas? Kejumudan berpikir menggiring membuka proses intuisi penulis, untuk menjembatani keterbatasan akal dan keluasan spiritualitas. Aktivitas sinergis melalui *wudhu*, *shalat*, *dzikir* dan kemudian merenung menghasilkan pemecahan masalah ekstensi metodologis lewat puisi berikut:

Dentang bebas dan terbatasku

*Keramaian yang melingkari diriku hari ini
Di sela aktivitas keceriaan anak-anak di sekolah
Setelah dentang bel istirahat
Laki-laki berlarian, bermain bola, basket, tamiya dan genrenya
Perempuan berlarian, bermain ayunan,
Bercengkerama dengan bahasa mereka*

*Di sela aktivitas semangat para pekerja bangunan
Dentang pukulan palu para tukang
Ayunan pacul dan timba tampungan semen
Dengungan mesin pemotongan kayu
Bercengkerama dengan bahasa mereka
Di sela aktivitas para guru...bercengkerama dengan bahasa mereka
Di sela aktivitas para karyawan...bercengkerama dengan bahasa mereka
Di sela aktivitas para orang tua...bercengkerama dengan bahasa mereka*

*Di saat yang sama aku...
Mendengar lantunan menggugah jiwa
Menggugah cinta manusia dengan manusia
Di saat itu pula aku selalu ingin
Menuju cinta yang berbeda
Mengapa cinta yang hanya itu-itulah saja
Mengapa tidak cinta yang menuju langit
Bahkan cinta yang menembus melampauinya*

*Mengasah dan merindukan serta bercengkerama dengan-Nya
Tidak mesti harus di ruangan sempit
Atau di tempat formal untuk melakukan perjumpaan
Dengan ritual yang padat hafalan
Sampai lupa makna'an
Merindu dan menjangkau diri-Nya
Bagai aktivitas yang beragam
Dari setiap insan yang memiliki dunianya*

*Dengan cengkerama bahasa mereka
Aku ingin juga melakukan cengkerama dengan bahasaku
Menemui-Nya, Berdiskusi dengan-Nya
Menangis di peluk-Nya, Wadul pada-Nya
Apapun ...yang aku mau tiap kali aku mau
Tapi semoga Allah memang mau diajak dengan segala kemauanku
Rasa-rasanya memang saat ini dan kapanpun Allah pasti mau
Hehehehehe...
Yang biasanya gak mau kan aku...??
Maaf ya Allah...
Kata orang aku suka khilaf pada-Mu
Ngapunten ya Allah...
Tapi dari yang paling dalam
Aku selalu dan ingin ketemu dengan Gusti
Kapanpun tanpa henti
Tanpa menit dan jam
Tapi tiap seper miliar, triliun, biliun detik
Pokoknya tak ada ruang tanpa bertemu dengan-Mu*

*Bel sudah berdentang
Anak-anak mulai masuk kelas lagi
Memasuki dunia formalitas dan dunia kewajiban
Dunia kepatuhan dalam ruang sempit
Dalam pikiran terbatas*

*Kalau begitu segala sesuatu harus ada ruang bebas?
Dan ada break untuk berlakunya ruang terbatas?
Ya Allah beri aku sinyal dan petunjuk
Beri aku cahaya, hidayah dan kesadaran
Aku tunggu ya Allah
Aku rasa saat ini aku telah membukanya ...*

Singosari, 18 Ramadhan 1427 H
• 11 Oktober 2006 M
Pukul 0935

Padanan puisi di atas menurut penulis adalah antitesis *blinkering* antitesis ketidaksadaran kultural, yaitu ketidaksadaran alamiah. Ketidaksadaran sendiri pasti juga memiliki antitesisnya yaitu kesadaran metafisis. Kooptasi *habitus* dalam hubungannya dengan peran eksternal kemasyarakatan-kultural harus dibuka dalam konteks di luar individu lain dan masyarakat, yaitu kekuatan alamiah dan kekuasaan metafisik. Bentuk ketidaksadaran alamiah dapat dikatakan sebagai “*the unknown power*”, kekuatan alamiah seseorang. Ketidaksadaran alamiah adalah sesuatu yang di luar nalar. Diungkapkan Calne (2004, 159) ada sesuatu yang berada di luar nalar seseorang. Pedagang dalam melakukan aktivitas dagangnya (berniaga) selalu melakukannya dengan rasional, dengan nalar yang masuk akal. Dalam melakukan aktivitas dagangnya tidak mungkin melepaskan diri dari dorongan irasional (*irrational emotions*) pula. Seseorang dalam menentukan hitungan prediktif atas pilihan-pilihan dagangnya, selain alternatif-alternatif hitungan rasional-kalkulasi matematis yang berada pada batas nalarnya, pasti akan menimbang keputusan pilihan alternatifnya dengan kemampuan irasional di luar nalar. Artinya, kekuatan di luar nalar seperti ini memang tidak terikat mutlak dengan hukum kausalitas deterministik (keterbatasan kemampuan manusia dalam memahami alam). Tetapi juga dipengaruhi kausalitas relatif (kemajuan berdasar *effort* pengembangan pengetahuan manusia dalam sains dan teknologi). Bentuk luar nalar juga dijelaskan Ludigdo (2006) bukan hanya berkaitan kesadaran emosi, tetapi juga berhubungan dengan kesadaran spiritual. Menurut Ludigdo (2006) dimensi kesadaran spiritual atas setiap perilaku etis individu tidak mungkin dihindarkan, tetapi merupakan realitas yang memang muncul di kalangan akuntan.

Kesadaran spiritual di sini merupakan bentuk kekuasaan metafisik -antitesis ketidaksadaran berbentuk kesadaran -berhubungan konsep takdir deterministik (kekuasaan mutlak Tuhan) dan takdir relatif (kekuasaan Tuhan berhadapan kemampuan manusia yang diberikan Tuhan dalam bentuk kecerdasan untuk meningkatkan kualitas hidup). Ilmu, pengetahuan dan kebenaran juga seharusnya tidaklah melakukan pembatasan ontologis terhadap hal yang mistik dan metafisik yang telah dilakukan oleh Sain Barat/Modern yang menyebabkannya menjadi materialistik. Seperti diungkap oleh Triyuwono (2005, 101):

Mystical and metaphysical dimensions seem to be ontologically forbidden areas to attach them as inseparable parts in modern science. Indeed, modern science becomes so materialistic.⁵⁶

Proses penyatuan rasio dan intuisi merupakan hal paling penting yang akan memberikan kekuatan dalam pengembangan sains modern yang asli. Dijelaskan Triyuwono (2005, 111):

For this purpose, the hybrid of rationality and intuition is strongly needed. Rationality is useful for assessing, analysing, and formulating the physical reality, while intuition is for the metaphysical reality.⁵⁷

Dengan kata lain, ilmu, pengetahuan dan kebenaran harus terdesain secara utuh dari asalnya yang memang spiritual sekaligus memiliki penampakan material yang dipancarkan dari nilai spiritual itu sendiri.

⁵⁶ Dimenai mistis dan metafisis dalam sains modern secara ontologis merupakan area terlarang untuk digali lebih jauh. Hal ini telah menyebabkan sains modern menjadi sangat materialistik.

⁵⁷ Penggabungan rasionalitas dan intuisi sangat dibutuhkan. Rasionalitas berguna untuk melihat, menganalisis dan memformulasikan realitas fisik, sedangkan intuisi untuk realitas metafisis.

Pengembangan modal yang *immaterial* dari Bourdieu tidak sampai pada tataran tersebut. Bourdieu hanya mengembangkan modal selain modal ekonomi yang material, yaitu modal sosial, kultural dan simbolik yang dianggapnya sebagai modal immaterial. Dari konsepsi skema-skema yang menyusun *habitus* kita dapat melakukan metafora yang sama untuk merumuskan konsep kesatuan tekno sistem. Anggap saja masing-masing tekno sistem (*Shari'ate Value Added Statement*, pengganti *Balance Sheet*, pengganti *Cashflow* dan bentuk lainnya) sebagai entitas yang dijadikan sebagai *symbolic capital* dan berdiri sendiri-sendiri, kemudian membentuk *field* sebagai satu kesatuan yang spontan. Dengan adanya kesatuan tekno sistem-tekno sistem (skema-skema) yang telah terbentuk tersebut, maka *habitus* akan membentuk sebuah mekanisme tekno sistem yang baru dalam struktur *field* yang baru dan secara tidak sadar mengatur posisi-posisi tekno sistem secara sendiri, relasi antar dua tekno sistem maupun dalam kesatuan hubungan relasi dalam tatanannya yang terbentuk secara spontan (lihat dalam gambar 2). Konsepsi Bourdieu masih dalam tataran ini, yaitu tataran yang material dan kontekstual.

Diperlukan ekstensi konsep Bourdieu dengan konsep ketaksadaran alamiah dan kesadaran metafisik seperti dijelaskan di atas untuk memenuhi persyaratan tekno sistem yang memiliki dua ciri utama, meliputi bagian-bagian tekno sistem (prinsip/nilai/tekno sofi dan sumber nilai/Tauhid/ruh teknologi). Konsepsi strukturalisme generatif Bourdieu yang telah diekstensi ini diinjeksikan dalam konsep HIT, sehingga akan terjadi sinergi strukturalisme generatifnya Bourdieu dengan model HIT.

Proses rekonstruksi akan dilakukan dalam tiga fase. Fase pertama, melakukan pendalaman konseptual bentuk laporan yang

akan dibentuk melalui model ekstensi *Constructivist Structuralism*-nya Bourdieu (CS), terutama konsep *field* dan *practice*. Artinya, fase ini merupakan proses penelitian empiris di lapangan untuk membuktikan bahwa apakah sebenarnya terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan *source* (bahan) laporan keuangan dalam masyarakat Islam yang memang sesuai dengan nilai mereka sendiri. Terutama masyarakat dagang muslim yang memang mengaplikasikan aktivitas dagangnya dengan nilai-nilai Islam. Fase kedua, melakukan rekonstruksi bentuk laporan keuangan berdasarkan *source* dari fase pertama, menggunakan metodologi yang sama ketika melakukan *tazkiyah Value Added Statement* menjadi *Shari'ate Value Added Statement* (lihat Mulawarman 2006a). Fase ketiga, melakukan integrasi seluruh hasil pembentukan laporan-laporan keuangan menjadi sebuah laporan keuangan syari'ah yang utuh. Proses ini menggunakan model ekstensi *Constructivist Structuralism* terutama melalui metafora *habitus* dan *capital*.

Pendekatan rekonstruksi dalam penelitian ini memang bersifat kualitatif⁵⁸. Pendekatan seperti ini berdampak pula pada validitas dan reliabilitas penelitian yang akan dilakukan. Realibilitas akan berhubungan dengan tingkat keterandalan data dan validitas berhubungan dengan kesahihan data. Validitas penelitian kualitatif, seperti diungkap oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam Sarantakos (1995, 78) tidak begitu mementingkan validitas tetapi lebih mementingkan *methodological excellences*. Menjalankan riset lebih dipentingkan pada profesionalitas, akurasi dan sistematisasi penelitian. Sarantakos (1995, 78) mengatakan bahwa sebenarnya

⁵⁸ Penelitian kualitatif menurut Salim (2001, 80) biasanya dilandasi cara berpikir yang lebih reflektif, historis dan biografis. Implikasi penting dari cara berpikir seperti itu adalah strategi penelitian empiris yang berkaitan dengan pengalaman hidup, keluasan masyarakat dan struktur kebudayaan.

Gambar 2 Ekstensi Konsep Ruang Sosial Pierre Bourdieu



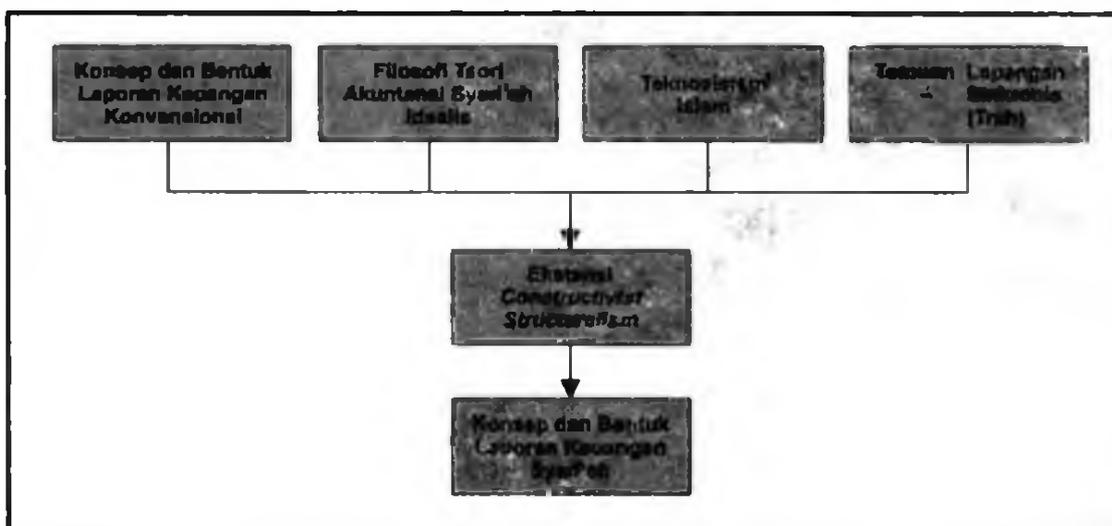
validitas penelitian kualitatif lebih tinggi dibanding penelitian kuantitatif karena data yang diambil lebih menunjukkan realitas di lapangan; penggunaan metode relatif lebih terbuka dan fleksibel; berbasis komunikasi interaktif yang tidak mungkin dilakukan dalam penelitian kuantitatif; dan perluasan data dimungkinkan untuk memperkuat temuan.

Reliabilitas menurut Sarantakos (1995, 79) berbeda dengan penelitian kuantitatif, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada konsistensi. Penelitian kualitatif menolak adanya metode pengendalian lingkungan penelitian, penetapan standarisasi metode, maupun hubungan antara peneliti dan informan yang terkontrol. Penelitian kualitatif percaya bahwa penelitian kuantitatif hanya melakukan pemeriksaan reliabilitas dalam situasi yang artifisial. Hasilnya kemudian, proses pengujian reliabilitas akan mengalienasi peneliti dari penelitian dan lingkungan penelitian itu sendiri. Reliabilitas penelitian kualitatif menurut Miller (1985) dalam Salim (2001, 83) menyangkut temuan yang hidup di lapangan. Penting dicatat di sini bahwa reliabilitas yang diinginkan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana kekuatan data dapat menggambarkan keaslian data dan kesederhanaan yang nyata dari setiap informasi. Konsistensi reliabilitas penelitian kualitatif, dilakukan dengan *mixing* teknik penggalan data (seperti *interview*, partisipasi, foto, studi dokumen) (Newman 2000, 170).

Penelitian kualitatif yang dilakukan di sini memang mementingkan validitas dan reliabilitas yang “unik”, validitas dan reliabilitas yang sangat dekat dengan realitas, tanpa pengendalian, bebas, serta apa adanya. Penelitian diharapkan dapat menunjukkan realitas pedagang muslim ketika mereka melakukan aktivitas. Generalisasi dari

hasil penelitian tidak begitu dipentingkan, meskipun sebenarnya peneliti percaya bahwa tidak ada penelitian yang dapat memberikan *problem solving* terhadap generalisasi suatu temuan, bahkan penelitian kuantitatif sekalipun. Untuk memudahkan, digambarkan rerangka konseptual penelitian ini dengan menggunakan perluasan Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi berdasarkan metafora teori *Constructivist Structuralism* yang telah diekstensikan (*tazkiyah*):

Gambar 3. Ekstensi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi



Tiga fase penelitian di atas dijabarkan lebih detail dalam tiga tahapan penelitian. Tiga tahapan tersebut yaitu eksplorasi teoritik dan non teoritik, turun lapangan, analisis struktur-struktur dan utuhan.

2.3.3. Koleksi Data Teoritis-Nonteoritis

Eksplorasi teoritis dan non teoritis adalah aktivitas koleksi data dari sumber-sumber tertulis, seperti buku-buku, artikel, majalah, koran dan teks-teks lain, baik ilmiah dan non-ilmiah yang penting; catatan-catatan aktivitas dagang, laporan-laporan keuangan, maupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan aktivitas perdagangan informan. Koleksi nonteoritis dalam penelitian ini dilakukan untuk mendekati model reliabilitas unik dari model penelitian

kualitatif seperti dijelaskan oleh Neuman (2000) berkenaan keaslian data dan kekuatan informasi apa adanya di lapangan.

Koleksi data teoritis melakukan kajian literatur untuk menggali konsep teoritis dan hasil penelitian empiris implementasi neraca dan laporan arus kas pada *field* akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah pragmatis. Koleksi data teoritis juga dilakukan dari domain akuntansi syariah idealis, mulai dari landasan sumber nilai Islam, yaitu *Taubid*, sampai dengan kerangka filosofis-teoritis yang dibangun akuntansi syariah.

2.3.4. Koleksi Data Empiris “sources” Laporan Keuangan

Turun lapangan adalah aktivitas empiris yang dilakukan untuk melihat secara langsung informan dalam melakukan aktivitas dagangnya. Aktivitas turun lapangan dilakukan dengan interview, pengamatan dan interaksi langsung dengan informan maupun tidak langsung pada teman, pelanggan, rekan bisnis dan keluarga informan. Interview juga dilakukan dengan beberapa tokoh kunci. Aktivitas turun lapangan dilakukan untuk mengetahui secara langsung akuntan praktisi Muslim melaksanakan aktivitas akuntansi. Melihat implementasi keislaman akuntan praktisi dalam *field* dan *practice* akuntansi yang (harusnya) muncul dalam karakter akuntabilitas kesadaran Ilahiah. Artinya, aktivitas yang dilakukan adalah mengambil nilai-nilai dasar individu atau masyarakat muslim yang masih menjalankan aktivitasnya berdasarkan nilai-nilai Islam. Meskipun nantinya dalam proses penggalian informasi, pasti terdapat interaksi antara informan muslim dengan non-muslim. Dari proses interaksi tersebut pasti muncul nilai-nilai kebaikan yang belum terakomodasi dalam nilai-nilai Islam 'lama' tetapi sebenarnya secara substansial memiliki nilai-nilai Islami. Hal itu akan diakomodasi dan dilihat kesesuaiannya dengan konsepsi *ushul fiqh*

dan *syari'ah*. Ini disebut Islamisasi adaptif versi Fazlur Rahman (lihat kembali penjelasan mengenai tiga bentuk Islamisasi).

Penelitian ini akan melihat karakter lebih komprehensif, yaitu dengan penentuan informan, mulai dari akuntan praktisi, praktisi bisnis dan aktivis organisasi kemasyarakatan Islam. Akuntan praktisi adalah akuntan yang bekerja di organisasi bisnis umum maupun bisnis syari'ah yang dijalankan oleh informan muslim. Akuntan praktisi tidak harus sarjana strata satu bergelar akuntan, tetapi akuntan di sini adalah karyawan atau staf akuntansi yang menjalankan tugas mulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai dengan pembuatan laporan keuangan suatu organisasi bisnis. Praktisi bisnis adalah pemilik atau direksi dari perusahaan. Aktivis organisasi kemasyarakatan Islam adalah pengurus organisasi kemasyarakatan Islam seperti Majelis 'Ulama Indonesia, Muhammadiyah dan atau Nahdlatul 'Ulama yang memiliki kapasitas keilmuan di bidang *syari'ah*, *fiqh mahdhab* maupun *muamalah*.

Proses penggalan informasi di lapangan dilakukan untuk memberikan kepastian validitas penelitian seperti diungkapkan oleh Sarantakos (1995). Validitas penelitian di sini ditunjukkan dengan pemaparan realitas apa adanya di lapangan, komunikasi interaktif dengan informan serta perluasan data yang dibutuhkan (semacam triangulasi data) di lapangan. Salah satu caranya adalah penentuan informan di masing-masing Trah (di sini akan dibagi menjadi tiga trah, yaitu Trah Sarekat Islam, Trah Nahdlatul Ulama dan Trah Muhammadiyah). Masing-masing trah tidak hanya menentukan satu informan untuk tiap trah, tetapi lebih dari satu untuk tiap trah.

Akuntan praktisi, praktisi bisnis, aktivis organisasi kemasyarakatan Islam yang dipilih adalah sebagai berikut:

1. Pak Abbas, pemilik usaha perumahan, pertambangan dan HPH; "Trah" Sarekat Dagang Islam di Malang.

2. Pak Danang, direktur operasi perusahaan Pak Abbas; "Trah" Sarekat Dagang Islam di Malang.
3. Pak Mahmud, praktisi bisnis "Trah" Nadhlatul Ulama di Sidogiri Pasuruan.
4. Pak Dumairi, Manajer BMT, "Trah" Nadhlatul Ulama di Sidogiri Pasuruan.
5. Pak Baihaqi, Manajer Kopontren, "Trah" Nahdlatul Ulama di Sidogiri
6. Pak Ishar, pemilik toko leveransir di kota Malang, praktisi bisnis "Trah" Muhammadiyah.
7. Pak Aziz, produsen *spareparts* mebelair kayu di kota Jepara; "Trah" Muhammadiyah.
8. Pak Munir, di Jogjakarta, salah satu aktivis Nasional Muhammadiyah sekaligus komisaris Bank Persyarikatan Indonesia.
9. Asih, akuntan praktisi (strata satu), karyawan Pak Abbas.
10. Tantri, akuntan praktisi (strata satu), karyawan Pak Abbas.
11. Andika, akuntan praktisi (strata diploma tiga), karyawan Kopontren Sidogiri Pasuruan.

Informan yang dipilih beragama Islam dan terlibat langsung serta berkompeten pada bidangnya. Wawancara dengan informan dilakukan selama tujuh bulan (Nopember 2006 sampai Juni 2007) di empat kota secara langsung, di sela-sela waktu informan melakukan aktivitasnya. Kenapa penelitian ini hanya dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIJ sebenarnya hanya karena masalah keterbatasan waktu dan dana. Selain itu akan dilakukan penggalian data mengenai pedagang atau pengusaha secara literal dari buku-buku sebagai pembanding (Bu Pamela di Kota Gede Jogja, Bu Hj. Sus dan Pak Kholid di Pekajangan Pekalongan).

2.3.5. Analisis Bagian-bagian dan Utuhan Laporan Keuangan Syari'ah

Tahap ketiga adalah melakukan analisis dari eksplorasi teoritis-nonteoritis dan aktivitas turun lapangan untuk mendesain bentuk laporan-laporan. Khusus Laporan Nilai Tambah Syari'ah hanya melakukan studi interpretif dikomparasikan dengan konsep yang telah dibangun Mulawarman (2006a). Studi interpretif dengan melakukan pendalaman konsep nilai tambah dari nilai-nilai Indonesianis Islam yang dimungkinkan masih dijalankan di lapangan. Pendalaman konsep nilai tambah seperti konsep *rezeki*⁵⁹ sebagai bentukan dari konsep *nama'* dari Syahatah⁶⁰ (2001) . Menurut Syahatah (2001), *nama'* yang terdiri dari tiga bentuk memiliki kesesuaian dengan konsep akuntansi. Tiga bentuk tersebut yaitu *rihb at-tijari* yang mirip dengan istilah laba dagang, *al-ghallah* yang mirip dengan laba insidental, dan *al-faidah* yang mirip dengan laba dari modal pokok⁶¹ . Konsep yang mungkin juga perlu digali adalah "*barokah*" yang mirip dengan istilah "*luck*" atau "*fortune*" dalam khasanah dunia bisnis kontemporer.

Analisis laporan-laporan selain Laporan Nilai Tambah Syari'ah dilakukan dengan cara analisis terhadap hasil eksplorasi teoritis. Analisis dimulai dari melihat konstruk bentuk laporan keuangan akuntansi syari'ah berdasar konsep idealis⁶² ; formulasi konsep dasar teori akuntansi syari'ah Triyuwono (2002c),

⁵⁹ Bahkan dalam 'dunia empiris', konsep Rezeki telah menjadi salah satu bagian etika yang utama dalam aktivitas manusia mencari penghidupan, nampak misalnya dalam etika masyarakat Kotagede Yogyakarta (Nakamura 1983) dan Pekajangan Pekalongan (Qodir 2002).

⁶⁰ Konsep Rezeki dalam Islam merupakan term yang sangat penting dan mendasar dalam domain Ekonomi Islam (Muslehuddin 2004).

⁶¹ Konsep nama' juga disebut oleh Gambling dan Karim (1991, 102) yang merujuk Qardhawi (1981) sebagai pertumbuhan kekayaan dari hasil profit, gil'ah dan fa'edah.

⁶² Gambling dan Karim (1991) maupun Adnan (1997) dengan kritik-kritiknya mengenai konsep dasar akuntansi modern serta usulannya mengenai *Balance Sheet* berbasis CoCoA

Triyuwono (2002b), Triyuwono (2004), tujuan laporan keuangan dan karakter laporan keuangan akuntansi syariah; hingga perluasan karakter laporan keuangan akuntansi syariah (Mulawarman 2006a). Analisis juga dilakukan pada usulan alternatif laporan keuangan (ICR's dari Baydoun dan Willet 1994; 2000 dan perluasan ICR's dari Sulaiman 2001; 2003). Pendalaman kerangka konseptual maupun teknologi dilakukan dengan melakukan penelusuran kerangka filosofi dan teori dari nilai-nilai Islam, mulai konsep *wasathan, al-mubith, ma'isyah, rizq, maal, barakah* hingga konsep lain yang diperlukan dan sesuai kebutuhan rekonstruksi laporan keuangan syariah.

Tahap berikutnya adalah menggali dan melakukan studi komparatif secara empiris di lapangan dengan hasil pengembangan model laporan keuangan yang telah didesain. Keduanya dilakukan secara simultan. Dimungkinkan pula studi komparatif teoritis dan empiris di lapangan dapat berubah menjadi eksplorasi konstruktif bila ditemui sebuah struktur dan nilai-nilai baru yang tidak terdapat di dalam eksplorasi teoritis.

Terakhir adalah proses penggabungan dari berbagai rancangan bentuk laporan keuangan menjadi utuhan laporan keuangan syariah. Tahapan ini menggunakan konsep *habitus* dan *capital* dan perluasan konsep teknosistem, untuk mendapatkan substansi interaksi ketiganya dalam mekanisme laporan keuangan yang utuh; terutama interaksi konsep *capital* dan *habitus* yang memunculkan perluasan konsep *capital*, dari modal ekonomi, sosial, simbolik sampai kultural. Khusus *cultural capital* dalam ranah akuntansi menurut Thompson (1999) misalnya menyebabkan terjadinya perubahan mendasar konsep *agency theory* dan *human*

resource accounting berbasis *cultural capital*⁶³. *Cultural capital* mungkin akan “membuka pintu” bagi penjelasan yang rasional dan ilmiah bagi diterapkannya *enterprise theory* yang lebih menekankan perluasan akuntabilitas. *Cultural capital* juga dimungkinkan akan menjadi pusat dari perubahan mendasar bentuk laporan keuangan syaria’ah secara keseluruhan yang lebih dekat pada *articulated approach* yang menekankan *asset-liability approach* daripada *revenue-expense approach*.

2.4. RINGKASAN

Penelitian ini menggunakan metodologi Ekstensi Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi untuk melakukan konstruksi laporan keuangan syaria’ah. Penggunaan metodologi Ekstensi HIT memungkinkan laporan keuangan syaria’ah dibangun dari sinergi nilai-nilai normatif dan empiris. Ekstensi dijalankan melalui dua tahap, yaitu tahap perumusan metodologi dan implementasinya dalam bentuk metode penelitian.

Tahap pertama adalah proses perumusan metodologi secara umum dengan cara integrasi strukturalisme dan postrukturalisme sekaligus melampaui (*hyper*) keduanya. Bentuk melampaui di sini merupakan proses penyucian dan memayungi keduanya dengan nilai-nilai Islam. Proses pengembangan metodologi HIT dijalankan melalui empat proses; **pertama**, menetapkan elemen-elemen strukturalisme; **kedua**, menetapkan elemen-elemen postrukturalisme; **ketiga**, integrasi strukturalisme dan postrukturalisme yang

⁶³ Penerapan *cultural capital* bila dilihat lebih jauh akan mirip dengan konsekuensi perluasan akuntabilitas bukan hanya pada *stockholders* atau *shareholders* saja yang memang berakar pada *entity theory*. Thompson (1999) menegaskan bahwa akuntabilitas dengan penerapan *cultural capital* akan mengarah pada *beyond principal-agent*.

disebut hiperstrukturalisme; keempat, melakukan ekstensi hiperstrukturalisme.

Strukturalisme digunakan untuk memahami bahwa laporan keuangan syari'ah: (1) merupakan susunan dari berbagai unsur yang saling terikat satu sama lain; (2) disusun dari rangkaian makna unsur dan seluruh struktur yang khas; (3) memiliki elemen atau akun yang memiliki makna empiris sekaligus memiliki mekanisme oposisi binernya; (4) dapat dirunut makna unsur, keterkaitannya sampai bentuk utuh dari realitas empiris saat ini (diakronis). Poststrukturalisme digunakan untuk melihat bahwa pemaknaan unsur, keterkaitan antar unsur, serta pembentukan laporan keuangan disamping bersifat diakronis juga terkait dengan interaksi sinkronisnya (masa lampau) Artinya, dimungkinkan melakukan *matching* realitas bisnis Rasulullah (representasi masa lalu-sinkronis) dengan realitas bisnis Muslim trah SI, Muhammadiyah dan NU (representasi masa kini-diakronis). Hiperstrukturalisme adalah integrasi nilai-nilai strukturalisme dan poststrukturalisme sekaligus melampaui keduanya (*Hyper*). Proses "*hyper*" dilakukan untuk meletakkan kerangka filosofis teoritis akuntansi syari'ah sebagai pusat perekayasaan dengan penambahan aspek teknologi (laporan keuangan syari'ah) dalam Teknosistem. Penyatuan menggunakan proses *tazkiyah*, dilakukan secara terstruktur, sistemik, dan berlangsung dalam bingkai *Taubid* dan sesuai nilai-nilai Islam (*Islamic values*) dan tujuan syari'ah (*maqashid asy-syari'ah*). Mudahnya, teknosistem digunakan untuk melakukan perumusan beberapa laporan keuangan dan integrasi menjadi kesatuan. Ekstensi Hiperstrukturalisme adalah implementasi *shari'ate enterprise theory* (SET) dalam kerangka teknologi. Implementasi teknologis pada konsep dasar teoritis dijalankan melalui persyaratan-persyaratan teknologis agar dapat diimplementasikan menjadi bentuk laporan keuangan.

Tahap kedua adalah proses perancangan metode berdasar metodologi yang telah dirumuskan. Metode penelitian di sini menggunakan ekstensi *Constructivist Structuralism* (CS) dari Pierre Bourdieu. Ekstensi CS dilakukan untuk menangkap *habitus*, *capital*, *field* dan *practice* masyarakat Muslim melakukan aktivitas bisnisnya. Artinya, fase ini merupakan proses empiris untuk membuktikan bahwa sebenarnya terdapat nilai-nilai yang dapat dijadikan *source* laporan keuangan sesuai nilai mereka sendiri (*habitus*) secara material-batin-spiritual. Penelitian empiris (*practice*) dengan melakukan pengamatan, wawancara dan pendalaman (*field*) makna dan simbol dari informan Muslim melakukan aktivitas bisnis atau dagangannya (*capital*). ■

BAB 3

BELAJAR DARI BERBAGAI KONSEP DASAR TEORITIS AKUNTANSI KONVENSIONAL

Tradisi dapat dipelajari dengan obyektifitas historis yang memadai dan dipisahkan tidak saja dari masa kini, tetapi juga dari faktor-faktor normatif yang diduga telah melahirkannya

(Islam dan Modernitas; Fazlur Rahman)

3.1. PENDAHULUAN

Pertanyaan menarik dari Lorig (1964) berkaitan konsep dasar teoritis akuntansi adalah: "apakah hanya diperlukan satu konsep dasar yang dapat diaplikasikan untuk seluruh entitas akuntansi, atau terdapat bermacam bentuk entitas bisnis yang secara alamiah membutuhkan konsep-konsep berbeda? Apakah perusahaan perseorangan memiliki dasar teori sendiri? Apakah pemerintahan dan organisasi non-profit memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan berorientasi bisnis? Apakah *corporate family* yang memiliki induk dan anak perusahaan perlu menggunakan sistem berbeda dengan *single corporation*?" Berbagai pertanyaan mendasar inilah yang telah menjadi bagian perdebatan panjang konsep dasar teoritis akuntansi. Bab ini akan membahas tentang perbedaan konseptual serta bagaimana entitas melakukan aplikasinya sesuai konsep dasar teoritis yang digunakan. Pembahasan dilakukan dengan melakukan deskripsi sekaligus analisis kritis terhadap

beberapa konsep dasar teoritis akuntansi, serta implikasinya terhadap bentuk teknologinya (laporan keuangan).

Pembahasan konsep dasar teoritis akuntansi dalam bab ini meliputi *proprietary theory*, *entity theory* dan *enterprise theory*. Akuntansi konvensional termasuk akuntansi syariah pragmatis sangat dipengaruhi dua konsep dasar, yaitu *proprietary theory* dan *entity theory*. Akuntansi kritis di sisi lain, seperti akuntansi sosial dan lingkungan, banyak menggunakan *enterprise theory*⁶⁴. Aliran akuntansi syariah idealis mengembangkan konsep *enterprise theory* lebih jauh dengan melakukan Islamisasi *enterprise theory* menjadi *shari'ate enterprise theory*⁶⁵.

Mengapa hanya tiga konsep ini yang dibahas? Sebenarnya, terdapat beberapa konsep dasar teoritis lain seperti *investor theory*, *residual equity theory*, *fund theory* dan *commander theory*. *Fund theory* dan *commander theory* tidak dibahas di sini, karena *fund theory* lebih mengarah pada akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan; sedangkan *commander theory* memang dapat dijadikan sebagai pembanding, tetapi dari asumsi yang dikembangkan, konsep ini lebih mengarah pada pendekatan politisasi akuntansi. Pembahasan konsep *commander theory* mungkin lebih cocok ketika melakukan kritik terhadap *entity theory* dan *enterprise theory* dalam konteks *Political Economy of Accounting*. Konsep dasar teoritis lain seperti *investor theory* dan *residual equity theory* tidak dibahas dalam sub bab tersendiri, karena (akan dijelaskan nanti) keduanya merupakan evolusi dari *proprietary theory* dan *entity theory* dengan ekstensi penekanan antara investor dan kreditor.

⁶⁴ Untuk kepentingan tersebut juga akan dijelaskan mengenai akuntansi sosial dan lingkungan dalam sub bab tersendiri

⁶⁵ Dibahas dalam Bab 4

3.2. PROPRIETARY THEORY

Kata *proprietary* menurut *Pocket Oxford Dictionary March 1994* (1994) edisi *online* berasal dari kata latin *proprietary* yang berhubungan dengan *property*. *Property* sendiri berasal dari kata latin yaitu *proprietates* atau *proper*. Kata *proper* memiliki arti "accurate, correct; fit, suitable, right (at the proper time); decent, respectable". Kata *property* memiliki arti "thing(s) owned, possession, especially a house, land, etc. (has money in property)". Kata *proprietary* sendiri diartikan sebagai "of or holding property (proprietary classes); of a proprietor (property rights); held in private ownership". *Proprietary* dalam *Oxford Dictionary* (2003) diartikan sebagai "made by a particular company and sold under a trade name". Terjemahan *proprietary* dalam bahasa Indonesia menurut Oxford-Erlangga (Hawkins 1999) diartikan sebagai "(milik) pribadi".

Secara umum dapat dikatakan *proprietary* berasal dari akar kata *property* yang berhubungan dengan kepemilikan, meskipun dalam konsep *property* maupun *proprietary* sebenarnya terkandung beberapa arti lain yang nantinya dapat dijadikan rujukan konseptual dalam *proprietary theory* baik yang sudah diakomodasi maupun belum dalam konsep dasar teoritis akuntansi. Misalnya kesantunan atau kesopanan berhubungan dengan masalah perilaku moral atau etika. Konsep etika ini terkandung dalam kata *propriety* (dalam bahasa Inggris) atau *property* (dalam bahasa Perancis). Perubahan kata *proper* menjadi *properly* juga memberi arti lain, yaitu ketepatan dan akurasi. *Proprietary* juga berhubungan dengan konsep hukum seperti kedekatannya dengan *rights*, yang merupakan konsep hak secara hukum.

Pelaku *proprietary* disebut *proprietor* (pemilik). *Proprietor* dalam ranah akuntansi, yaitu *proprietary theory*, menurut Kam (1990, 302) adalah pemilik dan pusat kepentingan akuntansi itu sendiri.

Rosenfield (2005) mendefinisikan *proprietor* sebagai seorang atau banyak orang yang berkepentingan terhadap keberhasilan atau kegagalan usaha dan bagaimana usaha dilakukan sehingga dapat memberikan sumber daya kepada mereka secara sukarela.

Sejarah munculnya akuntansi menurut Littleton berkaitan dengan *proprietorship* (Kam 1990, 302). *Proprietorship* diartikan Niswonger *et al.* (1999, 3) sebagai perusahaan yang dimiliki perorangan. *Proprietorship* inilah yang dianggap Littleton sebagai substansi dari sistem *double-entry*. Tanpa substansi sistem *double entry* tidak terdapat alasan munculnya sistem pembukuan berpasangan atau *double entry book keeping* (Kam 1990). Munculnya *double-entry book-keeping* (DEB) memang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan akuntansi sebagaimana dapat dilihat bentuk formalnya saat ini⁶⁶.

Menurut *proprietary theory*, tujuan perusahaan, jenis modal, makna rekening dan lainnya semua dilihat dari sudut pandang pemilik. Dengan demikian perusahaan dalam konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran pemilik. Entitas dianggap sebagai agen, perwakilan atau penugasan pemilik atau pengusaha. Oleh karena itu *proprietor* merupakan pusat perhatian yang akan dilayani oleh informasi akuntansi dan digambarkan dalam pelaksanaan

⁶⁶ Dalam khasanah akuntansi yang ditulis para ahli sejarah akuntansi, DEB muncul secara formal dan ditulis Luca Pacioli. Meskipun dalam kenyataannya menurut beberapa pakar akuntansi dan penulis sendiri, Pacioli bukanlah penemu konsep DEB tersebut. Beliau hanya mendeskripsikan serta menjelaskan bentuk DEB sebagai salah satu bentuk pencatatan dagang yang telah ada di masyarakat Italia saat itu. Aktivitas dan pencatatan dagang bentuk DEB di Italia waktu itu dipengaruhi oleh interaksi dan transfer budaya, pengetahuan, pengalaman dan kreativitas antara pedagang Italia dengan pedagang Muslim (lihat misalnya Storrar dan Scorgie 1988; Lieber 1968). Bila ditarik lebih jauh dalam perkembangan *Renaissance*, *Aufklarung*, *Humanism* dan Perang Salib yang menjadi cikal bakal Revolusi Ilmu Pengetahuan di Eropa, salah satu tempat yang menjadi pusat pertukaran, perembesan dan transfer budaya dan ilmu pengetahuan dari Peradaban Islam (yang sangat maju waktu itu) ke Eropa adalah Italia dan sekitarnya. Hal ini dibuktikan dengan pusat terjemahan buku-buku Arab di abad 12-13 yang dipusatkan di kota Toledo dan Palermo, Sisilia, Italia (Madkoer 1986, 128-131). Artinya, dimungkinkan sebenarnya DEB telah ada sebelum Italia, atau lebih lugas lagi DEB telah dilakukan oleh pedagang Muslim jauh sebelum Italia melakukannya.

pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Tujuan utama dari teori ini menurut Harahap (2002, 71-72) adalah menentukan dan menganalisis kekayaan bersih (*net worth*) perusahaan yang merupakan hak si pemilik. Persamaan akuntansi konsep *proprietary theory* adalah sebagai berikut:

$$\text{Asset} - \text{Liability} = \text{Proprietor's Equity}$$

(Aset - Kewajiban = Ekuitas Pemilik)

Berdasarkan persamaan di atas, pemilik memiliki aset dan sekaligus memiliki kewajiban. Kekayaan bersihnya adalah kekayaan perusahaan dikurangi dengan kewajiban perusahaan.

Chow (1942) menjelaskan bahwa *proprietor* adalah pemilik bisnis dan sekaligus *receiver* dari *residual income* setelah dilakukannya pembayaran seluruh pengeluaran kontraktual bisnis. *Proprietor* juga sebagai pemilik seluruh aset dan menanggung seluruh kewajiban (*liability*), sedangkan kelebihan perhitungan aset dari kewajiban aset merupakan *net interest* atau *proprietorship* dalam bisnis. Dalam konsep *proprietary theory*, aset, liabilitas dan *proprietorship* menjadi tiga ketentuan dasar aspek-aspek dalam aktivitas bisnis, sehingga dari sinilah fungsi akuntansi untuk melakukan pencatatan, analisis dan pelaporan dalam perubahan dan status atas tiga aspek dalam bisnis.

Proprietorship menurut Chow (1942) melakukan peningkatan pendapatan *income* (laba) atau *profit* (keuntungan) dan menurunkan *expenses* (pengeluaran) atau *losses* (kerugian) dalam aktivitas bisnisnya. Peningkatan pendapatan dicatat di kredit dan pengeluaran dicatat di debit. Setelah selesai segera dimasukkan dalam skema akuntansi dengan item-item *profit-and-loss* sebagai bagian dari kategori *proprietorship*. Ringkasan *profit-and-loss* (laporan laba rugi) memberikan analisis detil mengenai perubahan

dalam *proprietorship* selama periode waktu tertentu. Periodisasi ini menurut Chow sebagai penentuan item-item *proprietorship* dalam *balance sheet* (neraca) dan juga sebagai penghubung antara dua neraca. Oleh karenanya teori ini menurut Harahap (2002, 72) berorientasi pada neraca atau *balance sheet oriented*.

Item-item dalam neraca yang utama terdiri dari aktiva (*asset*), kewajiban (*liabilities*) dan ekuitas (*equities*). Aktiva dijelaskan Chariri dan Ghozali (2000, 167-168) merupakan kekayaan pemilik, sementara hutang merupakan kewajiban pemilik. Kepemilikan dianggap sebagai nilai bersih dari perusahaan untuk pemilik. Ketika usaha baru dimulai, nilai ini sama dengan investasi pemilik. Selama berjalannya usaha maka nilai perusahaan sama dengan investasi awal ditambah akumulasi laba bersih setelah dikurangi *prive* untuk pemilik.

Di samping itu aktiva harus dinilai dengan nilai sekarang (*current value*) oleh karena ekuitas pemilik dianggap sebagai kekayaan bersih; dengan demikian laba bersih akan secara langsung menjadi hak pemilik dan mencerminkan kenaikan pemilik dan karena laba adalah kenaikan kekayaan, maka segera pula ditambahkan kepada modal pemilik. Dividen kas mencerminkan pengambilan modal dan laba ditahan adalah bagian total pemilikan. Dividen saham hanyalah sekedar pemindahan dari bagian pemilik yang satu kepada yang lainnya. Dividen saham bukan merupakan laba bagi pemegang saham. Bunga atas pinjaman dengan demikian adalah biaya pemilik dan harus dikurangkan terlebih dahulu sebelum menghasilkan laba bersih. Pajak diperlukan setara dengan agen dari pemegang saham yang menganggap perusahaan adalah agen dari pemegang saham dalam pembayaran pajak yang nyata-nyata pajak penghasilan dari pemegang saham.

Bentuk laporan laba rugi versi *proprietary theory* menurut Suwardjono (2005, 501) adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Versi *Proprietary Theory*

Penjualan (Pendapatan)		xxx
Biaya		
Bahan baku dan bahan habis pakai	xxx	
Gaji Manajer dan karyawan	xxx	
Overhead non tenaga kerja	xxx	
Depresiasi	xxx	
Bunga	xxx	
Pajak	xxx	xxx
Laba Bersih (Net Income)		yyy
Penggunaan Laba:		
Dibagi dalam bentuk dividen		xxx
Reinvenstasi atau <i>Retained Earnings</i>		xxx
		yyy

Penggunaan laba dalam gambar di atas berdasarkan penjelasan dari Suwardjono (2005, 502), sebenarnya tidak tersaji dalam laporan laba rugi tetapi dalam laporan perubahan laba ditahan. Data tersebut disajikan, semata-mata untuk membandingkan dengan penyajian atas dasar konsep dasar teoritis yang lain (Suwardjono 2005, 502).

Berdasarkan penjelasan di atas, konsep *proprietary theory* menempatkan pemilik sebagai pusat segala kepentingan yang mengarah pada konsekuensi legitimasi dan stimulasi perilaku egoistis, serta individual dalam perilaku bisnis. Secara implisit konsep *proprietary theory* mengekspresikan suatu hirarki kekuasaan atas kekayaan secara terpusat, bahkan berpotensi totaliter dan mengarah pada replika perang sosial, dimana wujud kompetisi secara interaktif meningkatkan intensitas dorongan mencari kekayaan (Setiabudi dan Triyuwono 2002, 162).

Konsep *proprietary theory* sampai awal abad XX mendominasi model perusahaan yang ada di Amerika Serikat. *Proprietary theory* disebut Zaroni (1998) sebagai representasi kekuasaan yang terpusat pada kepentingan ekonomi pemilik dan eksistensinya hanya untuk meningkatkan *net equity's value*. Perkembangan perusahaan-perusahaan yang makin besar dan dipengaruhi oleh lingkungan industri yang sangat cepat, di mana juga diikuti oleh perkembangan pasar uang dan konsekuensi dari reliabilitas informasi akuntansi, lanjut Zaroni (1998), mengakibatkan pendekatan *proprietary theory* menjadi tidak sesuai lagi. Muncullah kemudian konsep *entity theory*, yang mengarahkan pusat perhatiannya pada unit ekonomi, pembedaan dan pemisahan kepemilikan.

3.3. ENTITY THEORY

Kata *entity* menurut *Pocket Oxford Dictionary March 1994* (1994) edisi *online* berasal dari kata latin *ens* atau *ent*. Kata *entity* sendiri diartikan sebagai "*thing with distinct existence*". *Entity* dalam *Oxford Dictionary* (2003) diartikan sebagai "*something that has a separate existence*". Terjemahannya dalam bahasa Indonesia menurut Oxford-Erlangga (Hawkins 1999) *entity* diartikan sebagai "wujud, kesatuan atau ada".

Konsep *entity theory* menganggap entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak penanam modal dalam perusahaan. Unit usaha menjadi pusat perhatian yang harus dilayani, bukannya pemilik. Entitas dikonsepsikan memiliki eksistensi terpisah (Lorig 1964; Kam 1990; Belkaoui 2000; Suwardjono 2006). Paton mendeskripsikan *entity theory* dalam dua asumsi dasar. **Pertama**, investasi dan keputusan finansial adalah independen. **Kedua**, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh tipe atau berbagai tipe modal dalam struktur modal (Clark 1993). Penjelasannya, lanjut Paton (Clark 1993, 15) adalah:

.the particular source, or sources, of capital have no effect on company performance. If debt is substituted for stock, the cost of factors of production remains the same. Operation profits are unaffected by the amount of leverage in the corporate capital structure. As a result, a firm's leverage ratio does not impact firm value and is therefore irrelevant for investor decision making.

Eksistensi yang terpisah dalam teori ini merupakan sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak yang menyediakan modal pada entitas. Unit bisnis, bukan pemilik, merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab kepada pemilik maupun kreditor. Persamaan akuntansi dari konsep *entity theory* sebagai berikut:

Asset = Equity

Asset = Liability + Stockholder's Equity

Asset adalah hak perusahaan, *equity* merupakan sumber aset yang dapat berasal dari kreditor atau pemilik yang merupakan kewajiban entitas. Kreditor dan pemilik sebenarnya adalah pemilik perusahaan yang merupakan tempat di mana entitas memiliki kewajiban. *Entity theory* berorientasi pada *income* atau *income oriented* atau *income statement oriented*. Akuntabilitas pada pemilik dilakukan dengan cara mengukur prestasi kegiatan dan prestasi keuangan yang ditunjukkan oleh entitas atau perusahaan. *Income* adalah kenaikan ekuitas atau kenaikan kewajiban entitas kepada pemilik. Setelah dikurangi hak kreditor kenaikan ekuitas pemilik terjadi setelah dividen dikeluarkan dan laba ditahan tetap dianggap sebagai hak milik entitas sampai suatu saat dibagikan. Pajak dan bunga dianggap sebagai bagian laba untuk pemerintah dan kreditor, dan oleh karena itu bukan biaya (Kam 1990; Harahap 2002).

Entity theory berbeda dengan konsep *proprietary* yang menganggap pajak dan bunga sebagai biaya. Bentuk laporan keuangan awal yang penting menurut *entity theory* terdiri dari 3 laporan, yaitu *Income Statement*, *Statement of Retained Earnings* dan *Balance Sheet*⁶⁷ sebagai berikut:

Tabel 4. *Financial Statement Versi Entity Theory*

Theoretical Company Income Statement For the Year 1992		
Sales		100,000
Cost of Sales		55,000
Gross Margin		<u>45,000</u>
Operating Expenses		22,000
Operating Income		<u>23,000</u>
Interest Expense		8,000
Income Before Tax		<u>15,000</u>
Income Tax		4,100
Net Income		<u>10,900</u>
Statement of Retained Earnings For the Year 1992		
Beginning Balance		28,200
Net Income		10,900
Dividends:		
Preferred Stock	1,000	
Common Stock	<u>3,000</u>	<u>(4,000)</u>
Ending Balance		<u>33,100</u>
Balance Sheet December 31, 1992		
Assets		
Current Assets		88,000
Long-Term Assets		171,000
Total Assets		<u>260,000</u>
Liabilities & Owners' Equity		
Current Liabilities		31,900
Long-Term Liabilities		85,000
Total Liabilities		<u>116,900</u>
Preferred Stock	10,000	
Common Stock	100,000	
Retained Earnings	<u>33,100</u>	
Total Owners' Equity		<u>143,100</u>
Total Liabilities & Owners' Equity		<u>260,000</u>

⁶⁷ Bentuk laporan ini menurut Clark (1993) merupakan bentuk awal berdasarkan format tradisional. Bentuk laporan versi Paton (1922) masih sama, yaitu dengan 3 laporan, meskipun bentuknya sedikit berubah. Untuk lebih detail lihat Clark (1993). Sebagai bahan perbandingan dapat dilihat pula perkembangan bentuk laporan keuangan dari APB Statement, ASOBAT sampai FASB yang telah menambahkan satu laporan keuangan penting yaitu *Cashflow Statement* (CFS). Untuk penjelasan detail mengenai CFS dapat dilihat pada Bab 1 penelitian ini.

Konsep *entity theory* dalam perjalanannya telah mengalami perubahan-perubahan konseptual. Di antaranya dapat disebutkan di sini, perubahan *entity theory* menjadi *residual equity theory* yang diusulkan oleh Paton (1959) dan menjadi *investor theory* yang diusulkan Staubus (1961). Menurut Paton (1959) dalam Harahap (2002, 75) yang menjadi penekanan adalah *residual equity* dari pemegang saham biasa (*common stockholders*). *Residual equity* bukan untuk semua pemilik tetapi khusus untuk pemegang saham biasa. Di luar pemilik saham biasa dianggap sebagai kreditur. Dalam konsep *investor theory*, menurut Staubus (1961), fungsi akuntansi dan laporan keuangan seharusnya diarahkan pada kepentingan investor. Investor adalah *stockholders* dan kreditur (Kam 1991, 313). Perbedaan *investor theory* dengan *proprietary theory* terutama terletak pada kepentingannya terhadap investor. *Proprietary theory* menempatkan investor sebagai *owner* dan memiliki kekuatan yang besar dalam perusahaan. Di sisi lain, *investor theory* melihat *stockholders* memiliki kekuasaan terbatas karena dianggap berada di luar entitas perusahaan. Karena fokusnya pada investor, *investor theory* membutuhkan informasi mengenai aliran kas pula. Pengaruh *investor theory*, ditegaskan Kam (1991, 314), nampak pada SFAS No. 1 yang dikeluarkan FASB, di mana investor membutuhkan informasi untuk memprediksi aliran kas yang secara eksplisit diakui.

Berbeda dengan *proprietary theory*, *entity theory* tidak berhubungan dengan nilai sekarang karena penekanannya adalah akuntabilitas *cost* kepada pemilik atau pemegang saham lainnya. Dengan demikian dasar pengukuran yang relevan adalah *historical cost*. Meskipun *entity theory* adalah hasil evolusi dari *proprietary theory*, namun bila diinterpretasikan secara kritis dalam konteks kepemilikan, sebagian besar muatannya seperti dijelaskan oleh

Triyuwono (2002b) tetap berbasiskan pada aspek-aspek ideologis yang sama dengan konsep utama dari *proprietary theory*. *Entity theory* memiliki kepentingan yaitu informasi akuntansi sebesar-besarnya untuk pemilik modal, agar dapat mengetahui dan mempertahankan modal yang ditanam (*capital maintenance*) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal. Bahkan yang lebih krusial lagi, lanjut Triyuwono (2002b, 5):

akuntansi menjadi kendaraan yang dikuasai oleh pemilik modal (dalam sistem ekonomi kapitalis) dimana kekuasaan tunggal ekonomi berada pada tangan kapitalis. Akuntansi akhirnya cenderung memperkuat budaya eksploitatif, bukan hanya pada *stakeholders*, tetapi juga eksploitasi alam.

Triyuwono (2002b, 5) menjelaskan bahwa sebenarnya model bisnis kontemporer sekarang ini sangat berbeda dengan model bisnis masa lalu. Artinya, keberlangsungan hidup perusahaan tidak lagi ditentukan sendiri oleh pemilik, tetapi banyak sekali dipengaruhi oleh banyak pihak seperti pelanggan, kreditor, manajemen, pegawai, pemasok, pemerintah dan lain-lain (disebut *stakeholders*) yang juga sama-sama memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Oleh karena itu, menurut Triyuwono (2002b, 6) kedua teori tersebut tidak akan mampu mewartakan kemajemukan *stakeholders* dan percepatan bisnis yang ada saat ini, dan untuk mengatasi hal ini diperlukan alternatif yang tepat dan sesuai lingkungannya, yaitu *enterprise theory*.

3.4. ENTERPRISE THEORY

Suojanen (1954) memformulasikan perusahaan dalam kerangka *enterprise theory*. Perusahaan dipandang sebagai bagian dari komunitas sosial. Institusi dimana keputusan yang dibuat

dipengaruhi oleh berbagai kelompok, tidak terbatas pada *shareholders*. *Enterprise theory* melihat bahwa peran akuntansi dalam perusahaan dan entitas pengambilan keputusan adalah membuat laporan untuk didistribusikan pada berbagai kelompok yang berkepentingan.

Pusat perhatian *enterprise theory* adalah keseluruhan pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan atau entitas, misal pemilik, manajemen, masyarakat, pemerintah, kreditur, fiskus, regulator, pegawai, langganan dan pihak yang berkepentingan lainnya (Harahap 2002, 74). Dalam *enterprise theory*, pihak-pihak yang memiliki kepentingan harus diperhatikan dalam penyajian informasi keuangannya, bukan hanya mementingkan informasi bagi pemilik, tetapi juga pihak lainnya yang memberi kontribusi langsung maupun tidak langsung kepada eksistensi perusahaan atau lembaga (Harahap 2002, 75). Semua partisipan menanggung segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai *stakeholders* yang terdiri atas manager, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Perusahaan berfungsi sebagai alat, pengikat atau pusat (*nexus*) kegiatan (Suwardjono 2006, 496).

Pandangan *enterprise theory* dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para *stakeholders* secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan.

Tujuan perusahaan menurut konsep *enterprise theory* adalah dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada beberapa kelompok orang yang berkepentingan terhadap perusahaan. *Enterprise theory* dengan demikian jelas berbeda dengan *proprietary theory* dan *entity theory*. *Proprietary theory* dan *entity theory* menurut Suojanen (1954) menekankan laporan laba rugi karena berorientasi pada klaim atas *income*. Bahkan, lanjutnya:

The Entity theory substitutes the personality of the entity for the personality of the proprietor and thus neatly solves the problem of perpetual succession. The shareholders are, in effect, considered to be no different from other creditors except that their claims appear below the others on the balance sheet.

Enterprise theory lebih luas perhatiannya daripada hanya kepada entitas karena perusahaan sebenarnya berhubungan dengan institusi yang ada di luar dirinya. Perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dan bahkan tidak dapat eksis tanpa realitas masyarakat di luarnya. Berdasarkan hal tersebut, *enterprise theory* menurut Suojanen (1954) lebih mementingkan konsep *Value Added* (VA) untuk pengukuran *income*, sebagai jalan bagi manajemen untuk melaksanakan tugas akuntansi bagi berbagai kelompok kepentingan dengan memberikan informasi yang lebih baik daripada laporan neraca dan laba rugi. VA lanjut Suojanen tidak sama dengan produksi *income*.

3.4.1. *Value Added*

Value Added adalah ukuran *performance* entitas ekonomi yang memiliki sejarah panjang pada aplikasinya dalam ilmu ekonomi

(Haller dan Stolowy 1995). *Value Added* merupakan konsep utama dari pengukuran *income*. Konsep *Value Added* secara tradisional berakar pada ilmu ekonomi makro, terutama berhubungan dengan penghitungan pendapatan nasional. VA diukur dengan *performance* produktif dari ekonomi nasional yang biasanya dinamakan produk nasional atau produk domestik. Pendapatan nasional merepresentasikan nilai tambah perekonomian nasional dalam periode spesifik. Penggunaan secara universal konsep *Value Added* juga telah banyak didiskusikan dan dipraktekkan sebagai kegunaan ekonomis dan indikator *performance* dalam area berbeda dari ilmu ekonomi dan bisnis⁶⁸.

3.4.2. Value Added Statement

Jika *enterprise theory* merupakan bentuk yang dibutuhkan secara kelembagaan, menurut Suojanen (1954) operasi yang terjadi kemudian haruslah mengarah pada pembentukan kontribusi yang menjadi aliran output pada komunitas. Jika hasil *income* dalam *enterprise theory* merupakan dasar kebijakan sosial, maka *Income Statement* (IS) menjadi tidak sesuai lagi. Tujuan konsep *Value Added* dalam *income enterprise* adalah ukuran aliran dan pembagiannya di antara partisipan organisasi. Jika akuntansi adalah untuk mengukur kontribusi perusahaan pada masyarakat, sebagai ukuran profitabilitas, maka konsep analisis *national income* dapat digunakan untuk menggagas *Value Added Statement*. Berikut *Value Added Statement* usulan Suojanen (1954):

⁶⁸ Penjelasan detail mengenai konsep value added dapat dilihat dalam Mulawarman (2006a, bab 5).

Tabel 5. Value Added Statement

Goods Produced at selling price	xxx	
Less Purchases of Goods and Services	xxx	
Total Value Added by Production		xxx
Distribution		
Wages and Salaries		xxx
Taxes		xxx
Interest		xxx
Depreciation		xxx
Profit		xxx
Total Value Added		xxx

Sumber: Suojanen (1954, 396) dimodifikasi

Memang *Value Added Statement* merupakan pengukuran kinerja yang lebih luas daripada *net income*. VAS tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*. Konsep *income* seperti ini mendasari “konsep perusahaan” sebagai gabungan berbagai *stakeholders*.

Menurut Meek dan Gray (1988, 185-186) *Value Added Statement* dapat berguna dalam empat hal. Pertama, untuk mengukur penciptaan kekayaan oleh perusahaan. *Value Added Statement* memfokuskan perhatiannya pada keberhasilan perusahaan dalam menciptakan kekayaan, mendistribusikan *income* kepada publik. Kedua, menekankan pada interdependensi *stakeholders* berkaitan dengan dampak interaksi pengambilan keputusan dari anggota *stakeholders*. Ketiga, *Value Added Statement* memberikan pengkondisian ekspektasi dan prospek penerimaan

karyawan. Keempat, *Value Added Statement* dapat menjadi bentuk dasar skema insentif produktifitas.

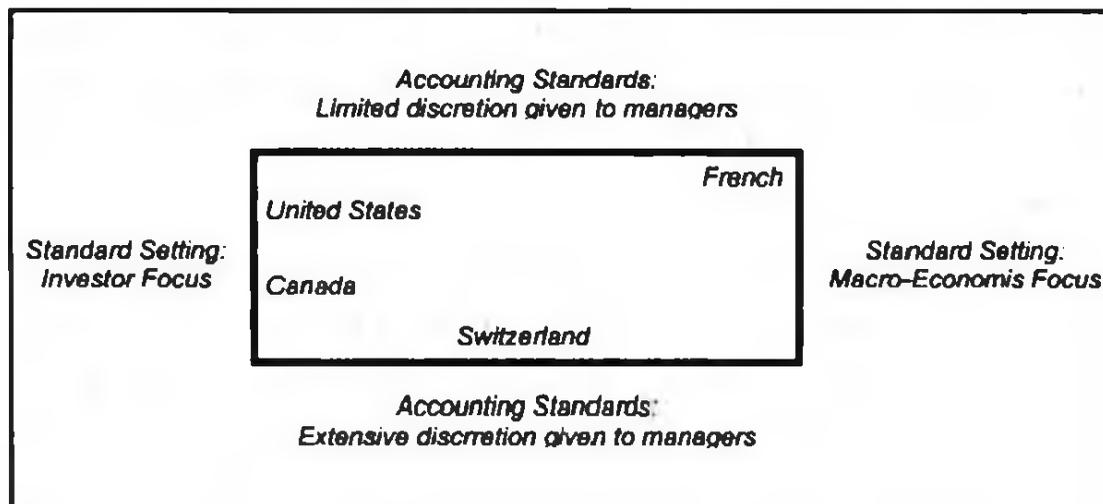
Usulan menarik adalah yang dikemukakan Firer (2004) mengenai *Value Added Statement*, yaitu perlunya *Value Added Statement* sebagai bagian dari *Financial Statement* dan bukannya sebagai *Supplement Statement*. Tahun 1975, *The Accounting Steering Committee* (ASC) di Inggris merekomendasikan perusahaan memasukkan *Value Added Statement* hanya sebagai data suplemen (Hopwood *et al.* 1994; Meek dan Gray 1988; Kam 1990, 315). Alasan yang mendasari ASC merekomendasikan publikasi *Value Added Statement* adalah *profit* memang merupakan bagian esensial pada ekonomi pasar, dan *profit* adalah bagian dari *Value Added Statement*. Dari *Value Added* pasti memunculkan upah, dividen dan *interest*, serta pajak dan *funds* untuk investasi baru. Saling keterkaitan inilah yang menyebabkan pentingnya pengungkapan *Value Added Statement*.

Sejak tahun 1975, memang terjadi peningkatan pengungkapan *Value Added Statement* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Inggris. Setelah tahun 1985, Hopwood *et al.* (1994) melakukan penelitian berdasarkan prediksi mereka bahwa tahun 1981 akan terjadi penurunan kemauan perusahaan untuk melaporkan *Value Added Statement* ketika terjadi perubahan peta sosial-politik di Inggris. Hasilnya, ternyata setelah tahun 1980, terjadi deklinasi tren pengungkapan VAS di Inggris.

Value Added Statement banyak dipakai di Eropa (seperti Perancis dan Jerman misalnya) karena memang fokus dari *standard setting* lebih menekankan pada makro ekonomi (Cormier *et al.* 1999). Penjelasan Corneier *et al.* (1999) ini sesuai hasil penelitian mereka mengenai *information usefulness*, bahwa orientasi *Financial Reporting* perusahaan-perusahaan di Perancis memang didominasi

oleh akun yang bersifat makro dan nasional, dan tidak menekankan kebutuhan bagi investor. Berbeda dengan *standard setting* di Amerika Serikat dan Canada, yang memang berorientasi pada investor. Amerika Serikat dan Canada tidak merasa perlu melakukan pengungkapan selain *Income Statement*, *Balance Sheet* dan *Cash Flow Statement*. Tiga laporan tersebut dianggap mewakili kepentingan investor. Cormier, *et al.* (1999) menggambarkan hubungan posisi kepentingan *standard setting* dan standar akuntansi yang diberlakukan di Perancis, Amerika Serikat, Canada dan Switzerland seperti di bawah ini:

Gambar 4. *Financial Measurement and Reporting Environments*



Sumber: Cormier *et al.* (1999,6)

Staden (2002) mereview hasil penelitian Gray dan Maunders (1980) tentang publikasi *statement* di seluruh dunia. *Review* ini mengindikasikan bahwa beberapa negara di Belanda, Perancis dan Jerman mengarah pada data *Value Added*. Hasilnya adalah terjadinya pertumbuhan yang instan dalam publikasi *Value Added Statement* di beberapa negara seperti Denmark, Swiss dan Italia, sedangkan di AS dan Canada, seluruh perusahaan-perusahaan tidak mempublikasikan *Value Added Statement*.

Buritt dan Clarke (1984) dalam Staden (2002) melaporkan bahwa pendekatan Australia pada pengungkapan *Value Added* sangat berhati-hati, tidak terlihat seperti semangat yang muncul di Inggris. Beberapa perusahaan di Australia mempublikasikan *Value Added Statement* (8 dari 100 perusahaan papan atas tahun 1982) sebagai suplemen reguler pada pencatatan tradisional. Matthews dan Perera (1996) dalam Staden melaporkan bahwa di New Zealand beberapa perusahaan mempublikasikan *Value Added Statement* sebagai bagian dari *financial statement* mereka.

Afrika Selatan berdasarkan penelitian Staden (2002) melihat kepentingan terhadap *Value Added Statement* dimulai saat dipublikasikannya *The Corporate Report* tahun 1975. Tahun 1977 perusahaan yang mempublikasikan hanya enam dari 100 perusahaan terkemuka (SAICA 1981). Tidak seperti di Inggris, dimana kejadian publikasi mulai surut sejak 1980, di Afrika Selatan perusahaan-perusahaan yang mempublikasikan *Value Added Statement* meningkat menjadi 75 dari 100 perusahaan pada 1990 (Stainbank 1992). Bernard dan De Viliers (2000) mencatat 48% dari 526 perusahaan yang *listing* di JSE⁶⁹ mempublikasikan *Value Added Statement* pada 1998 (meningkat dari 33% pada 1994). Pada 1999, 77% dari 100 perusahaan terkemuka di sektor industri yang *listing* di JSE mempublikasikan *Value Added Statement* sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan (77% pada 1994 dan naik menjadi 86% pada 1998) (Bernard dan De Viliers 2000).

3.4.3. Realitas *Enterprise Theory* dan *Value Added Statement*

Dalam perjalanannya, menurut Rosenfield (2005) *enterprise theory* secara tak sadar telah menjadi konsensus sebagai konsep dasar

⁶⁹ Johannessberg Stock Exchange

teoritis. Purdy (1983) dalam artikelnya menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang namanya *General Theory of Accounting*. Sanggahan Purdy (1983, 531) adalah sebagai berikut:

At the same time it can be accepted there is no general theory of accounting, but a variety theories which cannot be fitted into any one framework of accounting (Gynther, 1967). An individual theory appears to provide the necessary framework (or excuses according to Watts and Zimmerman)) to those who use it, and in providing a framework the theory gives service.

Menurut Horngren (1957) konsep dasar teoritis *proprietary theory* dan *entity theory* sebenarnya sudah tidak dapat dipergunakan secara utuh dan bahkan cenderung kontradiktif dengan realitas empiris dan praktis di lapangan. Horngren (1957) menjelaskan bahwa sebenarnya terdapat inkonsistensi konsep *entity theory* dalam perlakuan akuntansi berkaitan dengan *stock dividend*. Masih diperlukan revisi atas konsep *entity theory* agar dapat dipakai sebagai konsep dasar teoritis yang utuh. Lorig (1964) menunjukkan masalah *entity theory*, seperti tidak realistiknya hubungan antara entitas akuntansi dan pemilik, dan lebih utama lagi hubungan dengan kreditor yang tidak ter-*'cover'* secara jelas. Menurut Clark (1983) Paton mendeskripsikan *entity theory* mirip pandangan teori struktur modal yang digagas oleh Modigliani dan Miller (1958), jauh sebelum berkembangnya teori struktur modal modern. Clark (1993) bahkan melakukan penelusuran dan berkesimpulan, sebenarnya terdapat perbedaan signifikan antara *debt* dan *equity*. Hal ini otomatis berpengaruh terhadap landasan utama *entity theory*.

Suojanen (1954) sebagai penggagas *enterprise theory*, menegaskan bahwa konsep dasar *entity theory* tidak dapat dipakai secara utuh oleh perusahaan, ketika perusahaan tumbuh makin

besar dan tidak mungkin tidak melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Perusahaan tidak dapat menutup diri dari pengaruh lingkungan sosial di sekitarnya. Bahkan menurut Purdy (1983) saat ini telah terjadi tekanan yang makin kuat yang ditujukan pada organisasi untuk melakukan perubahan-perubahan, seperti misalnya perusahaan publik yang harus melaporkan *Annual Employee Report*. Dalam akuntansi konvensional saat ini, *Value Added Statement* sebenarnya masih menjadi bentuk pengungkapan tambahan atau yang diperluas. Disinyalir oleh Steyn dan Hamman (2002), bahwa *Value Added Statement* sebenarnya memiliki muatan yang dinamis, tetapi hingga saat ini masih merupakan bagian yang diabaikan dari *financial reporting*.

Value Added Statement juga hanya merupakan bentuk lain dari *Income Statement*. *Value Added Statement* memang memberikan informasi baru tentang distribusi kepada *stakeholders*, tetapi *stakeholders* sebagai *social dimension*⁷⁰ atau *social aspect*⁷¹ juga sebenarnya telah di-cover dalam *Income Statement*. Tetapi perlu diketahui pula bahwa *Value Added Statement* belum mengungkapkan aspek eksternalitas, seperti dikritisi Ormerod (1994); atau keluasan akuntabilitas seperti diungkapkan Triyuwono (2002b) dengan istilah *indirect participants*, atau keluasan dimensi sosial yang diharapkan Sulaiman dan Willett (2003).

Value Added Statement ternyata juga ditekankan untuk menunjukkan muatan 'informasi politis' bagi kepentingan perusahaan dalam meyakinkan penggunaannya. Dengan pengungkapan *Value Added Statement*, perusahaan dianggap telah memberikan kesejahteraan yang besar terhadap karyawan serta respon sosial perusahaan. Motivasi dari *disclosure Value Added*

⁷⁰ Istilah yang dikemukakan oleh Matthews dan Perera (1996)

⁷¹ Istilah yang dikemukakan oleh Haller dan Stolowy (1985)

Statement sebenarnya juga masih bersandar pada *principal-agent model* dari *agency theory* (Staden 2000). Temuan-temuan penelitian Staden (2000) juga memperlihatkan bahwa *legitimacy theory* dan *political economy theory* lebih sebagai motivasi publikasi *Value Added Statement*. Kejadian yang ditemukan mendukung kegunaan *Value Added Statement* untuk melegitimasi aksi yang dilakukan dan perilaku perusahaan daripada melaporkan secara obyektif pada masalah sosial. Dalam istilah *political economy theory*, lanjut Staden (2000), *Value Added Statement* digunakan untuk melegitimasi hubungan yang berlangsung antara modal dan buruh dalam usahanya untuk menghalangi serikat buruh yang makin kuat. *Value Added Statement* dapat direpresentasikan sebagai gambaran yang tidak lengkap dari hubungan kompleks antara perusahaan dan masyarakat.

Bahkan saat ini, *Value Added* yang merupakan substansi dari *Value Added Statement* juga telah menjadi wacana dari pentingnya *performance* perusahaan dalam konteks nilai pasar dari perusahaan dengan mengeksploitasi *Value Added* dalam wacana *Intellectual Capital* seperti ditulis Firrer dan Williams (2003) dan Chen *et al.* (2004). Mereka menyebut *Value Added* sebagai *Value Added Intellectual Capital* (VAIC). Alasan yang diajukan Firrer dan Williams (2003) adalah bahwa VAIC yang berbasis konsep *Value Added* dibutuhkan untuk kepentingan kinerja perusahaan. Chen *et al.* (2004) lebih lanjut mengemukakan bahwa VAIC diperlukan untuk memberikan kekuatan *explanatory* yang sangat substansial dalam penentuan *market value* atau nilai pasar (Chen *et al.* 2004). Berkaitan pentingnya keseimbangan “kekuasaan” dan “distribusi” kekayaan maupun *income* dalam akuntansi, berkembanglah apa yang biasanya disebut *Corporate Social Reporting*.

3.5. CORPORATE SOCIAL REPORTING

Corporate Social Responsibility menurut Hackston dan Milne (1996) merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, perluasan tanggung jawab sosial perusahaan di samping melakukan penyediaan informasi pada pemilik modal atau pemegang saham dan kreditor, juga melakukan pertanggungjawaban yang lebih luas (Gray *et.al.* 1987). Parsa dan Kouhy (2005) mempertegas apa yang dimaksud perluasan ini sebagai bentuk kontrak sosial.

Perkembangan *social accounting* dan representasinya berbentuk *Corporate Social Reporting* (CSR) mayoritas pemikiran di dalamnya didominasi aliran *Middle Ground*. *Middle Ground* adalah aliran pemikiran CSR yang masih mempertahankan *status quo* akuntansi tradisional. Sifat tradisional tersebut dapat dilihat dari bentuk laporan keuangan yang selama ini hanya menangkap sinyal realitas sosial terbatas yang terjadi dalam kehidupan organisasi perusahaan dan mengabaikan *externalities* (Gray, *et al.* 1996, 298).

Pelaporan akuntansi aliran *middle ground* menempatkan kepentingan sosial dan lingkungan hanya sebagai *voluntary disclosure*. *Voluntary disclosure* dengan indikator selengkap dan setebal apapun tetap akan menempatkan pelaporan sosial dan ekonomi menjadi konsep sebab akibat. Gray (2006) juga melihat pendekatan akuntansi sosial-ekonomi berbasis *business as usual* (pendekatan ekonomi tambal sulam) maupun berbasis *Triple Bottom Line* memiliki hasil yang tidak jauh berbeda. Laporan keuangan perusahaan memang secara formal telah memiliki

kepedulian sosial dan lingkungan, kenyataannya laporan keuangan tidak berdampak apapun pada tingkat keberlanjutan dan ekologis secara empiris di lapangan. Kehancuran lingkungan, kehancuran sistem sosial maupun alienasi individu tetap saja meningkat seiring peningkatan pelaporan perusahaan yang “katanya” peduli sosial dan lingkungan. Pendekatan audit formal laporan keuangan juga tidak memiliki korelasi langsung dengan perbaikan individual, sosial maupun lingkungan yang makin lama makin rusak dan hancur. Karena *formal audited* hanya dapat mendeteksi laporan keuangan formal yang dilakukan perusahaan, tidak terdapat mekanisme lanjutan yang dapat mendeteksi apakah laporan keuangan tersebut sesuai dengan realitas. Realitas individual, sosial maupun lingkungan tidak dapat tersajikan secara benar dalam bentuk laporan keuangan sosial dan lingkungan yang kuantitatif. Realitas individual, sosial dan lingkungan yang konkrit hanya dapat dideskripsikan dengan bentuk laporan keuangan kualitatif khas, laporan kualitatif empatik.

3.5.1. Alternatif domain baru CSR menuju *Deep Ecology*

Perbedaan antara kalangan *Middle Ground* dan *Non-Middle Ground* menurut Mulawarman (2006a, 184) terletak pada keluasan akuntabilitas. *Middle Ground* tetap mempertahankan *status-quo* akuntansi konvensional atau tradisional saja. CSR hanya sebagai perluasan yang bersifat *supplement*. *Non-Middle Ground* melakukan perluasan dan kritik terhadap akuntansi konvensional dengan mengganti Laporan Keuangan menjadi laporan keuangan CSR sebagai bentuk *mandatory*. Tetapi keduanya masih tetap pada konsepsi materi. Perluasannya adalah pada konsepsi pengukuran finansial dan non-finansial. Nilai-nilai non materi tidak pernah

terdeteksi. Meskipun pemikiran konsepsi materi aliran *non middle ground* telah beralih dari *environmentalism* berbasis *self-interest* (antroposentris) menuju *deep-ecology*.

Environmentalism pada dasarnya merupakan pandangan peduli lingkungan tetapi lebih dekat pada pendekatan teknis atau ekonomis. Pandangan environmentalism bercabang pada dua tekanan. Pandangan pertama melihat kerusakan lingkungan sebagai perubahan fungsi karena masuknya zat asing dalam lingkungan melalui kemampuan alamiahnya mengatasi persoalan. Solusi yang ditawarkan bersifat teknis dan mengandalkan instrumen ilmu dan teknologi. Pandangan kedua mengatakan bahwa kerusakan lingkungan akibat *external cost* dari kegiatan ekonomi yang mengakibatkan kegagalan pasar. Tetapi keduanya ditegaskan Zaidi (1994, 22) tetap menempatkan manusia di atas alam (antroposentrisme).

Deep ecology atau ekologi dalam menurut Capra (1996, 6) adalah *shift paradigm* dari pandangan *environmentalism* seperti dijelaskan di atas. *Environmentalism* disebut Capra (1996, 7) sebagai *Shallow ecology* atau ekologi dangkal yang bersifat antroposentris. *Deep ecology* tidak memisahkan manusia atau apapun dari lingkungan alamiah. Benar-benar melihat dunia bukan sebagai kumpulan obyek-obyek yang terpisah tetapi sebagai jaringan fenomena yang saling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain secara fundamental. *Deep ecology* mengakui nilai intrinsik semua makhluk hidup dan memandang manusia tak lebih dari satu untaian dalam jaringan kehidupan. Bahkan dikatakan Capra (1996,8) *deep-ecology* sebenarnya kesadaran ekologi yang pada akhirnya mengarah pada kesadaran spiritual atau religius. Berikut penjelasan Capra mengenai religiusitas pada *deep ecology*.

Ketika konsep tentang jiwa manusia dimengerti sebagai pola kesadaran di mana individu merasakan suatu rasa memiliki, dari rasa berhubungan, kepada kosmos sebagai suatu keseluruhan, maka jelaslah kesadaran ekologis bersifat spiritual dalam esensinya yang terdalam... kesadaran ekologis yang mendalam ini konsisten dengan filsafat perennial yang berasal dari tradisi-tradisi spiritual, baik spiritualitas para mistikus Kristen, mistikus Buddhis, atau filsafat dan kosmologi yang mendasari tradisi-tradisi Amerika Pribumi.

Pemikiran Capra seperti dijelaskan juga dalam Bab 1 memang telah melakukan perubahan pada tataran spiritualitas tetapi terbatas pada kesadaran siklik dalam realitas *self-interest* antroposentris menuju realitas ekologis alam semesta.

Dalam Appendix edisi keempat *The Tao of Physics* tahun 1999 (setelah dua puluh lima tahun terbitnya buku tersebut pertama kali), Capra memberikan penegasan kembali mengenai Makna Spiritualitas dari Paradigma Baru yang digagasnya untuk mengganti Sains Modern:

Spiritualitas yang terkait dengan visi baru realitas yang telah saya uraikan secara garis besar di sini kemungkinan besar merupakan suatu spiritualitas yang ekologis, berorientasi kebumian, dan postpatriarkal.

Bentuk *Deep Ecology* dalam akuntansi dapat dilihat dari penelitian Gray (2006). Gray (2006) melihat akuntansi dan pelaporan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan (*social, environmental sustainability accounting and reporting*) selama ini tidak benar-benar berakar dari konsep *sustainability* (keberlanjutan) dan

ecological (ekologis). Pelaporan dan konsep akuntansi yang ada hanyalah sebagai pelengkap dan legitimator perusahaan, bahwa perusahaan memang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Kepedulian hanyalah “baju” dan bukan “hati” perusahaan. Baju ekologis dan keberlanjutan sebagai representasi kepedulian *stakeholders* digunakan sebagai “kedok” orientasi perusahaan untuk kepentingan *shareholders*. Mengapa itu terjadi? Hal itu terjadi karena menurut Gray (2006) pelaporan keuangan selama ini berbasis pada “*pristine liberal economic democracy*”, yaitu pandangan moral *self-interest* dengan kepentingan kekuasaan ekonomi liberal sebagai titik tolak. Akibat basis pemikiran ekonomi liberal telah menempatkan kekuasaan ekonomi berada pada investor rasional (dalam pasar keuangan) yang dengan itu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat untuk semua. Basis pemikiran liberal kemudian memunculkan apa yang kemudian dinamakan *Trickle Down Theory*.

Aplikasi dari *social accounting* lebih menekankan arti penting dari laporan kualitatif dan statistik deskriptif untuk melihat bagaimana organisasi melaporkan aktivitasnya kepada *stakeholder* mereka. Bukan lagi mengaplikasikan laporan-laporan tersebut sebagai *supplement* dari laporan keuangan yang ada tetapi menjadi *supplant* (pengganti) serta memiliki kedudukan yang sama dengan laporan keuangan yang dominan saat ini. Richmond, *et al.* (2003; 2005) misalnya memberikan alternatif pengganti laporan keuangan dengan tiga model *statement* baru. Bentuk neraca terintegrasi untuk kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan diusulkan Dorweiler dan Yakhou (2005) yang dinamakan *Environmental Balance Sheet*. Berikut bentuk Neraca Lingkungan Dorweiler dan Yakhou (2005):

Tabel 6. Neraca Lingkungan Menurut Dorweiler dan Yakhou (2005)

ASSETS	LIABILITIES
Current Assets Account Receivable Inventory Property Claims Fixed Assets Equipment Buildings Land Intangible Assets Leases & Rights Intellectual Property Corporate Contracts Corporate Green Image Goodwill	Current Liabilities Annual authorization Civil Fines Criminal Fines Long Term Liabilities Contingent Liabilities Contract Liabilities Land Remediation Stakeholders Equity Contributed Equity Accumulated Effects

Sumber: Dorweiler dan Yakhou (2005, 21)

Beberapa hal penting dari Neraca Lingkungan versi mereka adalah, misalnya elemen ekuitas menurut mereka dalam neraca lingkungan di atas menempatkan responsibilitas lingkungan lebih luas untuk *maintainance* posisi ekuitas pada kepentingan keseimbangan pengembangan ekuitas lingkungan. Ekuitas tidak hanya ditekankan pada posisi *stockholders* saja, tetapi diperluas pada posisi *stakeholders*. Elemen *Liabilities* lingkungan menurut mereka ditekankan pada kepatuhan menjalankan regulasi lingkungan. Elemen *asset* juga menekankan pada *fixed assets* yang memenuhi persyaratan *control equipment* dan berbasis lingkungan serta meningkatkan kualitas yang diakomodasi dalam *intangible assets*.

3.6. RINGKASAN

Proprietary theory muncul pada saat organisasi bisnis waktu itu masih lebih banyak bersifat individual dan terpusat pada pemilik

sekaligus pelaksana aktivitas perusahaan. Gaya perusahaan seperti itu mengarahkan akuntansi untuk menjadi representasi kepentingan ekonomi pemilik dan eksistensinya hanya untuk meningkatkan *net equity's value*. Perkembangan perusahaan-perusahaan yang makin besar dan dipengaruhi oleh lingkungan industri yang sangat cepat, serta perkembangan pasar uang dan konsekuensi dari reliabilitas informasi akuntansi, mengakibatkan pendekatan *proprietary theory* menjadi tidak sesuai lagi.

Muncullah kemudian konsep *entity theory*, sebagai hasil dari evolusi *proprietary theory* yang mengarahkan pusat perhatiannya pada unit ekonomi, pembedaan dan pemisahan kepemilikan. *Entity theory* memiliki kepentingan mengenai informasi akuntansi sebesar-besarnya untuk pemilik modal, agar dapat mengetahui dan mempertahankan modal yang ditanam (*capital maintenance*) sekaligus mendapatkan laba yang maksimal.

Pada waktu hampir bersamaan dengan munculnya *entity theory*, berkembang pula konsep dasar teoritis akuntansi lain yang memiliki penekanan berbeda. *Enterprise theory* dilandasi oleh gagasan bahwa perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh ekonomis luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Perusahaan tidak dapat lagi dijalankan untuk kepentingan pemegang saham semata-mata. Walaupun para pemegang saham mempunyai hak yuridis sebagai pemilik, kepentingan para *stakeholders* secara bersama demi berlangsungnya dan kemakmuran perusahaan harus didahulukan. Implikasi *enterprise theory* akhirnya mengarah pada perubahan konsep *income*, terutama pada perubahan bentuk *income* berbasis nilai tambah *value added*.

Penerapan *enterprise theory* berlanjut dengan adanya kesadaran atas tanggungjawab sosial perusahaan. Tanggungjawab

sosial perusahaan kemudian tidak hanya melakukan perubahan pada konsepsi income konvensional menjadi *value added* dengan laporannya yaitu *value added statement*. Akuntansi sosial bahkan melangkah lebih jauh dengan adanya usulan pelaporan dan pengungkapan perusahaan berbasis sosial dan lingkungan.

Pembahasan berbagai konsep dasar teoritis akuntansi konvensional di bab ini telah memberikan gambaran bagaimana posisi konsep dasar teoritis menjiwai akuntansi. Bila dirunut secara kronologis, akuntansi konvensional telah mengalami perubahan-perubahan signifikan sesuai realitas dimana akuntansi berada dan berkembang. Realitas tersebut bukan hanya bersifat internal (organisasi dan pelakunya) tetapi juga bersifat eksternal (lingkungan di luar organisasi). ■

BAB 4

KONSEP DASAR TEORITIS AKUNTANSI SYARI'AH BERBASIS SHARI'AT ENTERPRISE THEORY

*Peradaban tak dapat ditolak meskipun kita ingin menolaknya.
Yang bisa dan harus kita lakukan adalah menghancurkan
mitosnya.*

(Alija 'Ali Izetbegovic)

4.1. PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan di Bab 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa ternyata *enterprise theory* masih dibayangi oleh *agency theory* dan politisasi akuntansi. Watts (1992, 8) bahkan menegaskan laporan keuangan perusahaan secara empiris sangat dipengaruhi oleh kepentingan pasar dan politik. Realitas harus selalu beradaptasi dengan lingkungannya, tidak tetap (tetapi relatif), sebagai hasil interaksi antara keinginan dan egoisme individu (*self-interest*) yang rasional. Interaksi tersebut merupakan bentuk hubungan agensi di dalam *market process* maupun *political process*. Singkatnya, bangunan teori dan realitas akuntansi di atas menurut Watts (1992) memiliki tiga substansi, yaitu *self-interest*, *power and politics*, serta *relativity*. Tiga substansi tersebut mirip dengan apa yang biasa disebut sekularisasi⁷².

⁷² Sekularisasi memiliki kata asal *secular*. Kata *secular* menurut Al-Attas (1993, 16) berasal dari kata latin *saeculum* yang memiliki makna berkenaan dengan waktu dan lokasi (*time and location*). Waktu mereferensikan citra sesuatu saat ini (*now or presence*), sedangkan lokasi mereferensikan citra dunia ini (*word or worldly*). Sedangkan *saeculum* sendiri memiliki arti jaman ini atau waktu sekarang; dan jaman maupun waktu sekarang merujuk pada kejadian di dunia ini dan juga mengandung arti kejadian kontemporer (*contemporary events*). Tekanan arti terutama berkenaan dengan waktu atau periode di dunia seperti itu memperlihatkan makna proses historis (*historical process*).

4.2. SEKULARISASI AKUNTANSI

Sekularisasi menurut Al-Attas (1993, 17) didefinisikan sebagai pembebasan akal dan bahasa manusia dari kendali religi dan berlanjut pada kendali metafisika. Berikut penjelasan definisionalnya:

...as the deliverance of man "first from religious and then from metaphysical control over his reason and his language".

Sekularisasi seperti itu menurutnya merupakan hilangnya dunia dari pemahaman religi dan kuasi religi itu sendiri, hilangnya semua yang berkenaan pandangan dunia yang khas, menghancurkan semua mitos supernatural dan suci. Penghancuran nilai-nilai tersebut berlaku di seluruh kehidupan sosial, politik maupun budaya, serta seluruh aspek kehidupan kemanusiaan.

Bila dikerucutkan dalam pandangan ilmu, sekularisasi sebenarnya merupakan hasil dari bentuk desakralisasi atas fakta. Glasner (1992, 53-76) menjelaskan pandangan sekularisasi keilmuan sebagai proses desakralisasi definisi religi terutama aspek substantif norma dan nilai dalam mitos sosial. Desakralisasi menurutnya terdiri dari empat hal, yaitu generalisasi (yaitu model diferensiasi aspek norma dan nilai), transformasi (yang religius menuju kapitalisasi), desakralisasi (hilangnya supernatural yang esoterik dalam fakta empiris) dan sekularisme (sekularisasi terbatas yang berubah bentuknya menjadi ideologi). Berkaitan dengan ilmu, konsep desakralisasi berhubungan dengan hilangnya kekuatan supernatural-esoterik, sedangkan realitas hanyalah gagasan berdasarkan pada rasionalitas murni⁷³.

Sekularisasi menurut Glasner (1992, 65) bersandarkan pada gagasan positivisme dari Comte, yang menekankan pengetahuan

semata-mata pada observasi empiris terhadap data yang dapat diindera. Positivisme merupakan hasil logis dan natural dari evolusi pemikiran manusia, dengan hukum tiga tingkat. Hukum tiga tingkat evolusi menurut Comte adalah sebagai berikut:

Dipandang dari kesempurnaannya hukum evolusi intelektual yang fundamental terdiri dari jalan lintas beberapa teori bahwa semua manusia melalui tiga tingkatan yang berurutan. Pertama tingkatan teologis, atau khayalan, yang bersifat provisional; kedua tingkatan metafisik atau abstrak yang bersifat transisional; dan ketiga tingkatan positif atau ilmiah, yang hanya ia sendiri yang definitif (Comte 1876, 23 ff; dalam Glasner 1992, 65).

Evolusi pemikiran manusia seperti di atas memperlihatkan tingkatan teologis dan metafisika merupakan fase natural yang telah berevolusi menjadi rasionalitas pemikiran manusia. Hilangnya realitas teologis dan metafisik menempatkan realitas rasional menjadi kekuatan satu-satunya dari manusia tanpa gangguan gagasan teologis maupun metafisik. Pemikiran berbasis rasio mengarahkan kekuatan dan kekuasaan hanya berpusat pada manusia itu sendiri. Sedangkan *certainty condition* tidak pernah ada, yang ada hanyalah relativitas. Pemikiran seperti inilah yang kemudian biasa disebut dengan antroposentrisme, segala sesuatu berpusat pada manusia.

⁷³ Penjelasan Glasner mirip dengan konsep sekularisasi dari Kartanegara (2003, 122-126), Menurutnya sekularisasi didasarkan penghilangan dua sebab utama, yaitu Penjelasan Ilmiah untuk menjawab Empat Sebab Aristotelian. Pertama, Sebab Material (berkaitan dengan bahan); Kedua, Sebab Formal (berkaitan dengan bentuk); Ketiga, Sebab Efisien (berkaitan dengan inisiatif dari proses perubahan); Keempat, Sebab Final (berkaitan dengan tujuan pembentukan sesuatu). Empat sebab tersebut berlangsung dari Masa Yunani sampai dengan masa Peradaban Islam, dan berhenti ketika terjadi transformasi peradaban menuju Barat, dengan apa yang disebut sebagai 'Revolusi Penjelasan Ilmiah'. Revolusi penjelasan ilmiah menekankan sebab material dan sebab efisien. Sedangkan sebab formal dan final ditolak karena menurut filosof dan ilmuwan Barat lebih cenderung pada makna dan karena itu diserahkan pada agama dan bukannya sains.

Sekularisme menurut Al-Attas (1981, 21) memiliki tiga komponen integral, yaitu *the disenchantment of nature* (penegasian terhadap kekuatan di luar manusia), *the desacralization of politics* (penegasian atas kekuasaan terpusat), dan *the deconsecration of values* (penegasian nilai-nilai non materi atau *materialism* dan penolakan terhadap *certainty condition* atau *relativism*). Tiga bentuk sekularisasi Al-Attas tersebut memiliki kesesuaian dengan bangunan teori dan realitas akuntansi.

Sekularisasi bangunan teori dan realitas akuntansi terlihat sebagai berikut. Pertama, *the disenchantment of nature* terlihat pada substansi *self interest* para akuntan, *standard setter*, *shareholders*, birokrat dan politisi sebagai individu-individu yang terlibat melakukan upaya memaksimalkan *expected utilities* mereka sendiri. Kedua, *the desacralization of politics* terlihat pada pemisahan kekuasaan *standard setter* dari lingkaran kepentingan birokrasi dan politisi maupun pemisahan kekuasaan antara *principal* dan *agent*. Pemisahan kekuasaan ini menurut Fukuyama (2003) sebagai bentuk dasar kapitalisme yang merepresentasikan “tuan” dan “budak”. Ketiga, *the deconsecration of values* tampak pada ditolakny nilai-nilai normatif sebagai *main guidance*. *Main guidance* sebenarnya adalah kepastian aturan, kepastian pengukuran dan kepastian pengakuan secara materi. Tiga kepastian tersebut untuk mengendalikan pergerakan menuju perubahan-perubahan sesuai realitas dan keinginan *self-interest* di area *market* dan *politic*. Tidak ada kebenaran realitas, tidak ada rujukan baju normatifi. Kebenaran dan rujukan hanya ada dalam realitas empiris apa adanya.

Perubahan substansi akuntansi menjadi akuntansi yang bebas dari sekularisme akhirnya harus menjadi agenda mendesak. Pembebasan (*emancipation*) dan pencerahan (*enlightenment*) akuntansi dari sekularisme merupakan pembebasan akuntansi dari

jerat *self-interest*, *power* dan *politics*, serta *relativity*. Perubahan mendasar yang diperlukan adalah melakukan perubahan tujuan akuntansi. Perubahan tujuan akuntansi akan berdampak pada konsep dasar teoritis akuntansi.

4.3. TUJUAN AKUNTANSI SYARIAH

Pembebasan dan pencerahan menurut Habermas (Held 1980, 249-259) adalah melakukan pertalian antara teori dan *praxis*. Memahami *praxis* emansipatoris sebagai dialog-dialog dan tindakan-tindakan komunikatif yang menghasilkan pencerahan. Habermas menempuh jalan konsensus dengan sasaran terciptanya hubungan-hubungan sosial dalam lingkup komunikasi bebas penguasaan.

Pembebasan dan pencerahan di sini mempertemukan dua dimensi *praxis* menuju pencerahan dan perubahan pemahaman serta *praxis* "baru". Perbedaannya emansipasi di sini tidak mempertautkan materialitas sesuatu dengan komunikasi untuk membentuk makna baru. Emansipasi di sini adalah melakukan redefinisi makna dan ekstensi makna baru dengan nilai-nilai etis, batin⁷⁴ dan spiritual⁷⁵. Ekstensi emansipasi dilakukan dengan cara penyucian batin dan spiritual. Dalam tradisi Islam penyucian biasanya disebut *Tazkiyah*.

⁷⁴ Batin menurut Kartanegara 2003 (2003, 18-24) merupakan bagian dari indera manusia. Indera manusia dapat berbentuk lahir (lima panca indera lahir) dan non-lahir, yaitu yang disebutnya indera batin. Indera batin disebut juga sebagai kecakapan mental (lima panca indera batin). Lima panca indera batin terdiri dari common sense, imajinasi retentitif, wahm/estimasi, imajinasi kompositif, dan memori.

⁷⁵ Spiritual merupakan salah satu wilayah hati atau intuisi yang telah mengenal makna kekuatan di dalam dirinya yang paling dalam. Hati atau intuisi atau qalb, merupakan sarana manusia untuk memahami sesuatu yang tidak mampu dipahami oleh akal, yaitu wilayah kehidupan emosional manusia. Hati lebih berorientasi pada alam ketidaksadaran termasuk pengalaman mistik atau religius (Kartanegara 2003, 24-29). Hanya masalahnya ketika hati tidak pernah diarahkan pada keterikatannya dengan, yang disebut Ibn Sina sebagai intuisi suci (al-hads-al-quds) atau intuisi kenabian yang mampu mencerp kata-kata Tuhan/wahyu, maka hati tidak akan dapat mencapai spiritualitas. Di sinilah kemudian dalam Islam ditekankan pentingnya tazkiyah an-nafs (penyucian hati) secara terus menerus, untuk memahami wahyu dan keberadaan-Nya.

4.3.1. *Tazkiyah* Akuntansi

Tazkiyah merupakan proses dinamis untuk mendorong individu dan masyarakat tumbuh melalui penyucian terus-menerus. Menurut Ahmad dalam Gambling dan Karim (1991; 33), pertumbuhan dan perubahan serta peningkatan manfaat materi dalam konsep *Tazkiyah* bukan hanya “berdampak”, tetapi “memiliki keutamaan”, pada keadilan sosial dan pengembangan spiritual yang lebih baik bagi umat. *Tazkiyah* mempunyai sifat menyeluruh dan mencakup aspek moral, rohani dan material yang terikat satu sama lainnya. Semuanya berorientasi pada optimasi cita-cita dan nilai kesejahteraan manusia dalam semua dimensi, baik dunia maupun akherat. *Tazkiyah* juga mencakup seluruh perubahan dan keseimbangan kuantitatif maupun kualitatif.

Tazkiyah dapat dilihat dalam Al-Qur’an Surat Asy-Syams ayat 7-10 :

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya). Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaanannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.

Kata *tazkiyah* atau menyucikan di atas menurut Afzalurrahman (1997, 68) ditafsirkan sebagai proses agar jiwa selalu berkembang dan tumbuh. Berdasarkan konsep *tazkiyah* itulah beliau menegaskan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah melakukan pembersihan jiwa atau pengembangan kepribadian termasuk dalam konteks ekonomi. Artinya, setiap fungsi penyucian, termasuk ekonomi seseorang harus selalu melakukan keseimbangan antara kebutuhan materi maupun spiritual (1997, 69).

Tazkiyah dengan demikian merupakan bentuk penyucian jiwa menuju ketakwaan agar manusia mendapatkan karunia dan

keuntungan hakiki. *Tazkiyah* menjauhkan manusia dari kesesatan dalam mengarungi hidup yang berakibat kerugian. *Tazkiyah* versi Qur'an di atas dapat dijadikan pedoman dalam akuntansi, untuk mengembangkan konsep kekayaan dan keuntungan hakiki dan mereduksi hutang dan kerugian yang menyesatkan. Kesesatan dalam akuntansi terjadi ketika akuntansi dikooptasi oleh kepentingan dunia dan lebih-lebih lagi untuk kepentingan hegemonik tertentu (perusahaan dan pemilik modal misalnya).

Tazkiyah motivasi dan tujuan dalam akuntansi syari'ah pada dasarnya dilakukan untuk melakukan pencerahan dan pembebasan dari hegemoni korporasi dan pemilik modal yang telah mengakar kuat dalam seluruh bangunan akuntansi (Mulawarman 2006b; Mulawarman 2006c). *Tazkiyah* tujuan akuntansi syari'ah harus diarahkan pada pemahaman *Taubid*, yaitu pemahaman kepada sang Pencipta, Allah SWT. Dari titik sentral Tuhan, beranjak pada cinta manusia pada Tuhan-Alam-Manusia, berlanjut pada akuntabilitas, dan proses terakhir adalah pemahaman terhadap informasi, yaitu bentuk pencatatan untuk mencapai tujuan.

4.3.2. *Tauhid* Sebagai Payung Segala Sesuatu

Esensi Islam adalah *Taubid* atau pengesaan Tuhan, tindakan menegaskan Allah sebagai yang Esa, Pencipta mutlak dan transenden. (Al-Faruqi 1995b, 16). *Taubid* digambarkan Iqbal (1966, 3) seperti burung tak berjejak dan tidak dituntun oleh pikiran (intelekt), dan juga bukan hanya perasaan. *Taubid* adalah konsep kunci dalam Islam (Siddiqi 1989). *Taubid* memberikan identitas pada peradaban Islam yang mengikat semua unsur-unsurnya bersama-sama dan menjadikannya kesatuan integral dan organis (Al-Faruqi 1995b, 16). *Taubid* adalah Pengikat dari ketentuan-ketentuan yang disyari'atkan dan etika manusia dalam melaksanakan aktivitas

duniawi. Integralitas dan organisasinya *Taubid* menjadi dasar dari terbentuk dan dibentuknya peradaban manusia dalam Islam ini ditunjukkan dalam titah Tuhan dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah 177:

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas adalah bentuk keterikatan segala sesuatu sebagai kaidah normatif Ketuhanan sekaligus realitas yang harus dijalankan oleh setiap manusia dalam kebajikan dan ketakwaan.

Keimanan pada Allah SWT. sebagai bentuk kepasrahan tanpa *reserve*, dilanjutkan dengan kepatuhan menjalankan *syari'at*, sebagai bentuk penyerahan diri, wujud nyatanya sebagai '*abd Allah*⁷⁶. Sebagaimana ditegaskan Allah sendiri dalam firman-Nya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku (QS. 51:56).

Dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus (QS. 36:61).

⁷⁶ Konsep Abd dapat dilihat lebih detil misalnya tulisan Rahardjo (1994) atau Hasanah (2002)

Prinsip penyembahan atau ibadah menurut Shihab (2005, 119) adalah:

Bentuk kepatuhan dan ketundukan yang berpuncak pada sesuatu yang diyakini menguasai jiwa raga seseorang dengan penguasaan yang arti dan hakikatnya tidak terjangkau.

Tanda-tanda keberhasilan seseorang mencapai hakikat ibadah kepada Tuhan lanjut Shihab (2005, 119) dapat dideteksi dalam tiga kondisi:

Pertama, manusia tidak menganggap apa yang berada dalam genggamannya sebagai milik pribadinya, tetapi milik Allah tempat dia mengabdikan. Kedua, segala aktivitasnya hanya berkisar pada apa yang diperintahkan oleh siapa yang kepadanya ia mengabdikan serta menghindari apa yang dilarang-Nya. Ketiga, tidak memastikan sesuatu untuk dia laksanakan atau hindari kecuali dengan mengaitkannya dengan kehendak siapa yang kepadanya ia mengabdikan.

Pengakuan sebagai *'abd Allah*, kemudian diaktualisasikan dalam ruang dan waktu, terjun dalam hiruk pikuknya dunia dan sejarah, menciptakan perubahan yang dikehendaki dengan sebaik-baik amal, sebagai wakil Allah di bumi (*Khalifatullah fil ardh*). Sebagaimana firman Allah berikut:

Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi
(QS. 35: 39)

Nilai-nilai Islam yang berpedoman pada *Vestigia Dei* (jejak-jejak Ilahi) di atas mengarah pada koeksistensi tujuan utama manusia. Koeksistensi tujuan utama manusia tersebut terletak pada

keseimbangan sebagai *abd' Allah* dan sekaligus *Khalifatullah fil ardh*. Koeksistensi tujuan manusia jelas berbeda dengan koeksistensi alam. Ketika manusia memiliki kesamaan sifat dengan alam, maka koeksistensi tujuan manusia tidak akan berguna. Jika manusia memiliki koeksistensi yang sama dengan alam, maka manusia tidak berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya di alam semesta. Ketika manusia memiliki sifat berbeda dengan alam, maka menjadi bergunalah koeksistensi tujuan manusia. Berdasar koeksistensi yang unik itulah kemudian mengapa Tuhan memberikan kewenangan dan kedudukan lebih tinggi kepada manusia siapapun ciptaanNya. Ditegaskan oleh Naqvi (2003, 38):

Bentuk ketundukan manusia pada Tuhannya, malahan akan membantu manusia merealisasikan potensi teomorfiknya, juga membebaskannya dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek religius, sosial, ekonomi dan politik, kehidupan manusia ditransformasikan ke dalam suatu keutuhan, yang selaras, konsisten dalam dirinya dan menyatu dengan alam luas. Dengan demikian, manusia bisa mencapai harmoni sosial dengan meningkatkan rasa memiliki dan persaudaraan universal.

Koeksistensi tujuan manusia dengan demikian adalah dalam rangka pengabdian kepada Allah (*Abd' Allah*/abdi Allah) dan sekaligus menjadi wakil Allah di bumi (*Khalifatullah fil ardh*/wakil Allah di bumi). *Abd' Allah* adalah realisasi tujuan manusia untuk selalu menjalankan ibadah kepada Allah. Manusia memiliki tujuan hidup "asali dan akhir" untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Pengabdian tersebut terkait langsung, integratif dan organis dengan fungsinya sebagai *Khalifatullah fil Ardh*. *Khalifatullah fil Ardh* adalah realisasi tujuan kealaman manusia untuk memelihara dan mengelola alam semesta milik Tuhan. Manusia diberi amanah

memberdayakan seisi alam raya sebaik-baiknya demi kesejahteraan seluruh makhluk. Manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi mempunyai kewajiban menciptakan masyarakat Ilahiah dan harmonis. Manusia sebagai *khalifah* Allah harus dapat memelihara agama, akal dan budayanya (Shihab 2000, 166). Implementasi koeksistensi tujuan utama manusia kemudian harus dilaksanakan dalam bentuk harmoni, keseimbangan dan kebaikan. Inilah yang disebut dengan cinta sejati menurut Islam.

4.3.3. Cinta dalam Akuntansi Syari'ah

Akuntansi modern selama ini selalu didasarkan pada kepentingan *self interest* rasional, hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, kecintaan akan dirinya sendiri, tanpa berpikir tentang cinta yang lebih luas. Cinta yang utama adalah untuk diri sendiri, sedangkan cinta untuk orang lain hanya akan diperhitungkan ketika dirinya mendapatkan manfaat. Motivasi dan tujuan dari cinta egoistis, menurut Mulawarman (2006b; 2006c), mewujudkan dalam bentuk kepentingan "*shareholders*" dan "*market*" (cinta diri sendiri), ini akhirnya menciptakan hegemoni korporasi (manfaat). Cinta di sini hanyalah cinta seperti pada lagu *Love Story* yang merupakan "*A story about eternal theme in a human kind of all civilizations. A story about relationship with love.*" Atau juga bukan cinta seperti lagu *Don't Tell Me Stories* yang merupakan cerita mengenai "*betrayal of relationship*".

*I wonder what when wrong without love
I can't forget all the LAUGH we share together
don't tell me stories, you know that I love you
don't let it be over don't heart me agatn*

Akuntansi dengan demikian perlu membebaskan dirinya dari jaring-jaring cinta egois. Cinta seperti digambarkan Kantata Takwa sebagai bagian pembebasan diri dari ketidakadilan dan ketertindasan. Berikut lirik lagunya:

*Kalau CINTA sudah dibuang.. jangan harap keadilan akan datang
Kesediban banya tontonan... bagi mereka yang diperbudak jabatan
Oo ya o ya o ya bongkar... oo ya o ya o ya bongkar...
Sabar, sabar, sabar dan tunggu... itu jawaban yang kami terima
Ternyata kita harus ke jalan... robokkan setan yang berdiri
mengangkang
Oo ya o ya o ya bongkar... oo ya o ya o ya bongkar...
Penindasan... serta kesewenang-wenangan
Banyak lagi... teramat banyak untuk disebutkan
Hoi bentikan... bentikan jangan diteruskan
Kami muak... dengan ketidakpastian dan keserakaban
Di jalan... kami sandarkan cita-cita
Sebab di rumah... tak ada lagi yang bisa dipercaya
Orang tua... pandanglah kami sebagai manusia
Kami bertanya... tolong kau jawab dengan CINTA... ooo
(Kantata Takwa, Bongkar)*

Pembebasan ketidakadilan dan ketertindasan dari kejumudan akuntansi yang terlalu didominasi oleh kekuasaan akuntansi (akuntansi modern). Jalan satu-satunya melepaskan diri dari kesewenang-wenangan akuntansi modern (orang tua dalam konteks Kantata Takwa), adalah melakukan pembongkaran kemapanan kekuasaan. Akuntansi modern penuh ketidakpastian (*uncertainty*) dan keserakahan (semua diukur dengan kepentingan laba). Pada akhirnya akuntansi diarahkan untuk *self interest* melalui *power* dan *politics*, serta tidak mau mengakomodasi kebebasan berekspresi dari pemikiran “baru”. Jelas di sini diperlukan realisasi

cita-cita baru, perubahan di luar “rumah” (akuntansi modern) yang tak bisa dipercaya.

Cinta menurut Mulawarman (2006b) adalah landasan utama segala sesuatu termasuk akuntansi. Inti iman sebenarnya adalah cinta. Cinta juga sebenarnya merupakan unsur utama dari fungsi manusia sebagai *abd' Allah*. Ibn Taimiyah sebagaimana dikutip Basyir (2001, 11) memberikan pengertian ibadah sebagai ketundukan mutlak kepada Allah disertai cinta sepenuhnya kepada-Nya. Dari pengertian ibadah tersebut muncul dua unsur penting dari konsep ibadah, yaitu ketundukan dan cinta. Unsur pertama, yaitu ketundukan. Ketundukan berkenaan dengan kewajiban melaksanakan aturan-aturan Allah baik berupa perintah maupun larangan. Manusia belum menjalankan ibadah apabila tidak tunduk kepada perintah-Nya, meskipun ia mengakui bahwa Allah adalah pencipta dan yang memberikan rezeki kepadanya. Unsur kedua adalah cinta kepada Allah. Ketundukan menjalankan perintah Allah haruslah timbul dari hati yang penuh cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah adalah cinta utama. Tidak ada kecintaan yang paling tinggi selain cinta kepada Allah. Implementasi ketundukan untuk menjalankan perintah dan aturan Allah hanya dapat dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran apabila memang manusia mengetahui bahwa dirinya benar-benar mencintai Allah.

Iqbal (2002, 10-11) melihat cinta *Ilabiah* sebagai alat untuk menemui Allah. Cinta dalam bahasa Al Qur'an adalah “orang-orang yang beriman sangat dalam kecintaan mereka kepada Allah”. Bahkan Rasulullah mengungkapkan “orang-orang yang benar-benar beriman ketika aku dan Allah yang paling dicintai bagimu”. Tingkat awal dari cinta yaitu merasakan pesona dan pada tingkat yang lebih tinggi adalah kerinduan tak pernah padam kepada Yang Dicinta. Tingkat cinta tertinggi hanya dapat dicapai oleh Rasulullah karena beliau

dianugerahi dengan tingkat cinta tertinggi. *Uswah* (contoh) Rasulullah harus memacu kita untuk meraih cinta sejati seperti cinta Rasulullah kepada Allah.

Mulawarman (2006b) menjelaskan bahwa perkembangan spiritual seseorang adalah proses pencerahan terus menerus dengan selalu mengharapkan cinta Allah (*Mahabatullah*) untuk menuju puncak kesadaran dan kesempurnaan spiritual. Inilah *tazkiyah*, yaitu “hakikat proses menuju cinta”, proses kesadaran insaniah dari hewani menuju kesadaran Ilahiah.

Akuntansi dengan cinta tidak lagi bersifat “*lips-service*” tetapi lebih bersifat aksiologis-etis-religius. Artinya, akuntansi yang dibangun adalah akuntansi berbasis cinta dan moralitas serta mengarah pada nilai-nilai religius. Cinta hakiki adalah cinta akhlak istana dari sifat Raja, yaitu cinta dalam arti hakikat. Seperti lantunan Cinta Sifat Raja oleh Grup Musik Debu:

*Cinta tak cuma sarana
Bukanlah PERMAINAN saja
Adalah Akhlak Istana
Cinta Sifat Raja*

Cinta hakiki diperlukan sebagai tujuan dalam akuntansi. Cinta dalam akuntansi bukan hanya cinta materi. Cinta yang dibutuhkan dalam akuntansi adalah *truly love*, *hyperlove*, cinta melampaui. Cinta melampaui merupakan bentuk pemahaman utuh tentang hubungan yang didasari hubungan mesra, kesabaran, saling percaya dan kejujuran, serta menghilangkan kecurigaan, pengkhianatan dan bersifat religius. Cinta melampaui adalah cinta materi, batin, dan spiritual. Tujuan cinta melampaui berorientasi kepada seluruh semesta, baik diri, manusia, sosial, lingkungan dan

terutama kepada Tuhan. Itulah akuntabilitas akuntansi dengan cinta. Akuntabilitas dengan dasar cinta seperti dinyanyikan Grup Dewa:

*Laskar Cinta sebarkanlab benib-benib cinta
Musnahkanlab virus-virus benci
Virus yang bisa merusakkan jiwa dan busukkan hati
Ajarkanlab ILMU TENTANG CINTA
Karna cinta adalah HAKIKAT
Jalan terang BAGI SEMUA UMAT MANUSIA*

4.3.4. Meretas Tujuan Akuntansi Syari'ah

Menurut Chapra, (2000, 12) doktrin Islam mengenai integritas seluruh kehidupan dunia dengan akhirat telah mengarahkan perkembangan ilmu yang juga harus sesuai dengan doktrin tersebut. Ilmu Islami kemudian merubah model ekonomi sebagai ilmu dan strategi Islam untuk mencapai tujuan Islam dengan kredo khas syari'ah, yaitu *mashalah* atau kesejahteraan. Kesejahteraan manusia hanya dapat direalisasikan melalui pemenuhan kebutuhan material dan spritual manusia secara utuh dan terintegrasi. Islam mendorong manusia untuk menguasai alam dan memanfaatkannya bagi kepentingan manusia, sekaligus tentang ini diingatkan agar manusia jangan mementingkan aspek materi saja sehingga mengabaikan aspek spiritualnya. Bagaimanapun manusia bekerja keras untuk kesejahteraan material seseorang, keluarga, dan masyarakat, tetap harus dibimbing oleh nilai - nilai spiritual.

Chapra (2000, 12) menegaskan diperlukan aspek keadilan untuk menghilangkan nilai-nilai eksploitatif yang berdampak pada hilangnya keseimbangan. Tidak seimbangnnya sistem ekonomi akan menciptakan keinginan yang tidak dijamin, mempertajam nafsu kebendaan, menanamkan sifat iri dan dengki pada diri manusia, menjadikan mereka mementingkan diri sendiri dan tidak

mengindahkan moral. Akhirnya menjadi sumber utama ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Jadi menurut Chapra (2000, 14) tujuan Islam harus menciptakan keseimbangan yang sehat antara kepentingan individual dan masyarakat sesuai prinsip Nabi saw., “Janganlah menimpakan bahaya kepada orang lain dan jangan pula dia ditimpakan bahaya di atasnya”. Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja sasaran-sasaran integral dari ideologi Islam, tetapi juga strategi syariah tak terpisah.

Akuntansi sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam seharusnya dipancarkan dan memiliki hubungan langsung dengan sistem ekonomi Islami. Ditegaskan Triyuwono dan As'udi (2001, 27) bahwa tujuan dalam akuntansi syariah berdasarkan pada tujuan ekonomi Islam, yaitu pemerataan kesejahteraan bagi seluruh ummat. Kesejahteraan seharusnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat dan tidak hanya diperuntukkan hanya pada seseorang atau segolongan orang saja. Oleh karena itu, Islam menyediakan sarana untuk pemerataan kesejahteraan dengan sistem *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* dan sistem tanpa bunga. Kesejahteraan sosial (*social welfare*) dalam konsep Islam bukanlah kebaikan hati atau *charitable* (Karim 2000 dalam Triyuwono dan As'udi 2001, 27). Dalam Islam, lanjut Triyuwono dan As'udi (2001, 3), walaupun harta itu kita cari dengan usaha sendiri secara halal, tetap saja dalam harta kita tersebut terdapat hak orang lain yang harus dikeluarkan.

Berdasarkan kesejahteraan untuk semua itulah kemudian konsep *Tazkiyah* menjadi konsep yang harus selalu hadir sebagai bagian dari ciri khas Islam. Usaha manusia memperoleh harta benda yang mencukupi kehidupannya merupakan jawaban terhadap panggilan dan tuntutan fitrah dan nafsunya yaitu cinta pada harta benda. Hal ini bukanlah penyimpangan dan bukan pula penghalang untuk mencapai ridha Allah. Karena cinta harta merupakan fitrah

sejak ia diciptakan namun manusia dalam memenuhi tuntutan nafsunya berkewajiban untuk menjaga batas-batas syari'at dan menggunakan cara yang disyari'atkan (lihat misalnya QS. 18: 46; 89: 20; 100: 8). Tetapi, cinta harta harus diarahkan pada tiga hal. **Pertama**, kecintaan harta sesuai *maqashid asy-syari'ah* untuk merealisasikan kemashlahatan dunia dan alam semesta sekaligus. **Kedua**, kecintaan harta harus merefleksikan fungsi keterwakilan manusia (*Khalifatullah fil ardh*) dengan tetap bersinergi dengan fungsi pengabdianya kepada Allah (*abd' Allah*). **Ketiga**, fitrah kemanusiaan lainnya yang berlawanan dengan kecintaan harta yaitu kedermawanan. Ketiga hal itu hanya dapat terlaksana dengan jalan niat dan penyucian (*tazkiyah*) secara terus menerus (Ibrahim 2005; 99-102). Bentuk dasar penyucian terhadap kecintaan terhadap harta benda adalah ketakwaan yang tercantum dalam QS 3: 14-15:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). Katakanlah: "Inginkah Aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu?". untuk orang-orang yang bertakwa (kepada Allah), pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal didalamnya. dan (mereka dikaruniai) isteri-isteri yang disucikan serta keridhaan Allah. dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Tujuan akuntansi syari'ah dengan demikian dapat didefinisikan sebagai realisasi kecintaan kepada Allah SWT, baik berbentuk ketundukan maupun kreativitas, baik materi, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah. Tujuan akuntansi syari'ah seperti ini mensyaratkan realisasi kecintaan setiap

akuntan kepada Allah dalam kapasitasnya sebagai *abd' Allah* menjalankan seluruh aktivitas organisasinya dengan penuh ketundukan. Ketundukan disertai (baik secara bersamaan maupun sebagai konsekuensi logisnya) menjadi *khalifatullah fil ardh* menjalankan seluruh aktivitasnya secara kreatif. Ketundukan dan kreativitas dilaksanakan baik dalam bentuk materi, batin dan spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah.

Konsekuensinya tujuan akuntansi syari'ah membentuk konsep dasar teoritis akuntansi syariah yang berbeda. Akuntansi konvensional berdasarkan konsep *proprietary theory* dan berevolusi menjadi *entity theory*. Akuntansi syari'ah menyetujui penggunaan konsep dasar teoritis *enterprise theory*, meskipun konsep tersebut masih perlu dilakukan *tazkiyah* (Islamisasi).

4.4. MENUJU SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY

Enterprise theory tidak sepenuhnya sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah. Oleh karena itu *enterprise theory* menurut Triyuwono (2004) perlu dilakukan modifikasi, sehingga sejalan dengan nilai-nilai syari'ah, dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Mudah-mudahan, *enterprise theory* memerlukan internalisasi Nilai, yaitu *Taubid* (Triyuwono, 2001).

Triyuwono (2001) mengusulkan apa yang disebut dengan *shari'ate enterprise theory*. Aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep *shari'ate enterprise theory* menurut Triyuwono (2001) adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumberdaya yang ada di dunia ini. Allah sebagai sumber amanah utama dan sumber daya yang dimiliki para *stakeholders*. Dalam sumber daya tersebut melekat suatu tanggung jawab dalam penggunaan, cara dan tujuan yang ditetapkan

Sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah akuntansi syari'ah mewujud pada akuntabilitas.

4.4.1. Akuntabilitas dalam Akuntansi Syari'ah

Akuntabilitas menurut Triyuwono (2002b) merupakan spirit(ualitas) akuntansi syari'ah. Konsep akuntabilitas sangat terkait dengan tradisi pemahaman Islam tentang Tuhan, manusia dan alam semesta. Dalam tradisi Islam, manusia adalah *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di bumi) dengan misi khusus menyebarkan rahmat bagi seluruh alam sebagai amanah untuk mengelola bumi berdasarkan keinginan Tuhan. Artinya, lanjut Triyuwono (2002b) manusia berkewajiban mengelola bumi berdasarkan etika syari'ah, konsekuensinya harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Akuntabilitas seperti ini disebut Triyuwono (2002b) sebagai premis utama dari akuntabilitas, yaitu akuntabilitas vertikal. Namun harus diakui bahwa tugas manusia adalah tugas yang membumi, yang dalam konteks mikro dapat diartikan bahwa sebuah entitas bisnis telah melakukan kontrak sosial dengan masyarakat dan alam (Triyuwono, 2002b). Sebagai konsekuensi dari kontrak tersebut, menurut Triyuwono (2002b) seorang agen harus bertanggung jawab kepada masyarakat (*stakeholders*) dan alam (*universe*). Ini yang disebut sebagai akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas dari Triyuwono (2002b) merupakan akuntabilitas yang berpusat pada tugas kemanusiaan di alam semesta milik Tuhan, sebagai *Khalifatullah fil ardh*.

Shari'ate enterprise theory dengan demikian memiliki visi yang lebih luas, yang muncul dalam keluasan cakupan *stakeholders* perusahaan (Triyuwono 2002b). Menurut teori ini, *stakeholders* meliputi *direct participants* dan *indirect participants*, yang berbeda dengan *direct* maupun *indirect participants enterprise theory*.

Direct participants, adalah pihak yang memberi kontribusi kepada perusahaan, keuangan maupun non keuangan (misalnya tenaga dan *skill*). Karena golongan ini memberi kontribusi, maka konsekuensinya perusahaan (yang menerima kontribusi) mempunyai kewajiban memberi sebagian kesejahteraan yang diciptakannya kepada mereka sebagai kontra prestasi. Pihak pertama meliputi pemegang saham, karyawan, kreditor, pemerintah, pemasok, pelanggan dan lainnya (Triyuwono, 2002b). *Indirect participants* adalah pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan baik keuangan maupun non keuangan, tetapi dengan statusnya yang demikian justru mereka mempunyai hak atas bagian kesejahteraan yang berhasil diciptakan perusahaan. Pihak kedua ini meliputi: masyarakat secara umum (khususnya *mustabiq*) dan lingkungan alam (dalam arti menjaga, memperbaiki dan melestarikan alam) (Triyuwono, 2002b).

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, manusia sebenarnya memiliki koeksistensi tujuan sebagai *abd' Allah* sekaligus *Khalifatullah fil ardh*. Sesuai dengan sifat akuntansi syari'ah yang salah satunya memiliki prinsip metodologi berpasangan (lihat kembali Bab 2 halaman 27), menjadi kemustian adanya padanan koeksistensi akuntabilitas yang berpusat pada *Khalifatullah fil ardh*, yaitu akuntabilitas yang berpusat pada *abd' Allah*. Kalau begitu, bagaimana bentuk akuntabilitas *abd' Allah*?

Bentuk akuntabilitas *abd' Allah* dapat berwujud materi ketika dia telah berada pada posisi yang telah disucikan, sedangkan akuntabilitas *Khalifatullah fil ardh* dapat berwujud materi tanpa harus dilakukan penyucian terlebih dahulu, karena dia adalah kelanjutan dari kesucian yang telah terbentuk dalam akuntabilitas *abd' Allah*. Akuntabilitas *Khalifatullah fil ardh* dapat terjadi ketika dia telah melalui fase akuntabilitas *abd' Allah*.

Akuntabilitas *abd' Allah* merupakan bentuk pertanggung-jawaban berhubungan ketundukan terhadap ketetapan syari'ah. Akuntabilitas *abd' Allah* dibagi menjadi dua, yaitu *abd' Allah* primer dan sekunder. Akuntabilitas *abd' Allah* primer merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian segala sesuatu yang diterima, diproses maupun didistribusikan secara *halal*. Ketetapan halal baik *halal zaty* (bentuknya) dari sisi finansial, maupun *zamany* (waktu pelaksanaan), *makany* (tempat pelaksanaannya), dan *halal hukmy* (proses mendapatkan dan menggunakannya) dari sisi sosial dan lingkungan. Akuntabilitas *abd' Allah* sekunder merupakan kepatuhan perusahaan melakukan penyucian yang diterima, diproses maupun didistribusikan yang bebas *riba*, baik berkenaan pembebasan aktivitas *riba* ekonomi menjadi *bai'*, maupun pembebasan aktivitas *riba* sosial-lingkungan menjadi *shadaqah*. Akuntabilitas *abd' Allah* baik menetapkan kriteria *halal* dan bebas *riba* di atas bersifat materi. Akuntabilitas *abd' Allah* juga memiliki sifat non-materi, yaitu *thoyib*. Kriteria *thoyib* lebih bersifat spiritualitas batin.

4.4.2. Informasi dalam Akuntansi Syariah

Menurut Triyuwono (2002b) akuntabilitas sebagai representasi dari spirit merupakan satu sisi dari mata uang logam akuntansi syariah. Sisi yang lain adalah pemberian informasi sebagai perwujudan materi. Akuntabilitas bernilai syariah menjadi spirit yang mendasari bentuk akuntansi dan informasi akuntansi, baik kuantitatif maupun kualitatif, ekonomi, sosial, spiritual dan politik bisnis, yang dipakai untuk pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan. Pemberian informasi tidak terbatas pada pemberian informasi kuantitatif, sebagaimana pada akuntansi modern, tetapi juga informasi kualitatif, baik yang bersifat ekonomi maupun yang bersifat sosial, spiritual maupun batin. Perlu diketahui bahwa tujuan

Informasi akuntansi syari'ah meskipun sebagai perwujudan "materi," sebetulnya informasi tersebut terdiri dari informasi materi dan non-materi. Konsekuensi dari informasi materi adalah berupa informasi kuantitatif, sedangkan informasi non-materi berupa informasi kualitatif.

4.5. SHARI'ATE VALUE ADDED STATEMENT

Turunan *shari'ate enterprise theory* dioperasionalkan Mulawarman (2006), dalam bentuk konsep nilai tambah syari'ah (*shari'ate value added*). Nilai tambah syari'ah sebagai konsep *income* dalam akuntansi syari'ah merupakan bentuk dari nilai tambah yang disyari'atkan, yang *halal*, *thoyib* dan bebas *riba*. Nilai tambah syari'ah seperti itu berasal dari perlakuan *ta'wil* (metafora) atas konsep zakat⁷⁷. Dari pen-*ta'wil*-an konsep zakat tersebut di atas dapat dilakukan rekonstruksi konsep nilai tambah.

⁷⁷ Zakat bila ditelusuri secara etimologi (bahasa) berasal dari kata *zaka* dan dapat pula berasal dari kata *zakka*. Kata *zaka*, berarti tumbuh atau baik. Dari akar kata *zaka* dan *zakka* di atas zakat dapat memiliki dua makna utama. Pertama, dari akar kata *zaka*, zakat memiliki makna bahwa setiap segala sesuatu sebenarnya secara lahiriah dapat tumbuh dengan baik dipengaruhi oleh nilai, lingkungan atau pengaruh subjektivitas yang bersifat material, fisik dan mental sekaligus. Inilah yang disebut oleh Allah, bahwa setiap ciptaan Allah yang tumbuh dan berkembang selalu mengandung dalam dirinya nilai-nilai kebaikan. Bila dihubungkan dengan makna *Value Added* adalah bahwa nilai tambah saat ini masih bersifat lahiriah dalam makna zakat yang pertama ini. Kedua, dari akar kata *zakka*, zakat memiliki makna bahwa setiap segala sesuatu yang tumbuh dan berkembang, karena lain dan satu hal, pasti dipengaruhi oleh sesuatu di luar nilai, lingkungan atau pengaruh subjektivitas. Ada 'nilai lain' yang berkembang bahkan mempengaruhi, sehingga sesuatu dapat berubah. Untuk itu atas sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang tersebut, haruslah selalu sengaja disucikan kembali dengan nilai-nilai Ilahiah, sesuai dengan substansi awal penciptaannya. Bila dihubungkan dengan makna *Value Added*, maka di sini masih terdapat substansi *Value Added* yang tidak tampak dalam konteks ekonomi makro maupun akuntansi (*Value Added Statement*). Bahwa nilai *Value Added* yang muncul dalam hasil hitungan akhir *Value Added*, adalah nilai tambah yang masih bersifat lahiriah. Sehingga hal itu, masih tidak dapat dilakukan proses distribusi kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan syari'ah. Ketika *Value Added* dalam perusahaan dihasilkan dari usaha yang sengaja dan mendapatkan *treatment* (perlakuan) tertentu dari nilai tambah yang sebenarnya, maka pasti masih terdapat nilai tambah yang belum tersucikan, karena telah terjadi intervensi subjektivitas, lingkungan dan nilai. Sehingga *Value Added* dalam konteks ini perlu dilakukan penyucian kembali. Zakat dalam makna kedua inilah, kemudian menjadi peran bagi penyucian kembali. Sehingga, ketika puncak dari zakat sebagai penyucian yang bersifat Ilahiah, maka hal itu akan bermakna menjadi penyucian yang hakiki dari pertumbuhan perusahaan, perusahaan yang telah mencapai *tazkiyah*.

Nilai tambah syari'ah adalah bentuk pertambahan nilai (*zakka*) yang terjadi secara material (*zaka*) dan telah disucikan (*tazkiyah*) secara spiritual (non material). *Zakat* dengan demikian adalah simbol penyucian dari pertambahan yang harus bernilai keseimbangan dan keadilan. Implikasi keseimbangan dan keadilan dalam nilai tambah syari'ah adalah terbentuknya tiga manfaat utama. **Pertama**, proses pembentukan nilai tambah syari'ah harus dilakukan secara konsisten dengan mematuhi prinsip-prinsip kebenaran dan tidak melanggar ketentuan Allah (*halal* dan *thoyib*). **Kedua**, pertumbuhan harta dan mekanisme usaha yang sehat harus dilakukan dalam kerangka menghilangkan sifat berlebihan dalam perolehan harta. Bentuknya yaitu menjalankan aktivitas usaha bebas *riba* dalam segala bentuknya (reduksi finansial berbentuk *bai'* dan reduksi sosial dan lingkungan berbentuk *shadaqah*). **Ketiga**, implikasi dalam bentuk distribusi harus dilakukan secara optimal pada kebaikan sesama, merata dan tidak saling menegasikan yang lain. Meletakkan prinsip keseimbangan dan keadilan berdasarkan akhlak Ketuhanan (Keadilan Ilahi).

Berdasarkan perubahan konsepsi nilai tambah menjadi nilai tambah syari'ah akhirnya berdampak pada pengembangan teknologi akuntansi syari'ah. Salah satunya adalah penggantian laporan laba rugi menjadi laporan nilai tambah syari'ah (*shari'ate value added statement*) baik berupa laporan kuantitatif maupun kualitatif (Mulawarman 2006a)⁷⁸.

⁷⁸ Bentuk laporan kuantitatif dan kualitatif SVAS dapat dilihat pada Bab 6 atau lebih detail beserta penjelasannya dapat dilihat dalam Mulawarman (2006a) berjudul Menyibak Akuntansi Syari'ah: Rekonstruksi Teknologi Akuntansi Syari'ah dari Wacana ke Aksi, terbitan Kreasi Wacana 2006.

4.6. **DARI SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY MENUJU KEMUNGKINAN SHARI'ATE FINANCIAL STATEMENTS**

Shari'ate enterprise theory seperti dijelaskan di atas telah dapat membentuk satu laporan keuangan yaitu Laporan Nilai Tambah Syari'ah. Menggunakan analogi dari *entity theory* dan *proprietary theory* yang telah berkembang sebelumnya dalam tradisi akuntansi konvensional, jelas sekali dapat dikembangkan bentuk-bentuk laporan keuangan lainnya secara utuh. Baik *entity theory* maupun *proprietary theory* telah membentuk kemiripan laporan keuangan dengan penekanan berbeda, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Bahkan khusus *entity theory* dapat mengembangkan bentuk laporan keuangan yang makin kompleks dan disesuaikan kebutuhan lingkungan organisasi.

Perumusan demi perumusan di Amerika Serikat, yang dilakukan ASOBAT, APB, *Trueblood Committee* sampai FASB telah mencapai "*high-end technology*" laporan keuangan. Sampai sekarang pengembangan demi pengembangan masih terus dilakukan. Perlu digaris-bawahi di sini adalah pengembangan yang dilakukan masih bertumpu pada satu konsep dasar teoritis akuntansi "hegemonik" yaitu *entity theory*. Perjalanan mutakhir dari bentukan laporan keuangan akuntansi konvensional saat ini dapat dilihat pada SFAC dari FASB, terutama untuk organisasi bisnis yaitu SFAC No. 1, 2, 5 dan 6. Dari sanalah peletakan dasar seluruh gagasan teori dan buku-buku teks baik di luar (seperti Kam, 1997; Wolk *et al.* 1989; Kieso *et al.* 2002; Hendrickson dan Breda 2000 dan lain-lain) maupun di dalam negeri (seperti Suwardjono 2005; Chariri dan Ghozali 2000 dan banyak lainnya). Dari sana pula dilakukan aktivitas empiris pelaporan keuangan perusahaan. Beberapa bentuk alternatif memang dibicarakan, tetapi hal itu hanya sebatas wacana teoritis. Tidak ada pengembangan lebih konkrit.

Gagasan kritis sebenarnya juga telah dilakukan, seperti Gray *et al.* (1988) yang mendesain bentuk laporan alternatif berbasis *enterprise theory*, Ijiri (1986) dengan gagasan *Triple Entry Book-keeping* Cooper dan Sherer maupun Tinker di era 80-an sampai sekarang yang konsisten dengan usulan konsep teoritis berbasis *Political Economy of Accounting* yang memungkinkan bentuk alternatif laporan keuangan (meski sampai saat ini belum muncul alternatif lebih konkrit). Lebih jauh pendekatan akuntansi metode *Triple Bottom Line* (TBL) dari Elkington (1999). TBL mencakup provisi bagi para pemegang saham yang disajikan dalam tiga set laporan (keuangan, sosial dan lingkungan). Laporan TBL dijabarkan secara implisit dalam CICA 2000 (*The Canadian Institute of Chartered Accountants*), GRI 2000 (*The Global Reporting Initiative Guideline*), Accountability (2003), dan UNEP (*United Nation Environment Programme*) serta FI 2003 (*Finance Initiative*). Bentuk paling baru adalah Mook *et al.* (2003; 2005). Mereka menggagas *Integrated Social Accounting Model* yang terdiri dari:

1. *Expanded Value Added Statement* sebagai adaptasi *Value Added Statement*
2. *Socioeconomic Impact Statement* sebagai adaptasi *Income Statement*
3. *Socioeconomic Resource Statement* sebagai adaptasi *Balance Sheet Statement*
4. *Community Social Return* pada pendekatan Investasi

Gagasan tentang laporan keuangan yang lebih kultural, menengok kepentingan lebih luas, sosial-kemasyarakatan, lingkungan, dan paling utama lagi, dalam kaca mata akuntansi syariah, yaitu akuntabilitas pada Allah SWT, rasa-rasanya sangat

mendesak untuk dikembangkan lebih jauh. Bagaimana bentuk laporan keuangan selain *Shari'ate Value Added Statement*? Apakah memang bentuk *Balance Sheet* dan *Cash Flow Statement* serta laporan lainnya seperti *Statement of Retained Earnings* dapat digunakan? Atau dapat dilakukan eksplorasi alternatif dari ranah akuntansi konvensional dan alternatif kritis seperti Elkington, Ijiri, Cooper-Sherer, Tinker, Gray dan lainnya? Atau bahkan tidak menggunakan semuanya?

Melakukan rekonstruksi empiris lebih serius dari induknya sendiri, *shari'ate enterprise theory*, untuk membuka gagasan-gagasan orisinal, dari *practice, field, capital* dan *habitus* akuntansi syaria'ah sendiri mungkin dapat dikembangkan. Kita mulai dari eksplorasi empiris, yaitu menelusuri jejak-jejak "Trah" perdagangan para pengusung tradisi Islam yang masih konsisten dengan konsepsi ekonomi Islaminya. Mengapa tidak?

4.7. RINGKASAN

Tazkiyah motivasi dan tujuan dalam akuntansi syaria'ah pada dasarnya dilakukan untuk melakukan pencerahan dan pembebasan dari hegemoni korporasi dan pemilik modal yang telah mengakar kuat dalam seluruh bangunan akuntansi (Mulawarman 2006b; Mulawarman 2006c). *Tazkiyah* tujuan akuntansi syaria'ah harus diarahkan pada pemahaman *Taubid*, yaitu pemahaman kepada sang Pencipta, Allah SWT. Dari titik sentral Tuhan, beranjak pada cinta manusia pada Tuhan-Alam-Manusia, berlanjut pada akuntabilitas, dan proses terakhir adalah pemahaman terhadap informasi, yaitu bentuk pencatatan untuk mencapai tujuan.

Konsekuensi tujuan akuntansi syaria'ah seperti itu akan membentuk konsep dasar teoritis akuntansi syaria'ah yang berbeda. Akuntansi konvensional berdasarkan konsep *proprietary theory* dan

berevolusi menjadi *entity theory*. Akuntansi syari'ah menyetujui penggunaan konsep dasar teoritis *enterprise theory*, meskipun konsep tersebut masih perlu dilakukan *tazkiyah* (Islamisasi).

Enterprise theory tidak sepenuhnya sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syari'ah. Oleh karena itu *enterprise theory* menurut Triyuwono (2006) perlu dilakukan modifikasi, sehingga sejalan dengan nilai-nilai syari'ah, dengan mendasarkan pada nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab. Mudah-mudahan, *enterprise theory* memerlukan internalisasi Nilai, yaitu *Taubid*.

Slamet (2001) mengusulkan apa yang disebut dengan *sbari'ate enterprise theory* (SET). SET menurut Triyuwono (2007) dikembangkan berdasarkan "metafora *zakat*" yang pada dasarnya memiliki karakter keseimbangan. Keseimbangan berbasis metafora zakat secara implisit mengandung nilai egoistik-altruistik, material-spiritual dan individu-jama'ah. Konsekuensi dari nilai keseimbangan ini menyebabkan SET memiliki kepedulian pada *stakeholders* yang luas, yaitu Allah, manusia dan alam. SET lanjut Triyuwono (2007) merupakan perwujudan akuntabilitas manusia sebagai wakil Allah di bumi (*khalifatullah fil ardh*).

Berdasarkan prinsip keseimbangan SET, Mulawarman (2006) menegaskan akuntabilitas *khalifatullah fil ardh* juga memiliki pasangannya, yaitu dimensi *abd' Allah*. *Abd' Allah* merupakan bentuk pertanggungjawaban dari sisi "ketundukan dan kepatuhan" menjalankan syari'ah Islam. Ketundukan manusia diharapkan berdampak pada terpenuhinya tujuan syari'ah, yaitu kesejahteraan bagi manusia, sosial dan alam. Bentuk konkritnya bahwa setiap distribusi kesejahteraan harus memenuhi kriteria *halal*, *thoyib* dan reduksi riba.

Implementasi keseimbangan akuntabilitas *abd' Allah* dan *khalifatullah fil ardh* memiliki implikasi pada pembentukan

karakter laporan keuangan syari'ah. Karakter laporan keuangan memiliki sifat material-spiritual, egoistis-altruistis, kuantitatif-kualitatif (Triyuwono 2006) dan ketundukan-kreativitas (Mulawarman 2007b; 2007c). Karakter laporan keuangan syari'ah yang diperluas seharusnya dapat dijadikan *source* pengembangan laporan keuangan syari'ah secara teknologis. Pengembangan laporan keuangan syari'ah di sini dilakukan mendekati realitas (empiris) di lapangan dengan nilai-nilai normatif syari'ah. Bab 5 akan dilakukan proses penelusuran realitas untuk melihat secara langsung aktivitas bisnis yang dapat dijadikan dasar pembentukan konsep laporan keuangan syari'ah. ■

BAB 5

MENEMUKAN HABITUS AMANAH TRAH-TRAH BISNIS SEBAGAI SUBSTANSI LAPORAN KEUANGAN

*Akan datang suatu masa kepada umatku,
di mana mereka mencintai lima perkara, yaitu
mencintai dunia dan melupakan akhirat;
mencintai kehidupan dan melupakan kematian
mencintai gedung indah dan melupakan kubur;
mencintai harta dan lupa pertanggungjawabannya;
mencintai makhluk dan melupakan Allah.*

(Hadits Rasulullah, Muhammad SAW)

5.1. PENDAHULUAN

Pada Bab 3 telah dibahas mengenai bentuk-bentuk laporan keuangan sebagai representasi dari konsep dasar teoritis akuntansinya. *Entity theory* maupun *proprietary theory* membentuk kemiripan laporan keuangan dengan penekanan berbeda, yaitu Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas serta *Statement of Retained Earnings*. *Entity theory* bahkan mengembangkan bentuk laporan keuangan yang makin kompleks dan disesuaikan kebutuhan lingkungan organisasi. Perkembangan lain yaitu akuntansi sosial dan lingkungan berbasis *enterprise theory*. Laporan keuangan berbasis *enterprise theory* menekankan kepentingan pelaporan kepada masyarakat lebih luas dan lingkungan alam.

Bab 4 menelusuri gagasan-gagasan laporan keuangan syari'ah sesuai konsep dasar *shari'ate enterprise theory*. Kesimpulannya, diperlukan pengembangan lebih jauh *shari'ate enterprise theory* sebagai konsep dasar teoritis akuntansi syari'ah untuk membuka gagasan-gagasan teknologis berbentuk laporan keuangan syari'ah yang orisinil, dari *practice* (untuk selanjutnya disebut *praktik*), *field* (*lapangan*), *capital* (*modal*) dan *habitus* (*perilaku*) akuntansi syari'ah⁷⁹.

5.2. KONSEP AMANAH DALAM SHARI'ATE ENTERPRISE THEORY

Triyuwono (2006, 188) menjelaskan *shari'ate enterprise theory* sebagai ekstensi *enterprise theory* di mana organisasi dimetaforakan sebagai amanah. Amanah menurut Triyuwono (2006, 188) didefinisikan sebagai berikut:

Sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan keinginan yang mengamanahkan. Ini artinya bahwa pihak yang mendapat amanah tidak memiliki hak penguasaan sepenuhnya (pemilikan) mutlak atas apa yang diamanahkan. Ia memiliki kewajiban untuk memelihara kewajiban tersebut dengan baik dan memanfaatkannya sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemberi amanah.

Metafora amanah dalam organisasi memunculkan tiga bagian penting, yaitu pemberi amanah, penerima amanah dan amanah itu sendiri. Tugas manusia sebagai pengemban amanah dalam perspektif

⁷⁹ Penggunaan kata praktik, lapangan, modal dan perilaku di sini hanya dilakukan untuk lebih memudahkan memahami alur analisis dan pembahasan. Meskipun seperti telah dijelaskan di Bab 2 kata *practice*, *field*, *capital* dan *habitus* tidak dapat disamakan dengan kata praktik, lapangan, modal dan perilaku secara harfiah. Kata-kata tersebut memiliki keunikan makna dan definisi sesuai dengan persamaan dari Bourdieu serta ekstensi yang dilakukan penulis di bab 2. Artinya, penggunaan kata-kata Indonesia di sini hanya sebagai perantara dengan tetap merujuk pada definisi asalnya. Agar terjadi perbedaan maka empat kata tersebut ditulis *italics* (miring)

bisnis dijelaskan Triyuwono (2006, 183) memperlihatkan dua bentuk utama. Pertama, dalam pandangan syari'ah, bukan hanya sekedar bisnis semata, tetapi ia semacam ibadah yang tidak hanya meliputi transaksi-transaksi ekonomi, tetapi juga rasa saling menolong sesama (masyarakat pada umumnya), rasa peduli pada lingkungan dan rasa cinta kepada Tuhan. Konsep ibadah seperti ini dijabarkan lebih jauh oleh Mulawarman (2006a, 189-192) sebagai pelaksanaan fungsi ketundukan manusia atau *abd' Allah*. *'Abd Allah* merupakan bentuk ketundukan manusia melakukan aktivitasnya, yaitu ritual ibadah *mahdab* (wajib). Hal ini muncul bahkan terlihat secara tegas setiap kali manusia melaksanakan salah satu ibadah *mahdab*, yaitu *shalat*, dengan sumpah atau ikrar rutin sebagai berikut:

Sesungguhnya shalatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah semata.

Ikrar rutin tersebut membentuk *perilaku* Muslim dalam menjalankan aktivitasnya, termasuk menjalankan *ma'isyah* (mencari penghidupan) untuk mendapatkan *rezeki*. *Perilaku* bukan hanya terjadi karena adanya cerapan (persepsi)⁸⁰ skema-skema konseptual dari realitas sosial. *Perilaku* Muslim bukan hanya *habitus* versi Bourdieu, yaitu ketidaksadaran kultural atau semacam *blinkering*

⁸⁰ Kata cerapan berasal dari kata cerap, yang merupakan translasi kata perceive dalam bahasa Inggris. Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Terjemahan>. Kata cerapan juga dipergunakan pada masalah filsafat atau ilmu hudhuri dalam khasanah Islam, untuk menerjemahkan arti kata idrak. Idrak adalah istilah untuk menunjukkan keberfungsian daya memahami. Kata cerapan juga digunakan misalnya pada Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah oleh Tejoyuwono Notohadiprawiro. Latihan Dasar Pemeriksa Ikan. Badiklat Pertanian. Departemen Pertanian. 2 Nopember - 15 Desember 1992. Repro oleh Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tahun 2006. Atau dalam buku Mengenal Allah Lewat Akal oleh Harun Yahya. Terjemahan Indonesia. Kata cerapan juga dipergunakan berkenaan dengan masalah seni, terutama pada masalah pengalaman estetika. Pengalaman estetis ialah pengalaman yang tergugah ketika perhatian diarahkan kepada cerapan indera (sense of perception) rupa. Dengan kata lain, suatu pengalaman "estetik" terjadi selama pengalaman itu dituntun atau dikendalikan oleh cerapan indera melihat. Estetika sendiri diambil dari istilah Yunani, yaitu aisthesis yang dapat diartikan sebagai pencerapan indera. (<http://www.desaingrafisindonesia.com/>)

perception of reality. Perilaku 'abd Allah bahkan membentuk ekstensi *blinkering* atau *habitus* kultural (ketidaksadaran kultural) menjadi *non-blikering* atau *habitus* alamiah (ketidaksadaran alamiah) (lihat kembali Bab 2).

'*Abd Allah* merupakan *perilaku* kultural sekaligus alamiah. Terbentuknya *perilaku* bukan hanya dipengaruhi realitas *lapangan*, realitas sosial, realitas pendidikan, realitas *modal*, dan realitas tercandra lainnya. *Perilaku 'abd Allah* merupakan sifat empiris sekaligus non-empiris, merasuki jiwa dan kesadaran tanpa batas, mencapai kesucian. Artinya, *abd' Allah* sebenarnya bukan hanya ritus ibadah dengan gerakan formal dan penuh ikatan aturan. Ritus formal dan penuh ikatan aturan adalah bentuk ritus untuk mencapai posisi tidak formal dan tanpa ikatan aturan, kesadaran tanpa batas menuju kesadaran berke-Tuhan-an (*God Consciousness*), mencapai kesadaran seorang Muslim melalui penyucian terus-menerus (*tazkiyah an-nafs*). Sehingga jelas '*Abd Allah* dalam konteks bisnis dan lebih teknis akuntansi merupakan bentuk ketundukan syari'ah-formal untuk mencapai ketundukan kesucian non-formal.

Kedua, amanah mengindikasikan eksistensi kesadaran individu tentang perannya sebagai wakil Allah dan memainkan peran sesuai aturan dan norma-norma Tuhan. Konsep keterwakilan ini disebut Triyuwono (2000, 181; 2006, 188) sebagai *khalifatullah fil ardb*. Kata *khalifah* lebih lanjut dijelaskan Triyuwono (2006, 189-190) sebagai:

suatu pengertian bahwa seseorang yang telah diangkat sebagai wakil akan mengemban suatu amanah sesuai keinginan Sang Pemberi Amanah dengan penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan pada kesadaran diri (*self-consciousness*)...yang mempunyai konsekuensi bahwa semua aktivitasnya harus sesuai dengan keinginan Tuhan (*the will of God*)... Konsekuensi manusia sebagai penerima amanah

dari Allah adalah untuk menyebarkan rahmat-Nya (kebaikan, kesejahteraan atau kemudahan) bagi seluruh alam (manusia dan makhluk lainnya).. secara adil (baik dan seimbang)..

Amanah untuk menyebarkan rahmat merupakan tugas universal setiap diri manusia sebagai khalifah tanpa dibatasi ruang dan waktu (Triyuwono 2006, 189). Amanah kekhalifahan dapat diformulasikan sebagai bentuk kepedulian mengelola alam semesta bagi kepentingan diri, sosial dengan tetap berpedoman pada keseimbangan alam. Semuanya harus merujuk pada pertanggungjawaban kepada Allah. Konsep *khalifatullah* menjadi *perilaku* setiap Muslim dalam menjalankan aktivitas rutinnnya, termasuk dalam menjalankan *ma'isyah* (mencari penghidupan) untuk mendapatkan kekayaan (*maal*).

Perilaku Khalifatullah fil ardh muncul karena adanya cerapan skema-skema konseptual dari benda-benda dalam realitas sosial. *Khalifatullah fil ardh* jelas merupakan bentuk mekanisme *habitus* bersifat kultural. Terbentuknya *perilaku* dipengaruhi realitas empiris, realitas sosial, realitas pendidikan, realitas *capital*, dan realitas tercandra lainnya. *Perilaku khalifatullah* dengan demikian merupakan *perilaku* empiris sosial maupun individual.

Kesatupaduan (koeksistensi) amanah ketundukan dan keterwakilan setiap muslim merupakan bentuk kepercayaan untuk mengelola segala sesuatu (termasuk kekayaan) milik Allah di alam semesta. Allah adalah Pemilik Mutlak atas segala sesuatu (QS. 3: 189), sementara manusia hanyalah sebagai pengemban tugas di bumi (QS. 2: 30). Kekayaan pada hakikatnya bukan milik kita dan bukan pula milik masyarakat, tetapi milik Allah. Kekayaan dengan demikian hanyalah pinjaman Allah kepada manusia, masyarakat,

lingkungan, alam semesta. Allah memberikan hak sementara, berupa pinjaman. Hal ini juga ditegaskan oleh Hamka (1984, 244) sebagai berikut:

Oleh karena harta benda itu pada hakikatnya bukan kita sendiri yang empunya dan bukan pula masyarakat, melainkan harta Allah sendiri yang diserahkan kepada masyarakat manusia untuk mengaturnya sebaik-baiknya, dengan penuh keadilan, sehingga masyarakat mendapat dan perseorangan mendapat pula, maka tertanamlah dalam perasaan seorang Muslim yang sejati bahwa harta itu hanyalah pinjaman Tuhan.

Setiap individu boleh mendapatkan hak kepemilikan, meskipun hak itu sebenarnya hanyalah titipan milik Allah dan akan kembali kepada Allah ketika kita menghadap kepada-Nya. Kekayaan diserahkan kepada manusia untuk mengatur kepemilikan dengan baik dan adil selama berada di dunia, sehingga terjadi harmoni kepemilikan antara individu dan masyarakat. Kepemilikan individu, di dalamnya pasti terdapat hak milik orang lain, baik pribadi maupun kolektif/masyarakat, serta hak milik alam. Hak masyarakat dan alam dalam hak pribadi diinterpretasikan dalam bentuk *zakat*, yaitu harmoni kepemilikan dalam Islam. Dijelaskan Setiabudi dan Triyuwono (2002, 152) substansi *zakat* bukan sekedar kewajiban individu terhadap masyarakat, tetapi lebih dari itu, ia merupakan hak masyarakat atas individu secara langsung. Ketika seseorang memperoleh sejumlah kekayaan akumulasi kekayaan tertentu, maka bersamaan dengan itu muncullah hak masyarakat lainnya.

Lebih teknis lagi dalam konteks akuntansi syari'ah, amanah dan hak kepemilikan merupakan realisasi atau inti dari tujuan laporan keuangan akuntansi syari'ah berbasis *zakat* (*zakat-based*

approach) (Mulawarman 2006a, 151) atau diistilahkan Triyuwono (2000b) sebagai *zakat-oriented*. Akuntansi syari'ah berbasis zakat dijabarkan Triyuwono (2000b) sebagai berikut:

...organisasi bisnis [dalam perspektif syari'ah] orientasinya tidak lagi *profit-oriented*, atau *stakeholders-oriented*, tetapi *zakat-oriented*. Dengan orientasi *zakat* ini, perusahaan berusaha untuk mencapai angka pembayaran *zakat* yang tertinggi. Dengan demikian laba bersih (*net profit*) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya *zakat* menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Zakat, bila dilihat dalam konsepsi yang lebih mendalam adalah sebuah pemaknaan laba atas titik temu dari hakikat kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan. Hakikat kemanusiaan sebagai manusia yang memiliki kebebasan dan memancarkan nilai-nilai fitri Ketuhanan, akan memunculkan *value added* (VA). Nilai-nilai keadilan merepresentasikan substansi dari distribusi yang lebih konkret. Dua hal tersebut, *value added* dan distribusi, terwujud dalam *zakat*. Seperti terungkap dalam QS. 9: 103, berikut ini:

Ambillah *zakat* dari sebagian harta mereka, dengan *zakat* itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Tujuan akuntansi syari'ah harus dipakai untuk melihat bentuk laporan keuangan yang berkaitan dengan kinerja perusahaan, yang berbasis pada *zakat*. Hal ini merupakan konsistensi dari turunan metafora amanah yang lebih operasional dari organisasi, yang dalam konteks akuntansi disebut dengan

metafora *zakat*. Dengan metafora *zakat*, terdapat beberapa makna yang terkandung dalam akuntansi syari'ah seperti disebutkan Triyuwono (2000) sebagai berikut:

Pertama, ada transformasi dari pencapaian laba yang maksimal ke pencapaian *zakat*. Ini berarti bahwa pencapaian laba bukan merupakan tujuan akhir (*the ultimate goal*) perusahaan, tetapi hanya sekedar tujuan antara. Kedua, segala bentuk operasi perusahaan harus tunduk pada aturan main (*rules of the game*) yang ditetapkan dalam syari'ah. Ketiga, *zakat* mengandung perpaduan yang seimbang antara karakter egoistik dan altruistik. Keempat, *zakat* merupakan nilai emansipatoris. Ia adalah lambang pembebas alam dari penindasan dan eksploitasi manusia. Kelima, *zakat* adalah penghubung antara aktivitas manusia yang profan (duniawi) dan suci (ukhrowi).

Zakat menurut Mulawarman (2006a, 217) bukan hanya bermakna distribusi nilai tambah seperti diusulkan Baydoun dan Willet (1994; 2000). Dalam pandangan Hiperstrukturalisme Islam Terintegrasi, *zakat* menjadi poros akuntansi syari'ah, sebagai alat untuk penyucian nilai tambah berbentuk *zaka* (*sign* sekaligus *trace*) material menjadi *zakka* material sekaligus spiritual. Artinya, lanjut Mulawarman (2006a, 218) secara teknis *zakat* merupakan pengurang nilai tambah secara keseluruhan dan bukan merupakan bagian yang didistribusikan dalam kolom distribusi laporan nilai tambah. Meletakkan *zakat* sebagai pusat dari penentuan nilai tambah dengan demikian memberi sinyal bahwa nilai tambah telah *halal* untuk didistribusikan kepada *stakeholders*. Hal ini sesuai dengan jejak (*trace*) dari ungkapan (*parole*) Allah berbentuk *God Sign*, yang ditulis (*writing*) dalam bahasa (*langue*) Al Qur'an, sebagai berikut:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk

mereka. Sesungguhnya doa kamu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 9:103).

Pertanyaannya kemudian, apakah implementasi koeksistensi *abd' Allah* dan *khalifatullah fil ardh* yang menerjemah menjadi amanah dan *zakat* secara eksistensial memang berpengaruh pada realitas masyarakat Muslim Indonesia? Apakah substansi amanah dan *zakat* telah mewujud dalam *perilaku* masyarakat Muslim dalam menjalankan *praktik* di dunia bisnis (*lapangan*)?

Koeksistensi *abd' Allah* dan *khalifatullah fil ardh* seharusnya berdampak pada *perilaku* seseorang maupun organisasi bisnis untuk merealisasikan akuntansi berbentuk laporan keuangan. Yaitu akuntansi humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal, dilandasi dimensi *faith*, *knowledge* dan *action* (Triyuwono 2002c) untuk mencapai *tazkiyah* (Mulawarman 2006a). Untuk melihat hal tersebut secara utuh akan dilakukan penelusuran secara empiris di lapangan.

Proses penelusuran realitas bisnis seperti dijelaskan di Bab 2 dilakukan dengan tiga cara. **Pertama**, pencarian makna sinkronis untuk melihat komparasi antropologis aktivitas bisnis berbagai trah atau tradisi bisnis individu dan atau masyarakat masa kini. **Kedua**, melakukan sinergi sinkronis-diakronis yaitu melakukan proses sinergi atas realitas masa lalu (budaya dan sejarah Rasulullah) yang jejaknya muncul dalam realitas masa kini (budaya dan tradisi masyarakat Muslim Indonesia). Sinergi di sini adalah melakukan pemaknaan simbol-simbol yang mungkin. Simbol-simbol substansial, mirip, sama, sebangun dan sekaligus unik dapat dijadikan bahan pembentukan akun-akun dan laporan keuangan. **Ketiga**,

pemaknaan hasil sinergi sinkronis-diakronis secara teknologis. Artinya, proses ketiga di sini melakukan penerjemahan hasil sinergi sinkronis-diakronis menjadi substansi teknologi laporan keuangan.

5.3. MENGGALI PERILAKU BISNIS MELALUI ANTROPOLOGI SINKRONIS

Mengagendakan perjalanan ke pusat 'trah-trah" bisnis dilaksanakan mulai pertengahan bulan Syawal 1427 H (awal bulan Nopember 2006) sampai pertengahan Shafar 1428H (akhir Juni 2007). Trah pertama, salah seorang cucu murid dari HOS Tjokroaminoto (tokoh Sarekat Islam), Said Abbas (Pak Abbas) dan Pak Dani. Trah kedua, tokoh Kopontren Sidogiri, KH. Mahmud Ali Zain dan Pak Dumairi sebagai representasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Trah ketiga, trah Muhammadiyah diwakili Pak Munir (Komisaris Bank Persyarikatan Indonesia), Bu Pamela (studi literatur - pemilik jaringan Supermarket di Jogja), Pak Ishar (pemilik toko leveransir di Malang) dan Pak Aziz (produsen *spareparts* mebelair kayu di Jepara). Proses "*getting into the field*" - begitu kata Rasyid (1995, 42) - untuk menemui trah SI, NU dan Muhammadiyah tidak begitu terkendala.

5.3.1. Perilaku Trah Sarekat Islam

Wawancara dengan Pak Abbas dilakukan di sela-sela kesibukan beliau menjalankan aktivitas bisnisnya. Wawancara dan observasi aktivitas bisnis Pak Abbas dilakukan mulai tanggal 3 Oktober 2006 sampai 16 Januari 2007. Hubungan Pak Abbas dan peneliti sebenarnya sangat dekat. Karena kedekatan itu pula, ketika peneliti membutuhkan informasi yang dirasa kurang, cukup dengan menelpon ke rumah beliau untuk konfirmasi, maka informasi mengalir lancar tanpa "batas". Kemudahan juga memberikan

informasi - menurut peneliti - lengkap dan terstruktur mengenai “gaya” bisnisnya.

Kalangan PSII biasanya menyebut partainya dengan nama SI (Sarekat Islam), nama kedua dari pengganti Sarekat Dagang Islam (SDI). Menurut Tamar Djaja, SDI pertama kali dideklarasikan pada 16 Oktober 1905 di Solo. Pergantian nama SDI menjadi SI terjadi setahun kemudian, tahun 1906. SI sebagai partai didirikan di Solo tanggal 11 Nopember 1912 dan tumbuh dari organisasi yang mendahuluinya yaitu Sarekat Dagang Islam⁸¹.

SDI muncul dari tokoh awalnya H. Samanhudi dan menjadi besar berkat sentuhan tangan HOS Tjokroaminoto. HOS Tjokroaminoto dalam perjalanan sejarahnya telah mendistribusikan pemikiran model bisnis (baik praktik, konseptual sampai politik) Islam versi Indonesia dari semangat komunitas SDI. Anggota SDI awal didominasi produsen sekaligus pedagang dengan semangat Islamnya mempertahankan bisnis dari tekanan Belanda melalui subordinasi kepada para pedagang Cina.

Konsep ekonomi khas SDI dapat dilihat dari pemikiran Tjokroaminoto dalam bukunya yang terkenal, yaitu *Islam dan Sosialisme* (1950). Penolakannya terhadap prinsip sosialisme yang materialistik menempatkan Tjokroaminoto sebagai salah satu pemikir Indonesia paling awal dengan proses Islamisasi, yaitu Islamisasi konsep Sosialisme Marxist⁸². Sebagai perbandingan,

⁸¹ Penjelasan detail mengenai berdirinya SI dapat dilihat dalam buku *Gerakan Moderen Islam di Indonesia tahun 1900-1942* karangan Deliar Noer, penerbit LP3ES, Jakarta, edisi kedelapan Mei tahun 1996.

⁸² Tanggungjawab intelektual Tjokroaminoto untuk melakukan Islamisasi Konsep Sosialisme Marxis sebenarnya tidak lepas dari realitas sosial politik waktu itu. Sarekat Islam waktu itu sebagai gerakan perlawanan untuk kemerdekaan Indonesia telah mulai disusupi gerakan komunis-marxis. Gerakan komunis-marxis menampakkan kekuatannya secara formal saat berlangsungnya Kongres Nasional SI ke-3 di Surabaya pada tanggal 29 September - 6 Oktober 1918. Gerakan yang nantinya menjadi sempalan dan dinamakan SI-Merah itu dimotori oleh Semaun, ketua SI Cabang Semarang yang juga ketua ISDV (partai komunis pimpinan Snevliet) di Semarang.

Islamisasi Ilmu secara konseptual digagas Muhammad Iqbal tahun 1928, sedangkan Islamisasi Ilmu secara konkrit baru dilakukan Ismail Raji Al Faruqi dan Syed Naquib Al-Attas tahun 1984. HOS Tjokroaminoto sendiri telah melakukannya tahun 1924.

Berdasarkan kesalahan ontologis dan epistemologis ajaran Sosialisme Marxis kemudian HOS Tjokroaminoto melakukan Islamisasi. HOS Tjokroaminoto menyebut Sosialisme Cara Islam. Sosialisme Cara Islam bertujuan melaksanakan kedamaian dan keselamatan berdasarkan pada tafsir kata Islam yang memiliki empat makna utama (1950, 25-26), yaitu:

1. **Aslama**, maknanya ketundukan. Ketundukan harus diutamakan kepada Allah dan kepada utusannya serta kepada pemimpin Islam.
2. **Salima**, maknanya keselamatan. Keselamatan di dunia dan akhirat apabila setiap muslim menjalankan ajaran Islam secara sungguh-sungguh.
3. **Salmi**, maknanya kerukunan. Kerukunan harus dilaksanakan dan diimplementasikan di antara sesama Muslim.
4. **Sulami**, maknanya tangga. Setiap muslim yang menjalankan ajarannya dengan sungguh-sungguh haruslah melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia dan akhirat sebagai simbol menuju derajat kesempurnaan hidup.

Berdasarkan empat makna Islam di atas HOS Tjokroaminoto menggagas Dua Prinsip Utama Sosialisme Cara Islam, yaitu Kedermawanan Islami dan Persaudaraan Islam (1950, 26-35). Kedermawanan Islami bukanlah melakukan sedekah sebagai kebajikan semata, tetapi sedekah adalah kewajiban untuk meraih cinta Allah. Kedermawanan untuk meraih cinta Allah akan berdampak pada tiga hal. **Pertama**, menempatkan kepentingan

umum di atas kepentingan pribadi untuk mencapai Keridhaan Allah. **Kedua**, *zakat* sebagai dasar bagi distribusi dan pemerataan kekayaan untuk seluruh masyarakat. **Ketiga**, kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tetapi kejahatan dunia adalah kehinaan. Prinsip kedua, yaitu Persaudaraan Islam, menekankan persaudaraan yang dibangun bukan berdasarkan pada suku, warna kulit, ras, kekayaan atau lainnya, tetapi berdasar ketakwaan.

Tradisi sosialisme Islami versi SI adalah tradisi kerakyatan dan sifat sosial aktivis SI maupun SDI dalam mengimplementasikan ajaran Islam untuk melakukan pembelaan terhadap rakyat masa penjajahan Belanda. Sikap politik dagang anti penjajahan ini direpresentasikan dalam tiga bentuk. **Pertama**, sikap berseberangan anggota SDI dengan orang-orang Cina yang memiliki tindakan semena-mena dan merendahkan para pedagang Batik di Solo. **Kedua**, berseberangan dengan para bangsawan yang tidak mengindahkan hak-hak rakyat biasa dan feodalistik. **Ketiga**, berseberangan dengan penjajah Belanda yang tidak pernah memperhatikan kesejahteraan masyarakat kecil. Gaya sosialis seperti ini nantinya membentuk pribadi Pak Abbas menjadi seorang pengusaha Islam ala SI.

Implementasi indoktrinasi ajaran SI terpatriti dalam *perilaku* Pak Abbas. Pilihan jalan hidup Pak Abbas menempa dirinya menjadi seorang pebisnis. Usaha bisnis dan perdagangan jatuh bangun, mulai dari membuka *selep*/penggilingan padi (hasilnya dijual ke pasar dan diedarkan ke beberapa toko di Malang), membuka toko kelontong dan perwakilan minyak tanah Pertamina, membuka pabrik sabun, pabrik tegel, kontraktor dan lain-lain. Di sela-sela bisnisnya, masih disempatkan pula melanjutkan pendidikan tinggi strata dua di bidang pendidikan (kemudian menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi swasta di Malang, Ngawi dan Solo).

Setelah mengarungi berbagai cobaan penuh suka-duka (terutama yang paling berat ketika 2 putranya dari 4 bersaudara dipanggil terlebih dahulu oleh Sang Khalik) akhirnya Pak Abbas dapat membangun "Kerajaan Bisnis" bersama kedua putranya. Saat ini Pak Abbas memiliki beberapa bidang usaha, seperti Toko Swalayan (Malang), *Real Estate* (Tenggarong, Malang dan Trenggalek), perusahaan HPH dan perusahaan Batubara (Tenggarong, Kalimantan Timur). Terakhir, usaha Biro Jasa Travel dan Pariwisata.

Tetapi cita-cita Pak Abbas dianggap belum tercapai bila hanya mengurus bisnis saja. Menurut Pak Abbas setiap usaha harus disertai dengan aktivitas sosial yang berdampak tidak hanya pada *charity* saja, tetapi juga cita-cita sosial religius, yaitu cita-cita sosialisme Islam versi SI. Aktivitas bisnis harus didampingi dengan aktivitas sosial yang bermakna untuk membangun "*sbirotol mustaqim*" - kendaraan besar menuju surga. Pilihan jatuh pada naluri Pak Abbas yang memang dari "sononya" adalah seorang guru dan pendidik. Melalui pendirian yayasan Bani Hasyim beliau mendirikan masjid sebagai pusat kegiatan. Di sana Pak Abbas juga menjadi imam sholat berjamaah, *Khatib* Jum'at, pengajian dan lainnya. Bahkan sampai saat ini Pak Abbas masih rutin mengisi *Khutbah* Jum'at di masjid-masjid Singosari, Karangploso, Dau dan daerah-daerah di sekitar Malang Raya. Sedangkan pendidikan, kesehatan serta bisnis berfungsi sebagai jaring-jaringnya.

Saat ini Pak Abbas telah mendirikan lembaga pendidikan yang menaungi Kelompok Bermain, TK dan SD berstandar Internasional di atas tanah seluas lima hektar (lokasi yang lebih luas dari perumahan yang dibangunnya di Malang). Kemudian dibangun pula klinik murah di dekat masjid dan kompleks sekolah. Sekolah ini memiliki fasilitas yang luar biasa untuk ukuran sekolah umumnya di

Singosari bahkan mungkin untuk ukuran Malang Raya. Mulai dari fasilitas *Indoor Stadium* (dengan berbagai fasilitas seperti badminton berlantai kayu *flooring* basket, perlengkapan karate, dan lain-lain), kolam renang, gedung pembelajaran tiga lantai, gedung laboratorium 3 lantai, kolam ikan, fasilitas komputerisasi layar LCD tipis dan perpustakaan. Ini masih ditambah dengan rencana tahun-tahun mendatang dengan pembangunan lapangan sepakbola, lapangan voli, basket, tenis, *club house*, asrama guru, kebun dan peternakan dan fasilitas lainnya. Semua fasilitas tersebut dirancang dalam areal seluas 5 ha. Tetapi anehnya siapapun bisa masuk sekolah ini. Bagi yang mampu membayar SPP dan DPP standar, sedangkan bagi yang tidak mampu ada yang tidak membayar biaya apapun. Bahkan kepada guru, karyawan diberi fasilitas kebebasan untuk sekolah di sini tanpa terikat masalah biaya.

Bila dilihat dari *perilaku* Pak Abbas di atas, implementasi pemikiran SI tampak dari apa yang disebut beliau sebagai prinsip bisnis. Bisnis menurut Pak Abbas harus dijalankan dengan kemandirian, kesatuan beriman-berhitung dan jalan lurus. Implementasi tiga prinsip berjalan berkelindan menjadi satu dan membentuk *perilaku* bisnis Pak Abbas. Inilah "*Perilaku Kunci*" dari Pak Abbas.

Prinsip pertama, yaitu kemandirian adalah prinsip berdiri di atas kaki sendiri, tidak tergantung pada orang lain dan bahkan pemerintah. **Kedua**, kesatuan beriman-berhitung merupakan prinsip dagang yang berakar dari penggalan hadits Rasul "*Imanan Wahtisaban*". Hadits ini menurut pak Abbas kurang lebih sebagai berikut:

Barang siapa yang berpuasa di Bulan Ramadhan atas dasar Iman (kepada Allah) yang penuh dengan perhitungan untuk mengharap rahmat-Nya, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.

Prinsip kesatuan beriman-berhitung bila ditarik dalam mekanisme pencatatan laporan keuangan, mengandung makna sangat dalam. Menurut Pak Abbas:

Berhitung itu ya prinsip, tidak terpisah dengan prinsip keimanan. Artinya menjalani keimanan harus disertai perhitungan. Beriman bukan *taqlid* buta, tetapi kecermatan memperhitungkan segala sesuatu berdasar hukum-hukum Allah dan untuk beribadah kepada Allah. Hukum Allah itu pasti, yang relatif hukum manusia. Mmm... dengan kepastian hukum Allah, seperti amanah berbisnislah. Bisnis dan seluruh aktivitas di dalam organisasi termasuk laporan keuangan harus dengan perhitungan cermat, memperhitungkan baik-buruk, benar-salah, manfaat-*mudhorot*, halal-haram dan lain sebagainya.

Implementasi amanah berbisnis sesuai prinsip beriman-berhitung dalam laporan keuangan menurut Pak Abbas adalah:

Prinsip berhitung misalnya pembuatan laporan keuangan harus dilandasi keimanan memang harus dilakukan dengan kapasitas pengetahuan seseorang yang memadai. Prinsip berhitung hanya dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum-hukum Islam yang ada bila seseorang memiliki pengetahuan atau ilmu. Tanpa ilmu maka seseorang akan terperosok dalam kerugian dan kehinaan. Dengan ilmu maka seseorang akan mendapatkan keberhasilan yang berujung pada surga⁸³.

Ketiga, prinsip jalan lurus sebagai tujuan akhir setiap manusia dari ayat 6 Surat Al Fatihah "*Ibdinashshirotol mustaqim*". Setiap manusia menurut Pak Abbas:

⁸³ Khusus mengenai ilmu menurut Pak Abbas sebagai makna tersirat dari hadits Rasul yang mengatakan: "Tuntutlah Ilmu walau sampai ke negeri Cina"; "Tuntutlah Ilmu dari buaian sampai liang lahat". Dengan itu pula mengapa Allah mensejajarkan kedudukan Ilmu dan Iman.

Dalam hidup dan apa yang diusahakan harus selalu dalam rangka membangun kendaraan mengarungi *sirotol mustaqim*, jalan menuju surga. Ya itu *ma'isyah* yang benar.

Ma'isyah yang benar ditegaskan Pak Abbas sebagai implementasi *sbirotol mustaqim* dengan mencari rezeki agar menghasilkan kekayaan penuh berkah. Hasil dari rezeki bukan hanya untuk kepentingan pribadi semata, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, serta diperoleh secara *halal* dan *thoyib*. Berikut ungkapan beliau:

Membangun kendaraan mengarungi *sirotol mustaqim* itu maknanya luas. *Ma'isyah* tidak hanya cari rezeki untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk lingkungan sekitar. Lebih penting lagi ya harus *barakah*, ya *halalan thoyibah*. *Ma'isyah* atau katakanlah cari mata pencaharian supaya dapat uang masuk dari hasil penjualan kita. Mestinya apa yang kita jual itu kan ada unsur biaya yang harus dikeluarkan di sana. Dari keluar dan masuknya uang itu, kalau diperhitungkan nantinya, pada akhirnya dapat selisih lebih, ya itulah rejeki kita. Rejeki yang barokah.

Secara umum implementasi "*amanah*" berbisnis dalam laporan keuangan menurut Pak Abbas adalah sebagai berikut:

Jabaran seperti itu yang ideal harusnya tercatat misalnya dalam laporan keuangan. Artinya laporan bukan hanya mementingkan perusahaan, meski itu penting, tapi ya di dalamnya juga terdapat kepentingan pegawai, tukang, masyarakat sekitar. Lebih penting lagi laporan ini sebenarnya bentuk pertanggungjawaban kepada yang lebih tinggi, yaitu Allah. Teknisnya saya gak begitu paham. Yang mengimplementasikan ya bagian keuanganlah..

Berusaha adalah *ma'isyah* untuk mencari rezeki sebagai bagian dari pelaksanaan amanah Allah kepada manusia untuk terus berkarya. Berusaha keras merupakan kewajiban melaksanakan amanah Allah untuk mendapatkan rezeki bernilai tambah. Setiap agenda berpikir, berjuang, berusaha, berdagang, berbisnis sampai kegiatan pencatatan laporan keuangan, berlandaskan pada keadilan sosial yang tidak pernah lepas dari modal untuk hari akhir. Hubungan antara rezeki, luasnya nilai tambah, kekayaan, kepedulian terhadap sesama manusia dan nilai-nilai Ketuhanan ini mirip pemikiran HOS Tjokroaminoto. Pemikiran HOS Tjokroaminoto dapat dilihat saat beliau ceramah di Surabaya tanggal 12 Januari 1913 (Utusan Hindia 7 Maret 1912 dalam Noer 1966, 126). Dalam pidatonya beliau mengatakan:

Sarekat Islam bertujuan untuk membangunkan kebangsaan, mencari hak-hak kemanusiaan yang memang sudah tercetak oleh Tuhan, menjunjung derajat yang masih rendah, memperbaiki nasib yang masih jelek dengan jalan mencari tambahnya kekayaan..

Makna mendapatkan rezeki bernilai tambah itulah yang oleh Pak Abbas dimaknai dari kalimat “memperbaiki nasib yang masih jelek dengan jalan mencari tambahnya kekayaan” HOS Tjokroaminoto.

5.3.2. *Perilaku* Trah Nahdlatul Ulama

Wawancara dengan KH. Mahmud Ali Zain (selanjutnya disebut Pak Mahmud) meski belum mengenal dengan baik ternyata juga tidak terlalu sulit. Informasi mengenai beliau peneliti ketahui ketika tahun 2004 mengikuti Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islam II. Salah satu praktisi sektor riil yang diundang adalah Pak

Mahmud. Beliau mewakili Kopontren Sidogiri Pasuruan. Beliau saat ini di samping sebagai pengasuh Ponpes Sidogiri juga sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI). Wawancara dengan Pak Mahmud beserta stafnya dilakukan tanggal 23 Desember 2006 sampai 15 Pebruari 2007.

Tanggal 23 Desember 2006 peneliti berangkat naik sepeda motor dari Singosari ke Sidogiri. Pukul 08.45 peneliti sampai di kantor pusat BMT Sidogiri yang berlantai tiga. Begitu masuk, peneliti bertemu dengan karyawan BMT yang tersenyum ramah mengucapkan salam, mempersilakan duduk dan menanyakan keperluan peneliti. Kebetulan pengurus BMT saat itu sedang di-*casting* untuk televisi lokal (PAS-TV). Setelah selesai, karyawan tersebut masuk ke dalam kantor memberitahukan kedatangan peneliti. Tak berapa lama peneliti dipersilakan masuk ke kantor. Di sana duduk Pak Mahmud dan beberapa orang.

Pak Mahmud memulai pembicaraan dengan menceritakan secara singkat sejarah berdirinya BMT. Kelahiran BMT bermula dari keinginan lama pengasuh dan para *ustadz* di lingkungan pondok untuk mendakwahkan berekonomi secara baik sesuai ketentuan Islam. Hal ini didasarkan pada QS. Al Baqarah mengenai di-*halalkan*-nya *bai'* dan di-*baramkannya* *riba*. Berdasarkan keinginan tersebut tahun 1997 di antara para *ustadz* mengumpulkan modal awal. Hasil urunan terkumpul modal awal Rp 13.500.000,00 dan dimulailah usaha sekaligus dakwah berbentuk BMT. Perlu diketahui bahwa para *ustadz/guru* pengelola koperasi/BMT tidak memiliki latar belakang ekonomi maupun akuntansi, tetapi memiliki semangat mengaplikasikan ayat Qur'an tersebut.

Berkat usaha dan kerja keras sampai saat ini telah berdiri 16 cabang di kabupaten Pasuruan dengan aset sekitar Rp 18.000.000.000,00 dan 29 cabang di propinsi Jawa Timur (didirikan

tahun 2000) dengan aset sekitar Rp 28.000.000.000,00. Sebuah nilai yang sangat besar, tetapi bagi Pak Mahmud, bukan besarnya nilai itu yang penting. Lebih penting adalah manfaat untuk sekitar 16.500 orang dapat menikmati pembiayaan BMT.

Para penggiat BMT menurut Pak Mahmud harus memiliki empat sifat wajib Rasulullah. Berikut penjelasannya:

Tiap pengelola harus mengimplementasikan sifat *shiddiq* atau jujur dan amanah. Nah dari dua sifat itu harus berdampak pada sifat *tabligh* atau melaksanakan dengan baik serta *fathonah* atau cerdas, kalau bahasa sekarang itu profesional.

Menjalankan bisnis disamping berdasarkan empat sifat di atas, para penggiat BMT juga membutuhkan pengetahuan *fiqh* (seperti pengetahuan berdasarkan kitab *Fathul Qarib*) serta *tasawwuf* (seperti pengetahuan berdasarkan kitab *Nashaihul Ibad*). Pak Mahmud mengatakan:

Seseorang yang hanya memahami dan menerapkan *fiqh* tapi dijalankan tanpa *tasawwuf*, maka orang itu akan bersikap *fasikh*. Orang yang *fasikh* jelas mengerti dan sangat paham mengenai *halal* dan *haramnya* sesuatu. Berdasar pengetahuan tentang *halal* dan *haram* itu pulalah seseorang akan melakukan antisipasi di antara dua kutub tersebut. Empat imam besar *fiqh* sebenarnya juga ahli *tasawwuf* dan menerapkan prinsip segitiga *iman-islam-ikhsan*. Seseorang yang telah menjalankan *iman* dan *islam* dapat menjadi *ikhsan* ketika dia menguasai ilmu *tasawwuf*. *Ikhsan* adalah proses pengaturan hati dan pengabdian kepada Allah seakan-akan Allah melihat dirinya. Tetapi bila dia tidak dapat melihat, Allah akan melihat hambanya. Inilah prinsip seorang *ikhsan* menjalankan *fiqh* sekaligus *tasawwuf*. Sebaliknya bila seseorang hanya menjalankan konsep *tasawwuf* tanpa menjalankan *fiqh* maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai *munafiq* dan berperilaku seperti *zhindiq*.

Diakui Pak Mahmud pelaksanaan akuntansi di BMT masih sangat lemah, dijalankan menggunakan PSAK no. 59 dengan beberapa penyesuaian. Khusus *zakat* tidak dibiayakan tetapi dikeluarkan dari laporan laba rugi. Setelah laporan laba rugi terbentuk baru diadakan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Zakat} = (\text{laba bersih} + \text{modal}) \times 2,5\%$$

Pengenaan *zakat* dikhususkan untuk pemegang saham saja, nasabah tidak dikenakan. *Nisbab zakat* diukur berdasarkan awal waktu dan bukan di akhir waktu. Berkaitan seluruh modal, transaksi, dan seluruh kejadian yang dilakukan dalam aktivitas organisasi harus bersih, halal dan tidak mengandung riba (menurut Pak Abdul Majid, terdapat 81 bentuk riba berdasarkan tuntunan *fiqh* buku Fathul Qarib). Konsistensi bersihnya seluruh transaksi dan kejadian dalam organisasi misalnya, BMT tidak mau bekerja sama dengan bank-bank selain bank syaria'ah. BMT misalnya masih mempertanyakan penetapan kriteria lancar dan tidaknya pembiayaan. Menurut Pak Mahmud, mekanisme CAMEL untuk penetapan kriteria lancar atau tidaknya pembiayaan dari BI masih harus disesuaikan dengan QS Al Baqarah ayat 280:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Hadits Nabi juga menjelaskan bila seseorang itu mampu dan menanggihkan hutangnya maka orang itu *dholim*.

Peneliti kembali ke Sidogiri beberapa kali, melakukan diskusi-diskusi dan pengumpulan bahan-bahan berkaitan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Wawancara penting ketika peneliti melakukan kunjungan

tanggal 30 Januari 2007. Wawancara berlangsung antara peneliti dan pak Dumairi khusus berkaitan BMT, sedangkan mengenai Kopontren peneliti direkomendasikan bertemu langsung dengan Pak Baihaqi di kantor Pusat Kopontren. Diskusi dengan Pak Dumairi dan Pak Baihaqi masing-masing selama kurang lebih 2 jam, terdapat beberapa catatan yang dapat disampaikan di sini.

Aktivitas ekonomi dan bisnis di Pondok Pesantren Sidogiri disebut dengan *Sidogiri Network*. Aktivitas *Sidogiri Network* tidak mengikatkan diri secara langsung dengan Pondok. Meskipun dalam pondok terdapat salah satu ketua/pengurus harian yang bertanggung jawab non-struktural dengan aktivitas bisnis. *Sidogiri Network* merupakan jaringan bisnis pondok tetapi tidak terdapat hubungan struktural apapun dengan kebijakan pondok, hubungannya hanya pada pengelola bisnis yang kebetulan *ustadz* dan alumni pondok.

Sidogiri Network didirikan sebagai bentuk kepedulian para *ustadz* dan alumni untuk dua tujuan utama, yaitu da'wah dan praktik bisnis. Bagaimana mereka mengimplementasikan pendidikan yang diterima di pondok secara praktis di lapangan.

Implementasi ilmu pondok dalam da'wah secara umum dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar pondok. Secara khusus dakwah dalam bisnis bertujuan untuk memerangi sistem rentenir yang telah mengakar kuat di pasar-pasar dan para pedagang di sekitar pondok Sidogiri. Implementasi kesatuan da'wah dan bisnis memang berdampak pada *perilaku* bisnis para penggiat *Sidogiri Network*. *Praktik* ekonomi dan bisnis sesuai ajaran syari'ah *ablus sunnab wal jama'ah* khas Nadhlatul 'Ulama.

Da'wah dalam bentuk praktik memang tidak dapat langsung berjalan di *lapangan*. Untuk memenuhi sasaran praktik dibentuklah

lembaga-lembaga bisnis di dalam dan luar lingkungan pondok. Di lingkungan pondok dibentuk Koperasi Pondok Pesantren, dengan tugas utamanya memenuhi kebutuhan internal pondok. Kebutuhan internal seperti keperluan hidup sehari-hari santri (kantin dan toko), alat tulis dan buku (toko dan percetakan), komunikasi (wartel dan warnet) dan lainnya. Sementara di luar lingkungan pondok dibentuk Koperasi berbasis pembiayaan keuangan, yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Pelajaran penting dari *perilaku* ustad dan alumni pondok memang unik. Mereka menjalankan aktivitas bisnisnya dengan gaya pondok pesantren, mulai dari gaya berpakaian bisnis sarungan dan kopiah sampai misalnya khusus BMT hari Jum'at tutup dan Minggu buka. Menurut Manajer BMT, Pak Dumairi:

kita menerapkan hari libur Jum'at untuk ibadah. Sedangkan hari ahad tetap buka, toh tidak berpengaruh terhadap proses bisnis. Bahkan Alhamdulillah tidak mengurangi keuntungan perusahaan.

Transaksi-transaksi yang dilakukan juga mempraktikkan konsep-konsep *fiqh muamalah* dari tradisi empat *mazhab* (Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki). Di kalangan umat Islam Indonesia terutama kalangan *Ablus Sunnah wal Jama'ah* terdapat empat *mahzab* utama, yaitu Imam Hanafi (80-150H), Imam Maliki (93-179H), Imam Syafi'i (150-204H) dan Imam Hambali (164-241H). Misalnya penerapan *zakat* dilakukan sesuai pemahaman mereka terhadap *fiqh*. *Zakat* dihitung berdasarkan pada laba bersih dan modal lembaga. Pendekatan perhitungan *zakat* di BMT ini berbeda dengan perhitungan versi akuntansi perbankan syari'ah. Menurut pak Dumairi transaksi syari'ah yang penting terdapat pada *aqad*. *Aqad* adalah alat untuk membedakan aktivitas tersebut bernilai syari'ah atau tidak.

Prinsip penting lain berkenaan laporan keuangan di lingkungan internal BMT adalah bentuk pertanggungjawaban manajemen. Pertanggungjawaban harus disajikan dengan *valid* dan memenuhi kaidah koeksistensi da'wah-bisnis. Prinsip pelaporan berhubungan pada kesatuan bisnis-da'wah, maksudnya dijelaskan pak Dumairi:

laporan keuangan penting untuk mengaplikasikan pencatatan sebagai kalkulasi bisnis sekaligus untuk aktivitas dakwah di dunia kerja yang orientasinya harus mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Konteks pelaporan seperti ini akan memunculkan pertanyaan bagi setiap penggiat BMT: "sudah berapa orang yang kamu layani?" Istilah melayani sangat erat dengan keikhlasan para pengelola melakukan dakwah langsung ke masyarakat. Dalam ketentuan syari'ah orientasi sosial tidak dapat dipisahkan dengan orientasi keuntungan.

Implementasi bisnis syari'ah berorientasi sosial muncul dalam pandangan mengenai konsep *Qardhul hasan* (hutang untuk kebajikan). *Qardhul hasan* dianggap sebagai bentuk pembiayaan yang sama kedudukannya dengan bentuk pembiayaan lainnya. *Qardhul hasan* bukanlah bentuk pembiayaan yang memisahkan kepentingan internal organisasi dan sosial. Bahkan *qardhul hasan* menurut Pak Dumairi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat dan target pengentasan pedagang pasar dari bahaya rentenir. Konsekuensinya, *qardhul hasan* harus masuk dalam perhitungan neraca, laporan laba rugi maupun laporan arus kas.

Qardh dalam *fiqh* menurut Pak Dumairi lebih berorientasi sosial, meskipun sosial tidak berarti merugikan pemberi pinjaman. Di

sini ada kelonggaran menetapkan keuntungan meski keuntungan harus berdasarkan ke-*ridha*-an peminjam. Aspek penting *qardh* berhubungan dengan *nadzarnya* yang harus produktif dan bukan *qardh*-nya yang produktif. Beda konsep antara rentenir dan *qardhul hassan* dijelaskan Pak Dumairi sebagai berikut:

Rentenir: Pedagang pasar meminjam dana Rp 100.000,00 dari rentenir. Pedagang pasar menerima dana pinjaman Rp 90.000,00, sedangkan Rp 10.000,00 langsung dipotong di awal. Sisa pinjaman Rp 90.000,00 dicicil @ Rp 5.000,00 selama 24 hari.

Qardhul hasan: Pedagang pasar meminjam dana Rp 100.000,00 dari MBT. Pedagang pasar menerima dana pinjaman Rp 100.000,00 dan harus dikembalikan 24 hari kemudian sejumlah Rp 100.000,00. Pedagang pasar dipersilakan berbuat baik (*hassan*) dengan memberi lebih dari dana pinjamannya secara ikhlas.

Prinsip pelaporan yang memiliki kesatuan bisnis-da'wah seperti ini sangat mirip dengan gagasan rezeki bernilai tambah. Bisnis sekaligus dakwah adalah kesatuan antara materi-spiritual untuk mendapatkan rezeki bernilai tambah bagi semua, bukan hanya kita, tetapi masyarakat luas sebagai bentuk ketundukan untuk menjalankan dakwah *bil-baal* (dakwah langsung).

Kopontren di sisi lain, cenderung tidak begitu mementingkan laporan keuangan sesuai regulasi PSAK. Keinginan membuat mekanisme pelaporan khas lebih kuat karena terdapat beberapa hal yang kadang-kadang berbeda dengan mekanisme akuntansi formal. Kebetulan di Kopontren ini terdapat salah satu manajer keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi, yaitu Pak Andika. Pak Andika banyak mempertanyakan model pencatatan akuntansi konvensional yang kurang sesuai dengan prinsip syari'ah. Misalnya

prinsip pengakuan dan pengukuran transaksi yang memisahkan transaksi sosial dan ekonomi.

Aneh ya, masak transaksi sosial bisa dipisahkan dengan transaksi ekonomi?

Pemisahan antara transaksi sosial dan ekonomi menurutnya jelas memperlihatkan inkonsistensi ajaran Islam dan akuntansi saat ini. Pak Andika mengindikasikan adanya kesenjangan antara ajaran Islam mengenai aktivitas ekonomi dan sosial dengan model akuntansi yang harus dijalankan saat ini.

5.3.3. *Perilaku Trah Muhammadiyah*

Pendirian gerakan-gerakan terorganisasi seperti Sarekat Islam dan Muhammadiyah pada awal abad ke-20 menurut Jainuri (2002, 139) sebagai salah satu alternatif menentang penindasan di masa penjajahan. Diungkapkan Jainuri bahwa:

...salah satu alternatif yang orang-orang bisa mengekspresikan kepedulian mereka terhadap penderitaan yang dialami oleh masyarakat.

Dua gerakan ini lanjut Jainuri (2002, 139) dianggap memiliki dua cara berbeda mengeskpresikan ide-ide sosial ekonomi mereka, Sarekat Islam menggunakan strategi revolusioner, sedangkan Muhammadiyah strategi reformis.

Strategi reformis Muhammadiyah berdasarkan gagasan-gagasan utama 17 Kelompok Ayat-ayat Al-Qur'an Ajaran KHA. Dahlan. Menurut Jainuri (2002, 147-181) gagasan Ahmad Dahlan memiliki tiga ide pokok tentang pembaharuan sosial, yaitu Iman, Manifestasi Shalat dan Inti Amal Sholeh, dengan menyamakan

tanggung jawab sosial dengan kewajiban keagamaan. Kesejajaran nilai-nilai tanggung jawab sosial dan keagamaan menekankan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan keyakinan dan ritual dasar Islam.

Ide pokok Ahmad Dahlan didasarkan pada tafsiran ayat Al-Qur'an 9:44. Menurut Jainuri (2002, 149) Ahmad Dahlan mendefinisikan iman sebagai:

...jiwa, emosi dan kekayaan seseorang dalam rangka mengabdikan diri di jalan Allah. Iman harus melahirkan emosi, ide, keinginan, perilaku yang baik dan kebajikan-kebajikan lainnya yang mungkin mendorong kaum beriman untuk bertindak secara benar. Sesungguhnya, makna iman seperti inilah yang ditanamkan di hati Nabi dan sahabatnya secara kolektif membangun sebuah tatanan sosial yang baru. Aspek sosial iman karenanya berkaitan dengan makna amal sholeh, *birr* (kebajikan), *kbayr* (kebaikan), suatu kaitan yang dengan jelas dinyatakan dalam formula *amar ma'ruf nahi munkar* dan *fastabiqul kbatrot*. Korelasi iman dan amal sholeh berpuncak pada usaha membelanjakan harta kekayaan seseorang di jalan Allah.

Mengenai implementasi iman dalam ibadah ditegaskan Boestani Ibrahim dalam Jainuri (2002, 151) bahwa ibadah dalam Islam harus:

memenuhi tujuan tertentu dan harus mendatangkan *maslahat* bagi banyak orang dan bahwa ibadah yang tidak bisa memenuhi makna ini akan menjadi tidak sempurna.

Salah satu manifestasi sifat sosial dalam keimanan para penggiat Muhammadiyah dapat dilihat dari penerjemahan *zakat* dalam realitas sosial mereka. Tradisi Muhammadiyah melihat *zakat* dengan gaya khas. Pemikiran *zakat* dijelaskan oleh Jainuri (2002, 151) memiliki:

...makna sosial yang kuat di balik implementasinya juga harus dipahami sebagai punya dua tujuan penting. **Pertama**, dorongan semangat kedermawanan kepada orang lain, melalui sedekah dan infaq; dan **kedua**, kesejahteraan orang banyak pada umumnya.

Konsep *zakat* tersebut berdampak pada kesejateraan sosial sebagai tanggung jawab kolektif. Pergeseran dari usaha individu ke institusional atau kolektif dalam menangani proyek-proyek kesejahteraan sosial memerlukan dukungan keuangan yang besar. Mandat Muhammadiyah yang paling pokok kemudian, simpul Jainuri (2002, 159), adalah untuk memecahkan masalah sosial dengan melaksanakan perintah agama melalui usaha kolektif. Tekanan organisasi dan tindakan seperti itu sesuai ungkapan terkenal Ali bin Abi Thalib yang biasa digunakan Mas Mansoer:

Amal baik yang tidak diorganisasi dapat dikalahkan oleh tindakan jahat yang terorganisasi.

Aktivitas bisnis sebagai representasi merealisasikan keimanan para aktivis Muhammadiyah menurut Jainuri (2002, 159) juga ditekankan kaitannya dengan *shalat*. Ahmad Dahlan mendasarkan pendapatnya pada QS. 107:1-7, mengenai ciri orang yang mendustakan agama dan mengidentifikasi sebagai tidak dermawan terhadap orang miskin dan mendorong yang lain untuk berbuat serupa. Sebaliknya orang beriman harus memperhatikan dan melakukan yang terbaik untuk orang lain. Penafsiran ini mendasari keyakinan anggota Muhammadiyah untuk menyumbangkan hartanya guna mendukung keluasan program sosial. Pemikiran seperti ini ternyata membentuk *perilaku* melakukan *praktik* bisnis di *lapangan* oleh pribadi-pribadi Muhammadiyah. Contohnya Pak H. Cholid (Qodir 2002, 94) mengatakan:

Hidup itu harus seimbang antara kebutuhan jasmani dan rohani... Saya sekarang sudah sibuk mengurus pabrik, sehingga di Muhammadiyah bagaimanapun harus memberikan infaq, harta semampu kita, sebagai amal sholeh.

Penafsiran lebih substansial dalam pelaksanaan tanggung jawab atas masalah sosial oleh para penggiat Muhammadiyah biasanya disebut dengan amanah. Amanah dalam koridor "trah" Muhammadiyah dapat dilihat misalnya dari ungkapan Pak Abdul Munir Mul Khan, salah satu tokoh Muhammadiyah kritis dan saat ini juga menduduki jabatan komisaris Bank Persyarikatan Indonesia ketika diwawancarai peneliti. Pak Munir meterjemahkan amanah dengan:

Amanah itu ya... lebih sufistik dan lebih dekat pada konsep tanggung jawab tertinggi yang melekat pada setiap manusia. Tanggung jawab langsung dari Allah kepada tiap manusia. Manusia punya beban sejarah utama di alam semesta, itu yang disebut amanah. Di dalam amanah itu terdapat kewajiban. Menjalankan amanah itu harus jelas, konkrit dan paling penting lagi ikhlas.

Implementasi konsep amanah juga dapat dilihat dari penelitian Nakamura (1983, xi) mengenai proses Islamisasi masyarakat di Kotagede Yogyakarta melalui Muhammadiyah⁸⁴. Gerakan Muhammadiyah Kotagede meneruskan dan malahan mengubah tradisi agama setempat sehingga mendekat lebih erat kepada kebenaran Islam. Muhammadiyah, lanjut Nakamura (1983, 161), mengajarkan bahwa jika orang Islam benar-benar tulus percaya

⁸⁴ Studi Nakamura didasarkan argumen bahwa gerakan Muhammadiyah di Kotagede sebagai manifestasi kontemporer proses kelanjutan sejarah Islamisasi dan hubungannya dengan para pedagang Islam Jawa. Perkembangannya dihubungkan perubahan aspek sosial, ekonomi dan politik Kotagede.

pada Tuhan, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dengan benar, menyesuaikan tingkah lakunya menurut apa yang diperintahkan Allah (syariat), maka dia dijamin oleh Allah. Segala sesuatu seperti dijelaskan di atas dianggap sebagai amanah Allah semata. Implementasi *perilaku* amanah dapat dilihat dari ungkapan Bu Pamela Sunardi Syahuri (Widiatno 2006, 142-143):

...usaha yang dijalankan merupakan usaha yang halal, tayyib serta tidak bertentangan dengan hukum agama dan negara.. lebih dari itu, anggaplah semua usaha ekonomi yang dijalani itu sebagai suatu kegiatan ibadah. Dengan niat ini, maka hati kita menjadi lebih ikhlas. Kita tidak lagi menganggap pekerjaan hanya semata-mata untuk mengejar materi yang bersifat keduniawian.. selalu berusaha untuk bersikap jujur, amanah dan disiplin..

Bentuk amanah melakukan usaha lebih konkrit diungkapkan Pak Aziz, sarjana Ekonomi UGM yang sekarang melakukan bisnis di tempat kelahirannya, Jepara. Penulis berkunjung ke rumah beliau selama sepuluh hari, menginap di rumahnya bahkan ikut berinteraksi dengan realitas bisnis beliau. Berikut ungkapan beliau pada saat penulis sedang berada di “mobil box” untuk mengantar hasil produksinya ke toko-toko sekitar Jepara:

Bisnis memang harus disadari sebagai bentuk *ma'isyah*, mencari mata pencaharian karena Allah. Berusaha mencari uang itu tidak hanya mengeluarkan biaya untuk bikin *sparepart*, trus menjual supaya dapat hasil banyak.

Paling penting itu ya memutar uang, keluar masuknya uang, untuk mendapatkan rezeki yang barokah. Nggak perlu serakah, tetapi cukup. Cukup untuk makan keluarga, sekolah anak-anak, untuk tabungan.

Makna amanah dalam bisnis menurut Pak Aziz disebut *ma'isyah*. Pak Aziz mendefinisikan *ma'isyah* sebagai mencari mata pencaharian untuk mendapatkan rezeki yang *barokah* dalam rangka mengabdikan kepada Allah.

Penjelasan Pak Aziz tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pemaknaan amanah dalam bisnis dari trah Muhammadiyah lainnya, yaitu Pak Ishar, pemilik toko leveransir (bahan bangunan) di Malang. Komentar Pak Ishar ini ditangkap penulis pada saat beliau selesai melayani pembeli di hari ke enam penulis berinteraksi di tokonya. Menurutnyanya:

Mencari rejeki itu kan tidak bisa lepas dari ibadah kita, cari rejeki itu, *ma'isyah* itu selalu dalam rangka ibadah *lo mas*. Ya perkara cari untung, memang iya, itu kan nilai lebihnya, tapi yang penting semua harus barokah, karena itu adalah bentuk ibadah pada Allah.

Makna amanah Pak Ishar tidak jauh berbeda dengan Pak Aziz, bahwa *ma'isyah* untuk mendapatkan rezeki yang *barokah* dalam rangka beribadah kepada Allah.

5.4. RINGKASAN: AMANAH DALAM RANGKAIAN ANTROPOLOGI SINKRONIS

Penelusuran *perilaku* pelaku bisnis melakukan *praktik* di *lapangan* melalui antropologi sinkronis memunculkan pemaknaan konsep amanah yang unik. Berikut ini akan dilakukan proses perangkaian makna amanah dari berbagai trah. Untuk mempermudah penjelasan juga digambarkan rangkaian makna amanah bisnis (lihat gambar 5).

Amanah versi Pak Abbas (SI) memunculkan tiga makna, yaitu kemandirian, *imanan wabtisaban* dan *shirotol mustaqim*. Ketiga prinsip tersebut terjalin berkelindan membentuk *perilaku* inti, yaitu amanah sebagai aplikasi ibadah ekonomi. Ibadah ekonomi mewujud dalam *ma'isyah* (bekerja) mencari nilai tambah rezeki dan berujung modal hari akhir. Amanah bisnis juga harus memiliki relasi sosial dan lingkungan serta tidak melanggar ketentuan-ketentuan Islam (*halal* dan *thoyib*).

Amanah versi Nahdlatul Ulama berbasis pada empat sifat, yaitu *siddiq, amanah, tabligh* dan *fatonah*. Keempatnya terimplementasi dalam *perilaku* inti Pak Mahmud, Pak Dumairi, Pak Baihaqi dan Pak Andika. Bentuknya adalah amanah kesatuan *da'wah* dan bisnis yang dilakukan sesuai ketentuan fiqh (*halal, thoyib* dan bebas *riba*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Implementasi bisnis berorientasi sosial muncul dalam pandangan mengenai konsep sistem pembiayaan *qardhul hassan*. Mereka juga melihat bahwa pencapaian laba bersih merupakan bentuk nilai tambah sebagai implementasi religiusitas untuk kepentingan sosial dan lingkungan.

Amanah versi Muhammadiyah berbasis pada tiga pandangan, yaitu tanggung jawab tertinggi, manifestasi shalat dan inti amal sholeh. Ketiganya terimplementasi dalam *perilaku* inti Bu Pamella, Pak Munir, Pak Ishar dan Pak Aziz. Bisnis harus dilakukan secara baik, *halal* dan *thoyyib*, didistribusikan untuk kesejahteraan penuh keikhlasan. Keempatnya menyepakati bahwa aktivitas bisnis adalah salah satu bentuk *ma'isyah* untuk mendapatkan rezeki dan kekayaan dalam rangka ketakwaan.

Gambar 5. Implementasi Amanah dalam *Perilaku* Bisnis

Penerjemahan konsep amanah para pelaku bisnis di atas sebenarnya perlu dilihat lebih jauh. Apakah benar *perilaku* amanah merupakan implementasi *uswah* berbisnis Rasulullah? Seperti telah dijelaskan di Bab 2 poststrukturalisme memungkinkan *matching* antara realitas bisnis Rasulullah (representasi masa lalu) dengan realitas bisnis Muslim trah SI, Muhammadiyah dan NU (representasi masa kini). Prosesnya adalah mencari titik temu antara proses antropologis sinkronis dan diakronis untuk menemukan sinkronisasi temuan lapangan. Proses sinkronisasi disebut Marzali (2005, 41) sebagai bentuk etnologis teoritis. Sinkronisasi untuk teoritisasi dengan cara pemaknaan simbol-simbol yang mungkin. Simbol-simbol substansial, mirip, sama, sebangun dan sekaligus unik dapat dijadikan bahan pembentukan akun-akun dan laporan keuangan. ■